



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah perlu menyusun program dan kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah serta mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2024;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemerintah desa yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah warga miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
7. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat RAT Penanggulangan Kemiskinan adalah dokumen penanggulangan kemiskinan untuk periode selama 1 (satu) tahun.
9. Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut LP2KD adalah laporan yang disusun TKPKD setiap tahunnya sebagai sarana monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah.
10. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
11. Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat berdasarkan indikator kemiskinan Daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian dari Pemerintah.
12. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.
13. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Daerah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Situbondo.

14. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disebut PPKE adalah pelaksanaan program untuk percepatan penghapusan kemiskinan eskترم yang dilakukan secara terpadu, sinergi, tepat sasaran melalui koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan unsur nonpemerintah, dengan memperhatikan faktor kesetaraan gender, disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan, serta adanya pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam upaya penanganan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Daerah pada Tahun 2024.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II ANALISA SITUASI KEMISKINAN
 - BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN
2023
 - BAB IV RENCANA AKSI TAHUNAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024
 - BAB V PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) TKPKD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024.
- (2) Pemantauan dan evaluasi kemiskinan dilakukan dengan menyusun LP2KD tiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemantauan dan evaluasi kemiskinan ekstrem dilakukan dengan menyusun Laporan Kemiskinan Ekstrem tiap 3 (tiga) bulan sekali.

- (4) LP2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Laporan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Wakil Gubernur Jawa Timur selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 3 Januari 2024
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 3 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 4



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah lama yang pada umumnya dihadapi hampir di semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Selain itu, kemiskinan masih menjadi masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan ideologi.

Secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Karena sifat kemiskinan yang multi dimensional tersebut, maka kemiskinan telah dapat menyebabkan akibat yang juga beragam dalam kehidupan nyata, antara lain secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat, rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat, menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang. Semua indikasi tersebut merupakan kondisi yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Pemerintah menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; dan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Menindaklanjuti hal di atas, penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Sedangkan program penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo (TKPK) yang dibentuk melalui Keputusan Bupati mempunyai mandat salah satunya untuk merumuskan segala kebijakan terkait percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo, baik dilihat dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan.

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren positif (menurun) dimana pada tahun 2018 sebesar 11,82%, lalu turun menjadi 11,20% pada tahun 2019. Sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020 karena masa pandemi covid 19 menjadi 12,22% dan kembali naik di tahun 2021 menjadi 12,63%, dan akhirnya mengalami penurunan menjadi 11,78% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 11,90%.

Seringkali fluktuasi angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo dipengaruhi oleh adanya kebijakan di tingkat pusat. Dengan demikian diperlukan usaha yang serius dari Pemerintah Kabupaten Situbondo guna meminimalisir dampak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Harapannya dampak negatif dari kebijakan tersebut dapat ditekan, sehingga penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo menunjukkan tren positif setiap tahunnya.

Dalam rangka sinergitas dan efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan, maka penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Situbondo menjadi sebuah keharusan dan penting untuk dilakukan guna menerjemahkan kebijakan umum Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2022-2026 yang telah disusun pada tahun sebelumnya.

1.2 DASAR HUKUM

Beberapa dasar hukum yang digunakan di antaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 6).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 Kabupaten Situbondo adalah untuk menerjemahkan kebijakan umum Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2022-2026 yang telah disusun pada tahun sebelumnya, serta dalam rangka sinergitas dan efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan.

Tujuan dari Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 Kabupaten Situbondo yaitu:

1. untuk mengetahui kondisi umum kemiskinan di Kabupaten Situbondo;
2. untuk mengetahui upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menanggulangi kemiskinan melalui perangkat daerahnya;
3. untuk merumuskan rencana aksi tahunan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo ke depan yang selaras dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2022-2026 dalam bentuk Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB II ANALISA SITUASI KEMISKINAN

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2023

BAB IV RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

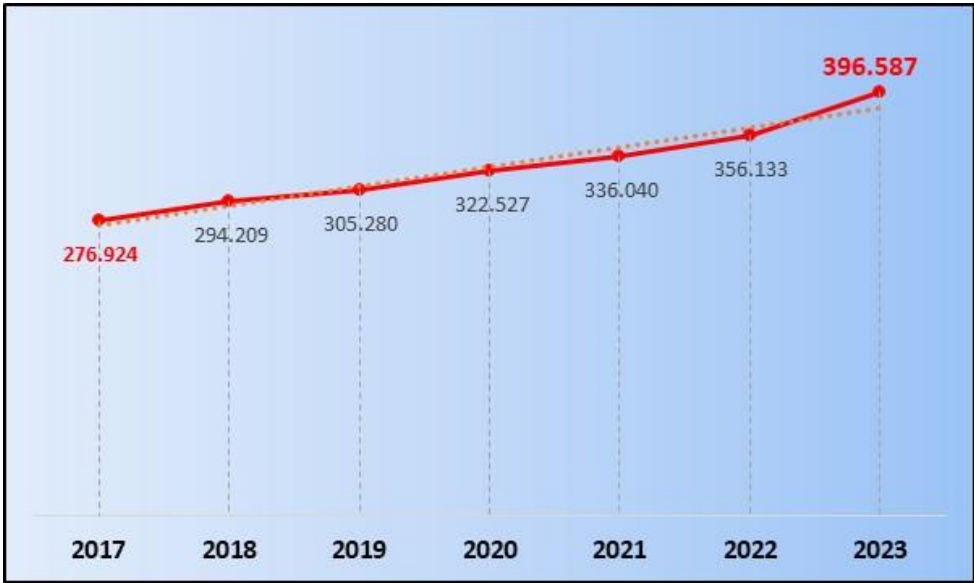
BAB V PENUTUP

BAB II
ANALISA SITUASI KEMISKINAN

2.1 KONDISI UMUM KEMISKINAN KABUPATEN SITUBONDO

2.1.1 Garis Kemiskinan

Salah satu tolok ukur untuk mengukur kemiskinan, yang sering digunakan oleh BPS yaitu menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, sehingga Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan.



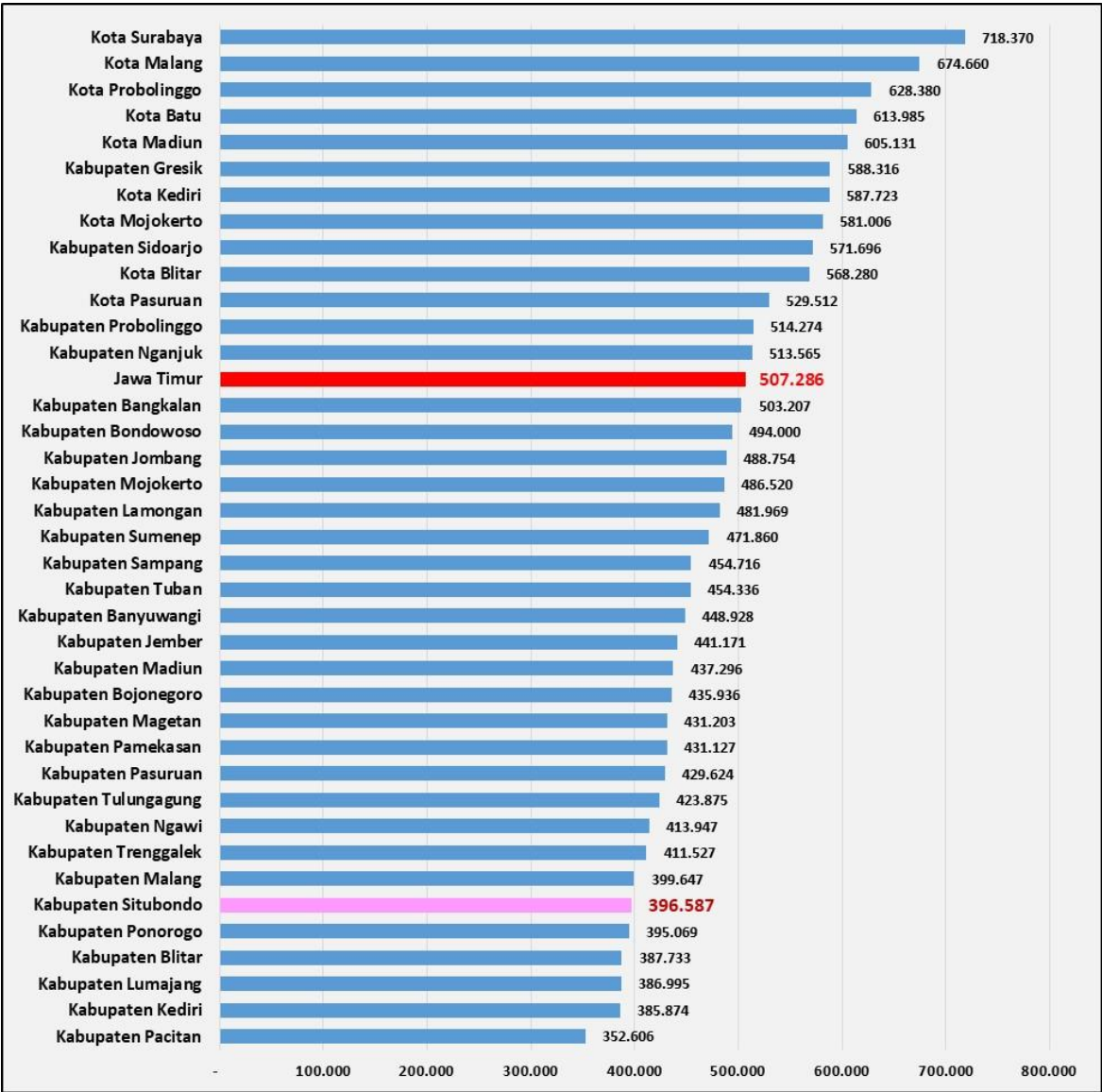
Gambar 2.1 Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2023

Tabel 2.1 :Pertumbuhan Garis Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2023

TAHUN	GARIS KEMISKINAN	
	(Rupiah/ Bulan/ Kapita)	Pertumbuhan (%)
2017	276.924	
2018	294.209	6,24
2019	305.280	3,76
2020	322.527	5,65
2021	336.040	4,19
2022	356.133	5,98
2023	396.587	11,36
RATA-RATA	335.129,33	6,20

Sumber : <https://jatim.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab5>. diakses : 13 Nov 2023, 10:32 WIB.

Perbandingan garis kemiskinan di Kabupaten Situbondo terhadap garis kemiskinan di Kabupaten/kota lainnya di provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada gambar berikut ini :



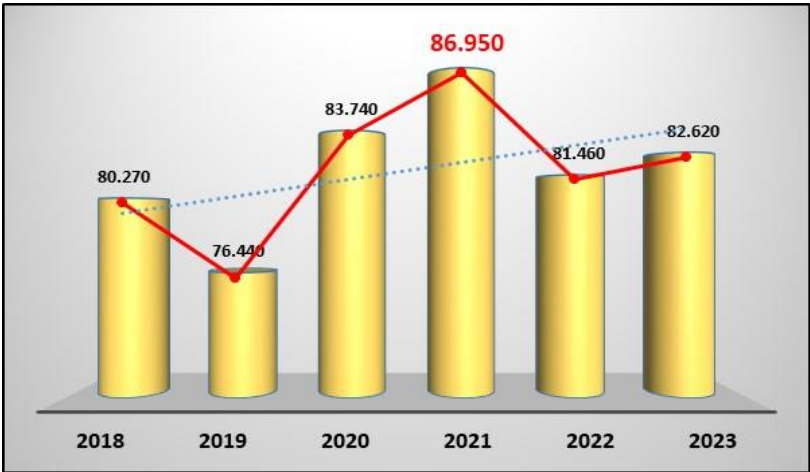
Gambar 2.2 Grafik Garis Kemiskinan Kabupaten Situbondo pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Tabel dan gambat tersebut menunjukkan bahwa :

1. Garis kemiskinan di Kabupaten Situbondo, khususnya tahun 2023 masih tergolong rendah yaitu sebesar Rp. 396.587/Bulan/Kapita, dan berada pada urutan ke 6 terendah di Provinsi Jawa Timur, dan masih berada dibawah GK provinsi Jawa Timur;
2. Garis kemiskinan tahun 2023 merupakan garis kemiskinan tertinggi di Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu tahun 2017 – 2023. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 11,36% dari tahun sebelumnya;
3. Laju per tumbuhan rata-rata sebesar 6,20% per tahun, dan memiliki kecenderungan (trend) naik. Rata-rata nilai GK rata-rata sebesar Rp. 335.129,33/Bulan/Kapita;

2.1.2 Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo mengalami fluktuasi yang cukup signifikan khususnya pada masa pandemi Covid-19 yaitu tahun 2019 – 2021 yang cenderung mengalami kenaikan. Semenjak maraknya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar -3.830 jiwa, kemudian naik pada tahun 2020 sebesar 7.300 jiwa pada masa pandemi tahun kedua menjadi 83.740 jiwa, yang terus naik pada tahun 2021 sebesar 3.210 jiwa menjadi 86.950 jiwa.



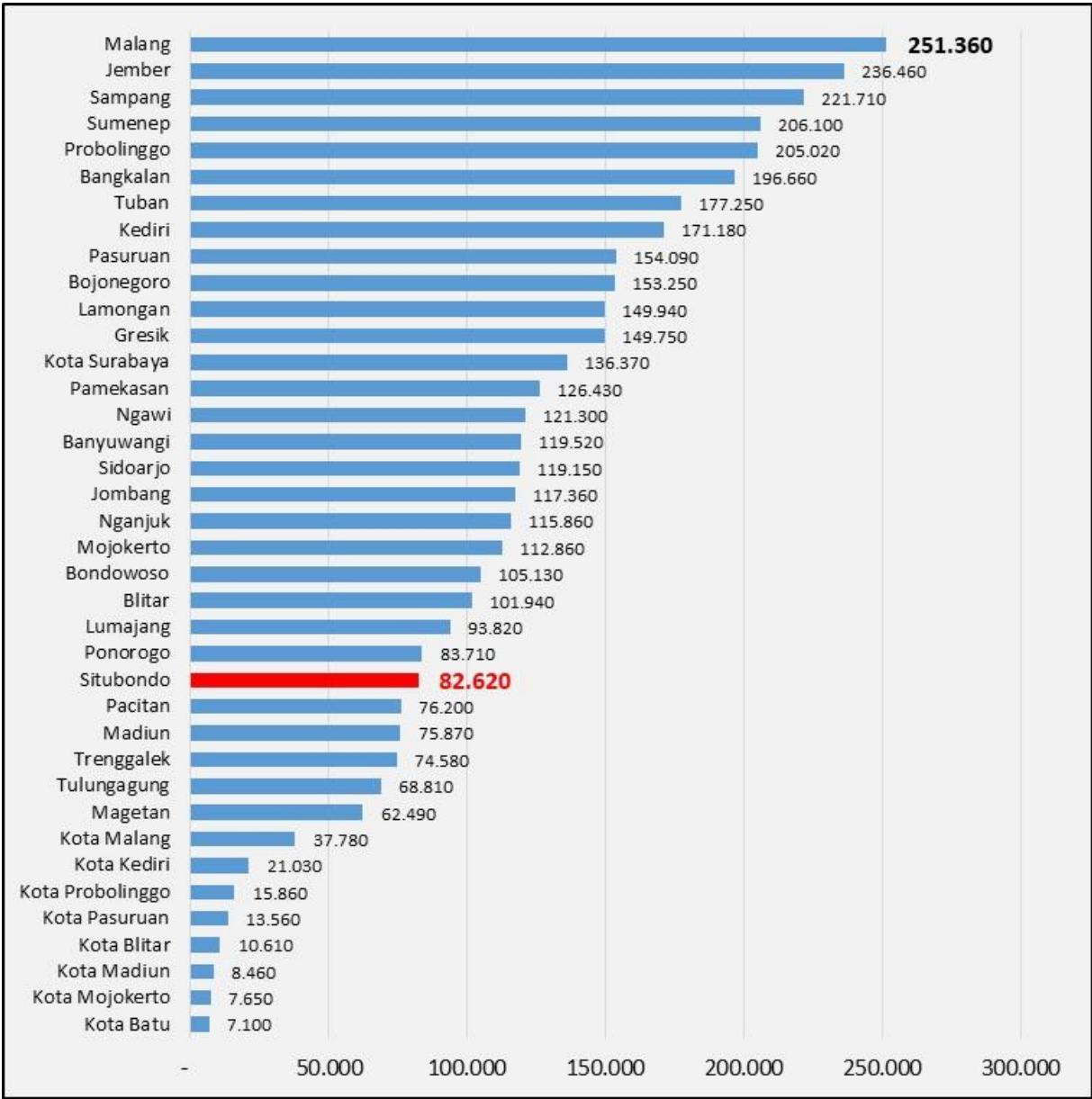
Gambar 2.3 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2018 – 2023

TABEL 2.2: Pertumbuhan Garis Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023 diantara Regional Provinsi Jawa Timur dan Nasional

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK MISKIN TAHUN (jiwa)						RATA-RATA
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kab. Situbondo	80.270	76.440	83.740	86.950	81.460	82.620	81.913
pertumbuhan		-4,77	9,55	3,83	-6,31	1,42	0,74
Jawa Timur	4.332.620	4.112.270	4.419.110	4.572.740	4.181.270	4.188.840	4.301.142
pertumbuhan		-5,09	7,46	3,48	-8,56	0,18	-2,53
Indonesia	25.675.000	24.786.000	26.424.000	27.543.000	26.161.000	25.899.000	26.081.333
pertumbuhan		-3,46	6,61	4,23	-5,01	-1,00	0,27



Gambar 2.4 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023 diantara Regional Provinsi Jawa Timur dan Nasional



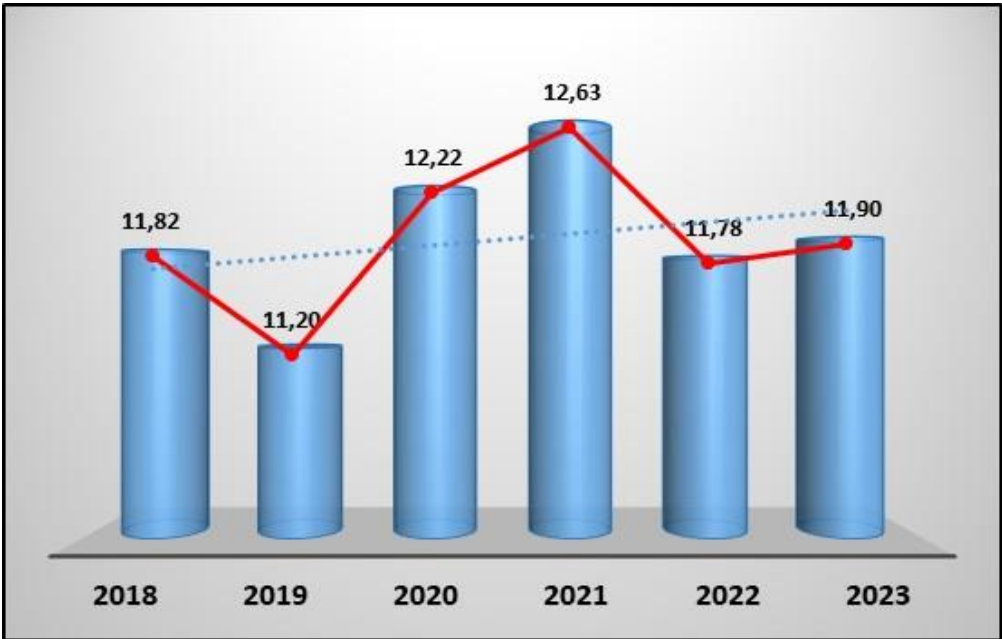
Gambar 2.5 Grafik Posisi Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2023 secara Regional Provinsi Jawa Timur

2.1.3 Persentase Penduduk Miskin (P0)

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Situbondo selama periode 2018 – 2023 menunjukkan data yang fluktuatif.

Tabel 2.3 : Pertumbuhan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

TAHUN	PERSENTASE P0	
	(%)	Pertumbuhan (%)
2018	11,82	
2019	11,20	-5,25
2020	12,22	9,11
2021	12,63	3,36
2022	11,78	-6,73
2023	11,90	1,02
RATA-RATA	11,95	0,30

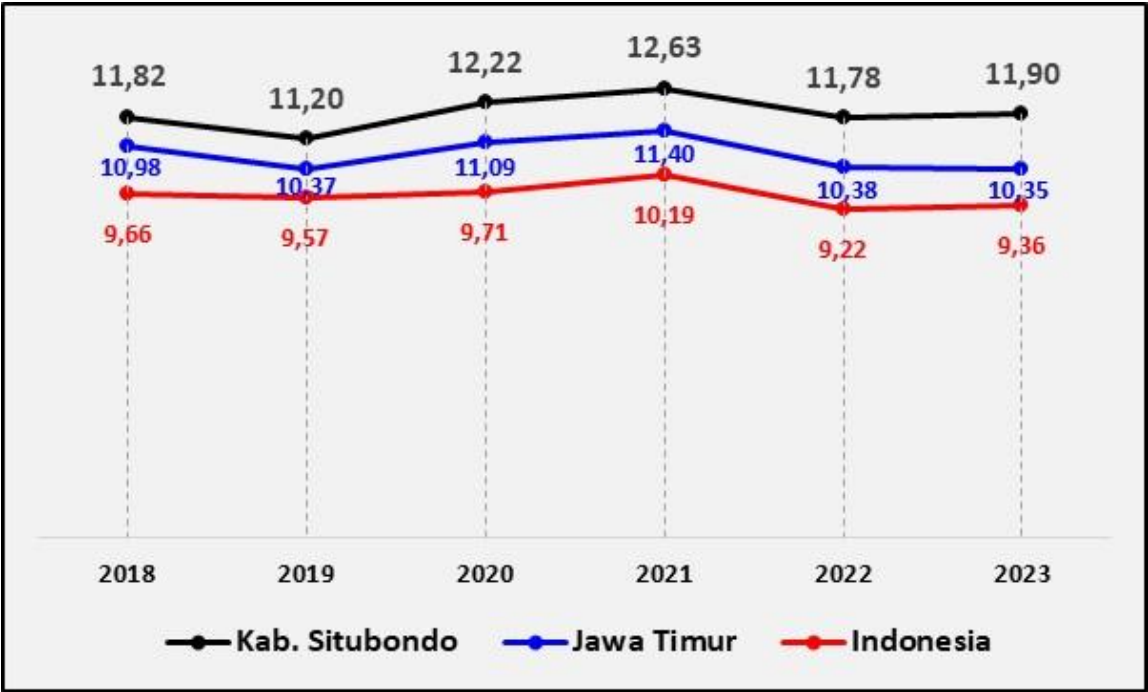


Gambar 2.6 Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2018 – 2023

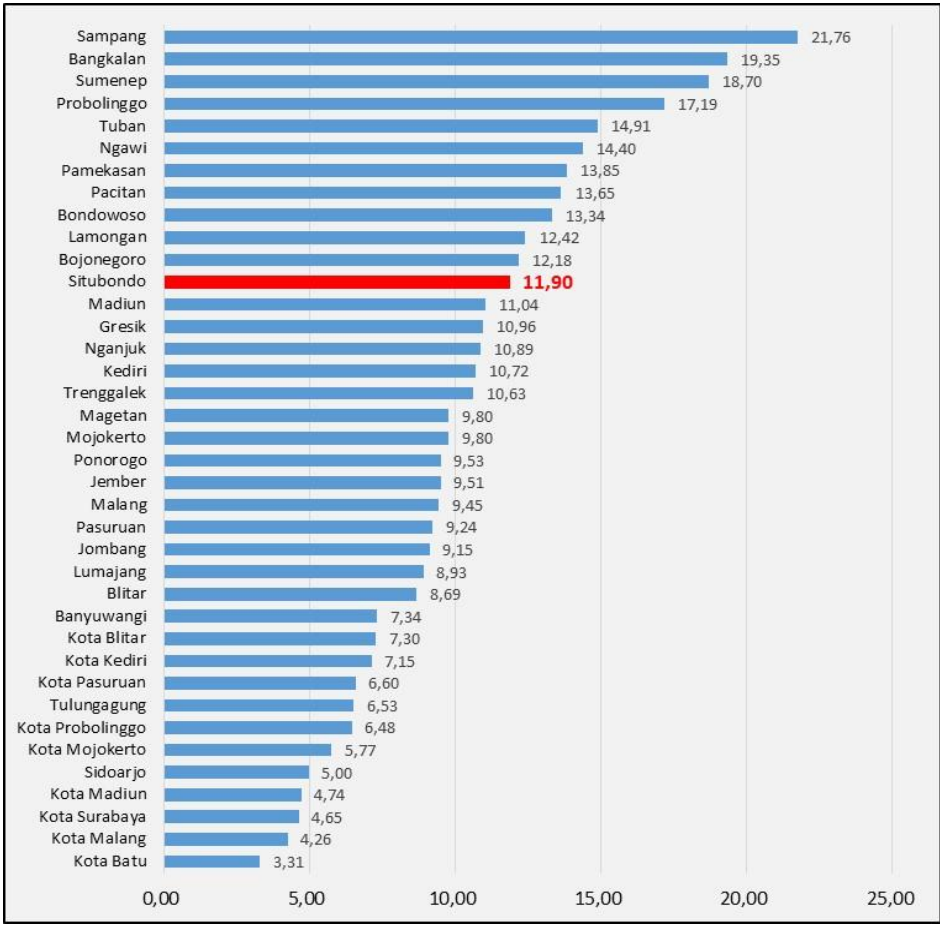
Tabel 2.4: Pertumbuhan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023 diantara Regional Provinsi Jawa Timur dan Nasional

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (P0) - TAHUN (jiwa)						RATA-RATA
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kab. Situbondo	11,82	11,20	12,22	12,63	11,78	11,90	11,93
pertumbuhan		-5,25	9,11	3,26	-6,73	1,02	0,74
Jawa Timur	10,98	10,37	11,09	11,40	10,38	10,35	10,76
pertumbuhan		-5,56	6,94	2,80	-8,95	-0,29	-5,06
Indonesia	9,66	9,57	9,71	10,19	9,22	9,36	9,62
pertumbuhan		-0,93	1,46	4,94	-9,52	1,52	-2,53

Sumber : <https://jatim.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab5>.
diakses : 23 Nov 2023, 22:00 WIB



Gambar 2.7 Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023 diantara Regional Provinsi Jawa Timur dan Nasional



Gambar 2.8 Grafik Posisi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2023 secara Regional Provinsi Jawa Timur

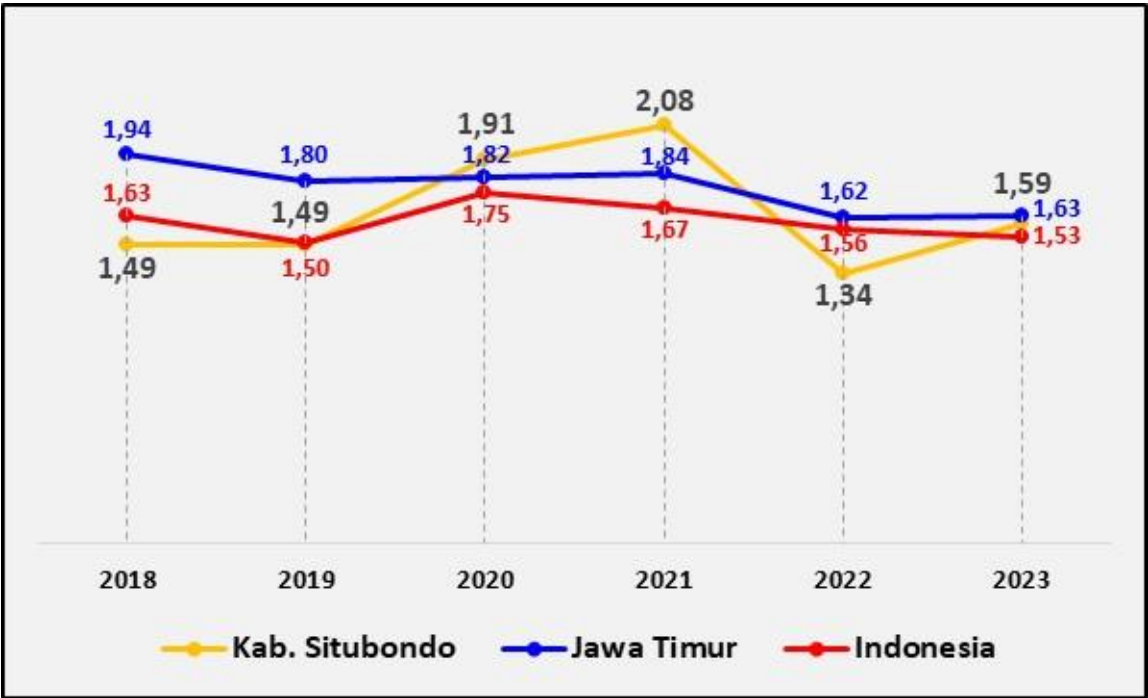
2.1.4 Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)

Penanggulangan kemiskinan bukan hanya menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin tetapi lebih dari itu yang terpenting adalah bagaimana mengatasi kedalaman kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah indikator yang menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Tabel 2.5 :Pertumbuhan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023 diantara Regional Provinsi Jawa Timur dan Nasional

WILAYAH	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) - TAHUN (%)						RATA-RATA
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kab. Situbondo	1,49	1,49	1,91	2,08	1,34	1,59	1,65
pertumbuhan		0,00	28,19	8,90	-35,58	18,66	20,17
Jawa Timur	1,94	1,80	1,82	1,84	1,62	1,63	1,78
pertumbuhan		-7,22	1,11	1,10	-11,96	-11,41	-5,68
Indonesia	1,63	1,50	1,75	1,67	1,56	1,53	1,61
pertumbuhan		-7,98	16,67	-4,57	-6,59	-8,38	-2,17

Sumber : <https://jatim.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab5>. diakses : 13 Nov 2023, 10:15 WIB

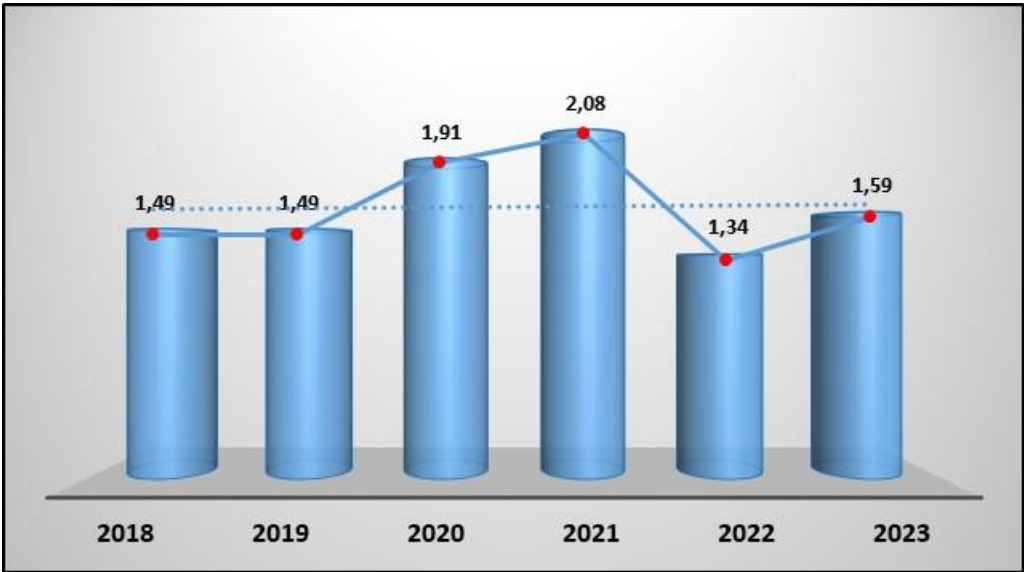


Gambar 2.9 Grafik Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023 diantara Regional Provinsi Jawa Timur dan Nasional

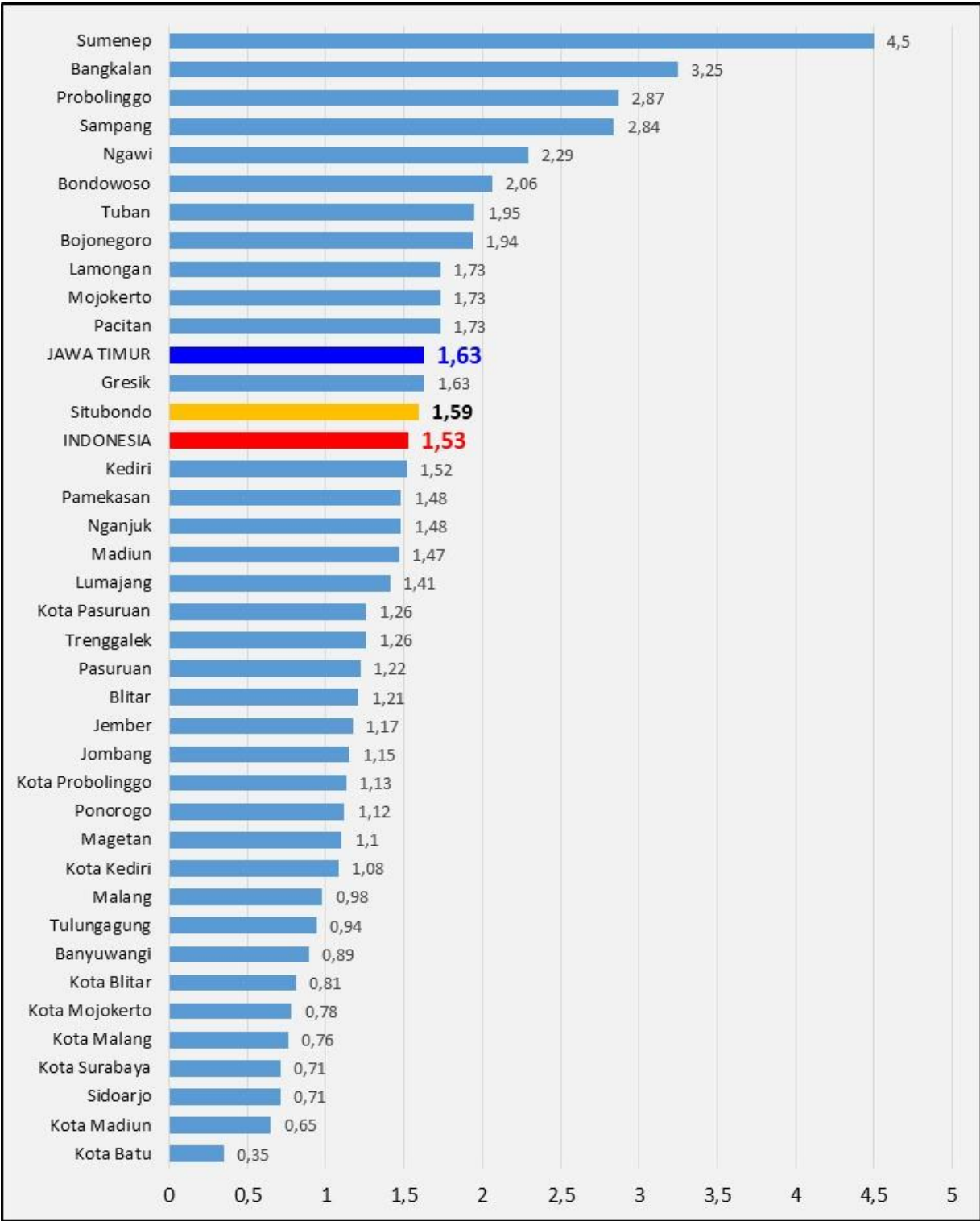
Tabel 2.6: Pertumbuhan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

TAHUN	PERSENTASE INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)	
	(%)	Pertumbuhan (%)
2018	1,49	
2019	1,49	-
2020	1,91	28,19
2021	2,08	8,90
2022	1,34	-35,58
2023	1,59	18,66
RATA-RATA	1,68	4,03

Sumber : <https://jatim.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab5> (diolah).



Gambar 2.10 Grafik Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Situbondo Tahun 2018 – 2023



Gambar 2.11 Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Situbondo Tahun 2023 secara Regional Provinsi Jawa Timur

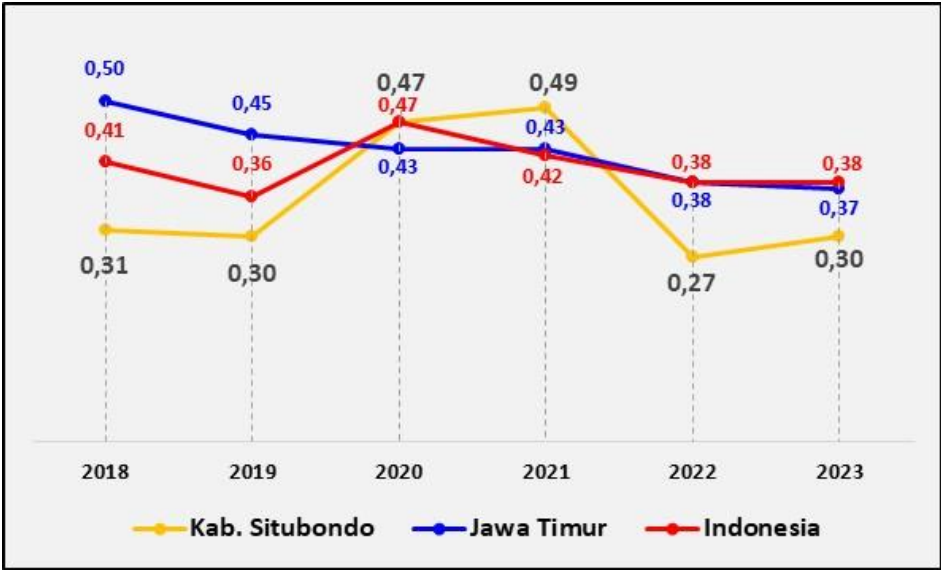
2.1.5 Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah indikator yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2.7 : Pertumbuhan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023 diantara Regional Provinsi Jawa Timur dan Nasional

WILAYAH	INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) - TAHUN (%)						RATA-RATA
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kab. Situbondo	0,31	0,30	0,47	0,49	0,27	0,30	0,36
<i>pertumbuhan</i>		-3,23	56,67	4,26	-44,90	11,11	23,91
Jawa Timur	0,50	0,45	0,43	0,43	0,38	0,37	0,43
<i>pertumbuhan</i>		-10,00	-4,44	0,00	-11,63	-13,95	-8,01
Indonesia	0,41	0,36	0,47	0,42	0,38	0,38	0,40
<i>pertumbuhan</i>		-12,20	30,56	-10,64	-9,52	-9,52	-2,27

Sumber : <https://jatim.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab5>. diakses : 13 Nov 2023, 10:20 WIB

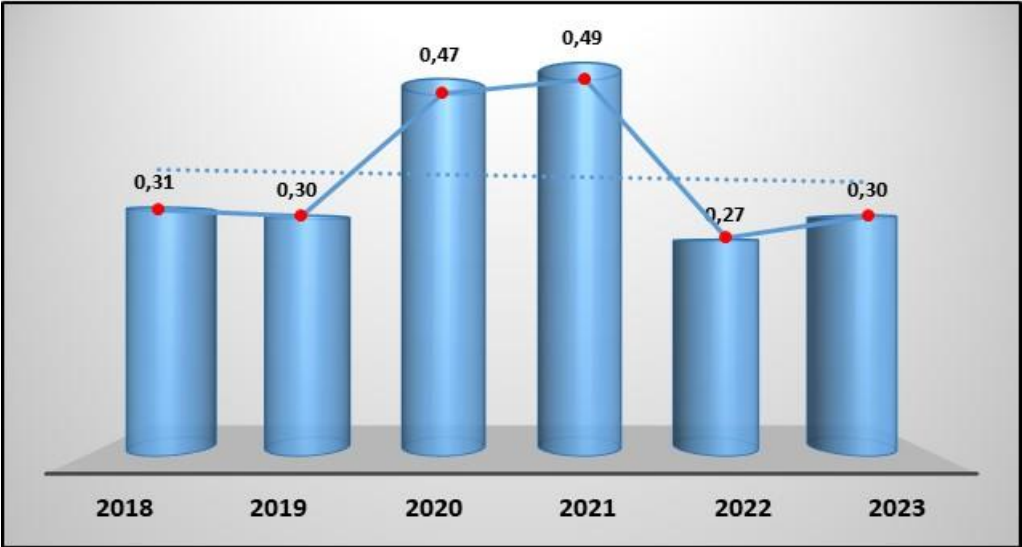


Gambar 2.12 Grafik Perkembangan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023 diantara Regional Provinsi Jawa Timur dan Nasional

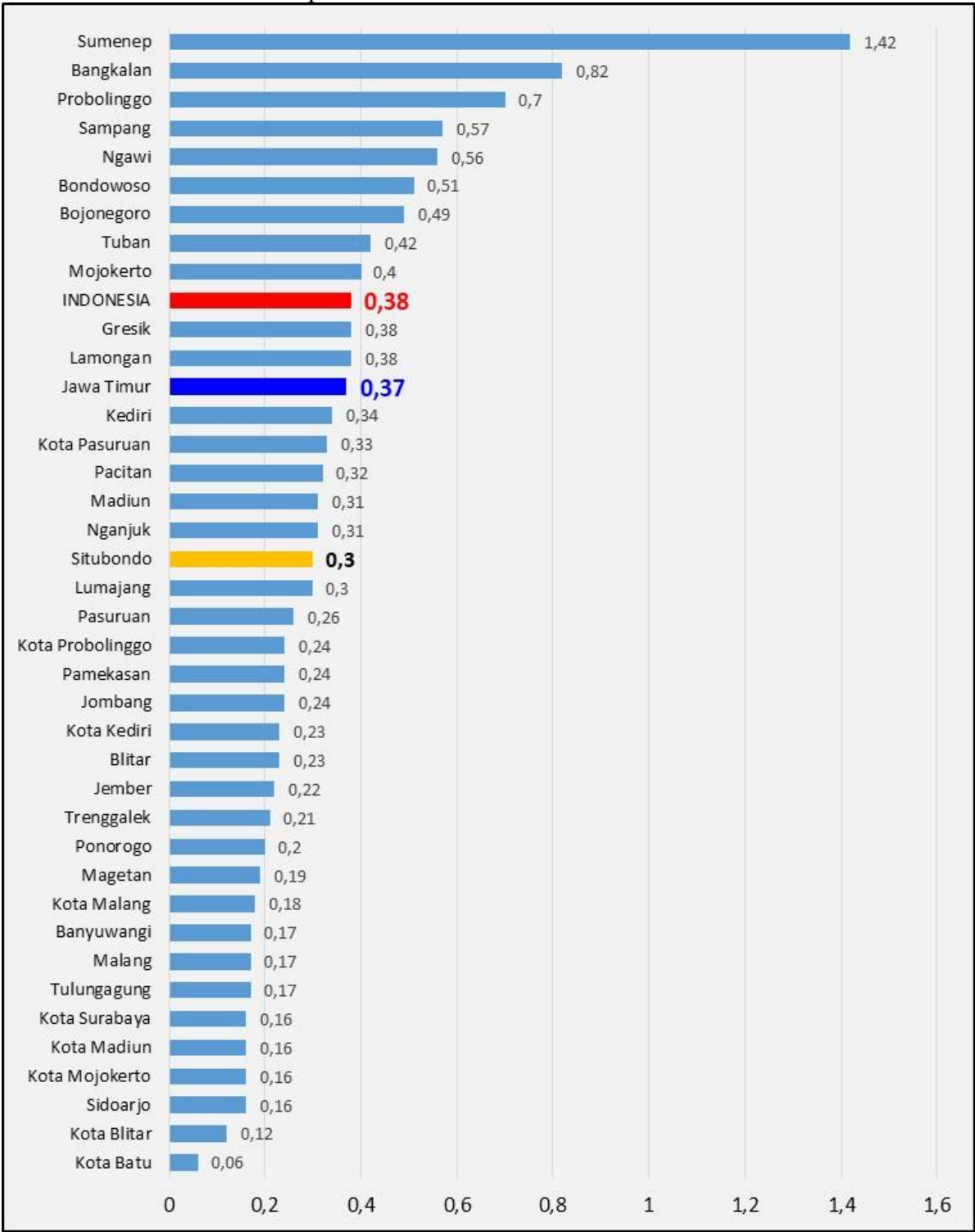
Tabel 2.8: Pertumbuhan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

TAHUN	PRESENTASE INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)	
	(%)	Pertumbuhan (%)
2018	0,31	
2019	0,30	-3,23
2020	0,47	56,67
2021	0,49	4,26
2022	0,27	-44,90
2023	0,30	11,11
RATA-RATA	0,37	4,78

Sumber : <https://jatim.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab5> (diolah).



Gambar 2.13 Grafik Perkembangan Indeks Kedalaman Keparahan (P2) Kabupaten Situbondo Tahun 2018 – 2023



Gambar 2.14 Grafik Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Situbondo Tahun 2023 secara Regional Provinsi Jawa Timur

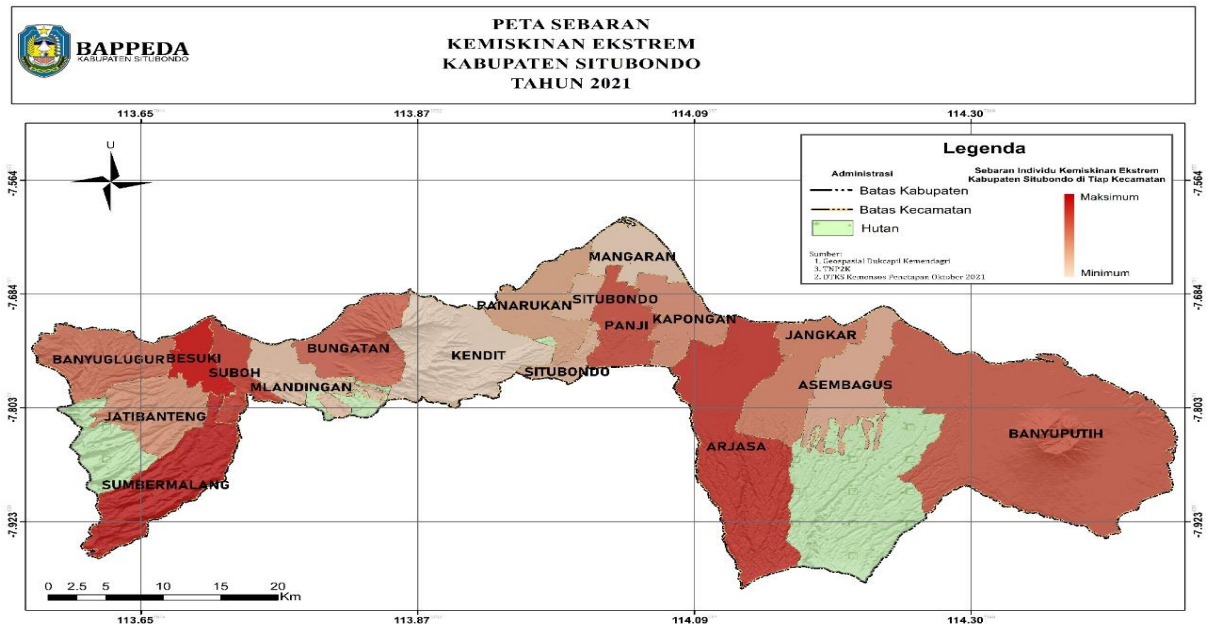
Tabel 2.9: Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kategori Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2023

KECAMATAN	SANGAT MISKIN	MISKIN	HAMPIR MISKIN	RENTAN MISKIN	TIDAK MISKIN
ARJASA	2076	7749	2993	1450	1704
ASEMBAGUS	592	7477	4425	2019	2387
BANYUGLUGUR	1184	5003	1299	741	837
BANYUPUTIH	4912	8306	2439	1290	1180
BESUKI	1307	14093	2854	1265	1524
BUNGATAN	822	5903	1671	638	512
JANGKAR	1530	7180	3699	1218	1395
JATIBANTENG	883	5812	1076	496	668
KAPONGAN	665	9166	2557	1654	1154
KENDIT	328	5970	2658	1190	783
MANGARAN	733	9362	1488	654	1151
MLANDINGAN	823	5556	1204	701	552
PANARUKAN	854	8393	4890	2430	2640
PANJI	840	8873	4886	2311	2546
SITUBONDO	316	5360	3486	2097	2460
SUBOH	952	6403	1582	599	1100
SUMBERMALANG	2063	6918	912	417	550
TOTAL	20880	127524	44119	21170	23143

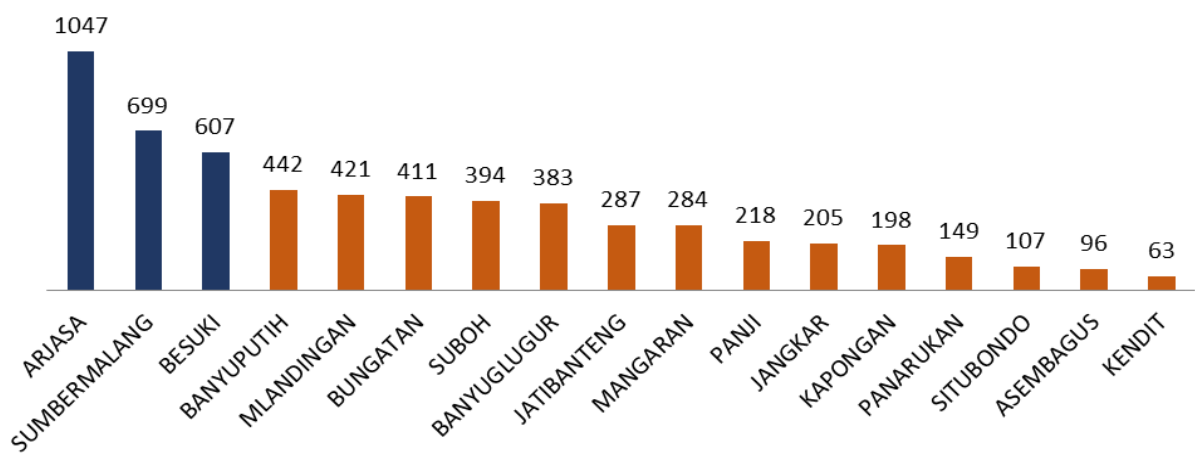
Sumber: TKPKD Kabupaten Situbondo, 2023

2.1.6 Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Situbondo tersebar di seluruh kecamatan. Berdasarkan data pada Tahun 2022 jumlah warga miskin ekstrem terbanyak ada di Kecamatan Arjasa sejumlah 1047 dan jumlah warga miskin ekstrem terendah ada di Kecamatan Kecamatan kendit sejumlah 63.



Gambar 2.15 Persebaran Kemiskinan Ekstrem Per Kecamatan (Jiwa) hasil pemutakhiran P3KE Tahun 2022



Gambar 2.16 Data Warga Miskin Ekstrem Kabupaten Situbondo per Kecamatan Tahun 2022

Tabel 2.10: Data Bantuan Warga Miskin Ekstrem Kabupaten Situbondo per Kecamatan Tahun 2022

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN EKSTREM (Jiwa)	JUMLAH KEPALA KELUARGA MISKIN EKSTREM (KK)	PENERIMA PKH (KK)	PENERIMA BPNT (KK)	PENERIMA SEMBAKO (BPNT PERLUASAN) (KK)	PENERIMA BPUM (KK)	PENERIMA BST (KK)	KK TERCATAT BELUM TERIMA BANTUAN APAPUN	% KK TERCATAT BELUM TERIMA BANTUAN APAPUN
BANYUGLUGUR	383	160	72	109	93	3	115	87	54,38
JATIBANTENG	287	109	34	77	61	6	78	68	62,39
SUMBERMALANG	699	276	119	144	129	9	165	208	75,36
BESUKI	607	232	94	166	136	14	189	113	48,71
SUBOH	394	138	69	95	88	11	98	90	65,22
MLANDINGAN	421	167	76	137	111	23	156	83	49,70
BUNGATAN	411	167	81	114	103	6	133	94	56,29
KENDIT	63	37	15	22	21	1	24	17	45,95
PANARUKAN	149	60	21	39	31	11	40	29	48,33
SITUBONDO	107	36	21	29	22	3	29	20	55,56
PANJI	218	93	38	65	49	4	67	44	47,31
MANGARAN	284	118	39	58	49	17	75	73	61,86
KAPONGAN	198	95	27	47	38	4	58	55	57,89
ARJASA	1047	366	143	181	156	23	227	265	72,40
JANGKAR	205	110	38	64	55	3	88	57	51,82
ASEMBAGUS	96	51	21	34	30	4	37	27	52,94
BANYUPUTIH	442	144	30	46	37	17	83	115	79,86
TOTAL	6011	2359	938	1427	1209	159	1662	1445	

2.2 HASIL EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUNAN PADA TAHUN SEBELUMNYA

2.2.1 Hasil Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan

A. Tingkat Pengangguran Terbuka

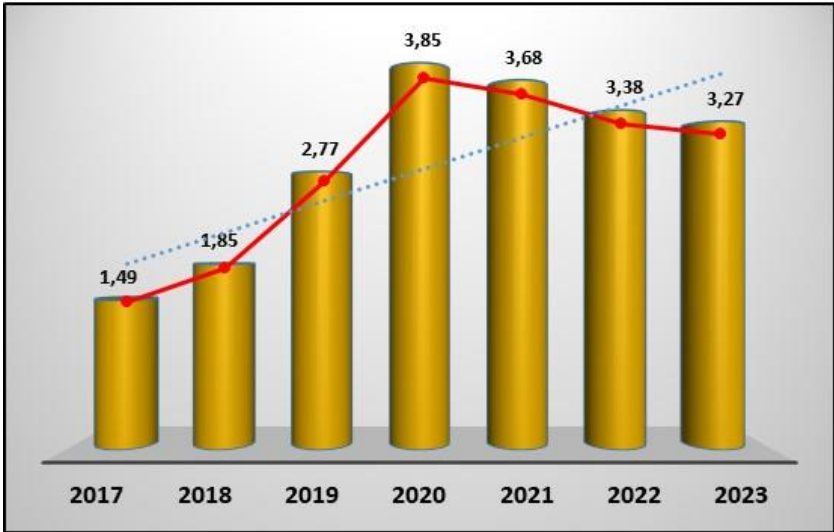
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Pengukuran indikator Tingkat Pengangguran Terbuka ini dipergunakan sebagai acuan pemerintah dalam membuka lapangan kerja baru dan dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun serta sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian.

Adapun perkembangan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Situbondo maupun Provinsi Jawa Timur dapat digambarkan pada Grafik berikut :

Tabel 2.11 : Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

TAHUN	PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)	
	(%)	Pertumbuhan (%)
2018	1,85	24,16
2019	2,77	49,73
2020	3,85	38,99
2021	3,68	-4,42
2022	3,38	-8,15
2023	3,27	-3,25
RATA-RATA	2,90	16,18

Sumber : <https://jatim.bps.go.id/indicator/6/54/3/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota.html>.
diakses : 24 Nov 2023, 11:08 WIB

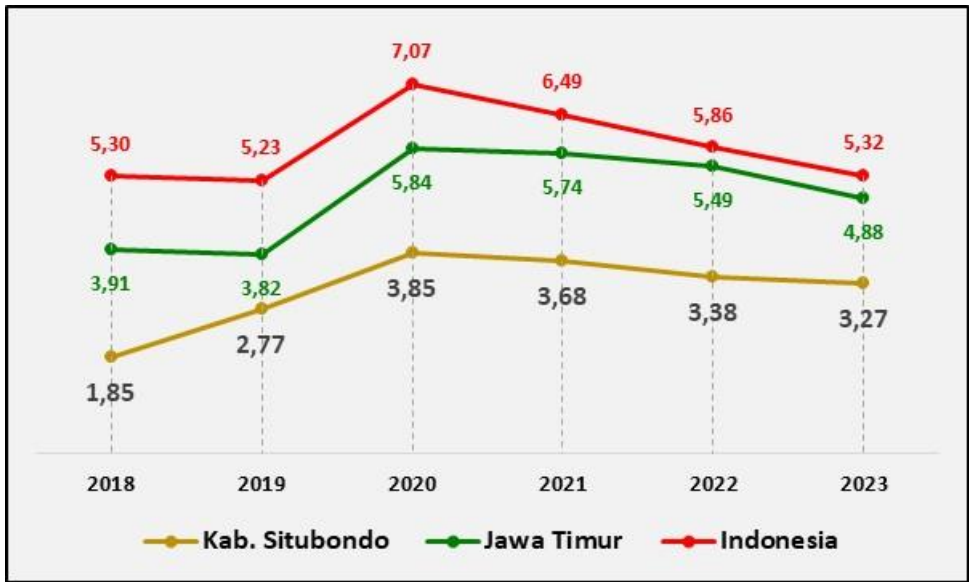


Gambar 2.17 Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023

Capaian TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Kabupaten Situbondo pada tahun 2018 sebesar 1,85%, tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,92% menjadi 2,77%, Pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan yang cukup drastis sebesar 2,36% menjadi 3,85%. Kenaikan TPT tahun 2020 ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak tenaga kerja yang dirumahkan hingga PHK.

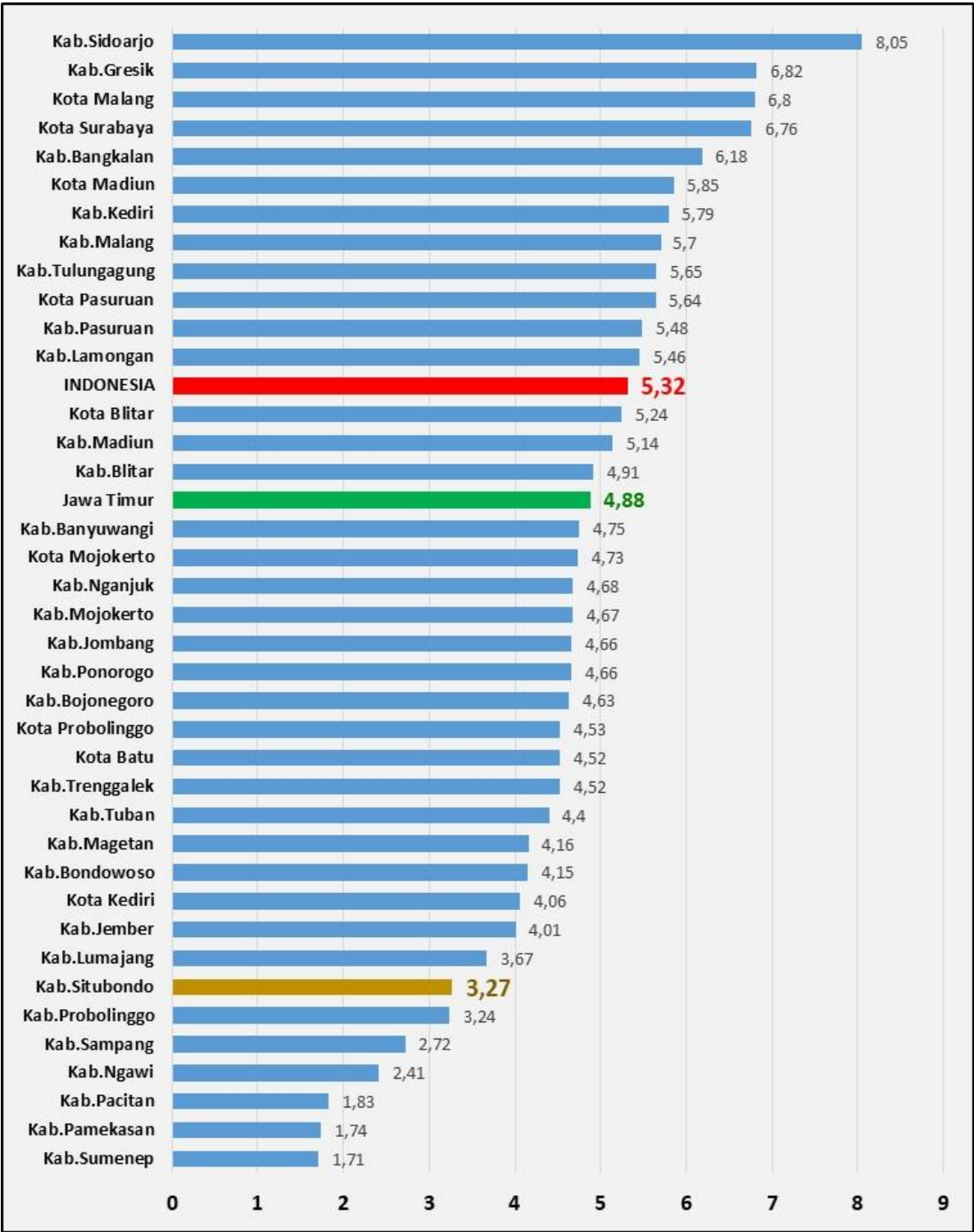
TPT di Kabupaten Situbondo dalam periode 2018 – 2023 cenderung mengalami trend kenaikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,18%/tahun, tertinggi terjadi pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 tercatat sebesar 3,27%.

Angka TPT di Kabupaten Situbondo tahun 2018-2023, apabila dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur dan Nasional, berada di bawah angka TPT Provinsi Jawa Timur dan Nasional.



Gambar 2.18 Grafik Posisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023 dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Posisi angka relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo Tahun 2023 diantara TPT Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur berada pada urutan ke 7 (tujuh) terkecil, sehingga relatif tidak mengkhawatirkan, seiring dengan berakhirnya masa pandemi Covid 19.



Gambar 2.19 Grafik Perbandingan Posisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo Tahun 2023 dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

2.2.2 Hasil Evaluasi Bidang Kesehatan

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari indikator-indikator yang digunakan antara lain Angka Harapan Hidup (AHH), Indeks Keluarga Sehat (IKS), dan Prevalensi Balita Stunting.

Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan apakah suatu negara, dalam tataran lebih luas atau provinsi dan kabupaten/kota dalam tataran daerah memiliki tingkat kesehatan masyarakat yang baik atau tidak. Indikator yang umum dipakai adalah: Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI), dan lain-lain.

A. Angka Harapan Hidup (AHH)

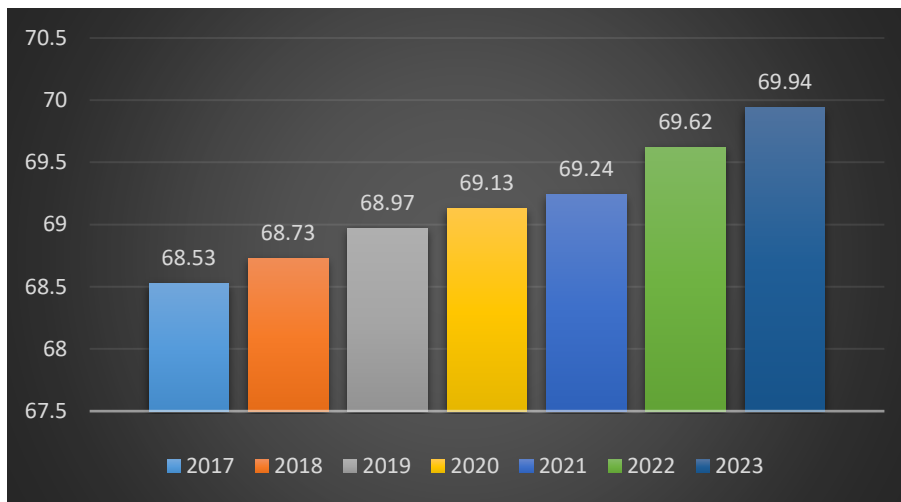
Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun seseorang dapat hidup sejak lahir, dan juga merupakan matriks untuk menilai kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup juga merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tingkat kesehatan penduduk di Kabupaten Situbondo secara umum masih cenderung baik. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Situbondo dalam periode tahun 2017-2023 rata-rata sebesar 69,16 tahun, dan memiliki kecenderungan naik setiap tahunnya, dengan laju pertumbuhan sebesar 0,32.

Tabel 2.12 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2023

TAHUN	ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)	
	(tahun)	Pertumbuhan (%)
2017	68,53	
2018	68,73	0,29
2019	68,97	0,35
2020	69,13	0,23
2021	69,24	0,16
2022	69,62	0,55
2023	69,94	0,32
RATA-RATA	69,16	0,32

Sumber : <https://jatim.bps.go.id/indicator/26/29/3/angka-harapan-hidup.html>.
diakses : 24 Nov 2023, 11:54 WIB



Gambar 2.20 Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2023

Posisi Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Situbondo masih rendah atau berada di bawah AHH regional Jawa Timur, pada tahun 2023 berada pada urutan ke 12 (dua belas) diantara 38 Kab./Kota di Jawa Timur.

B. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

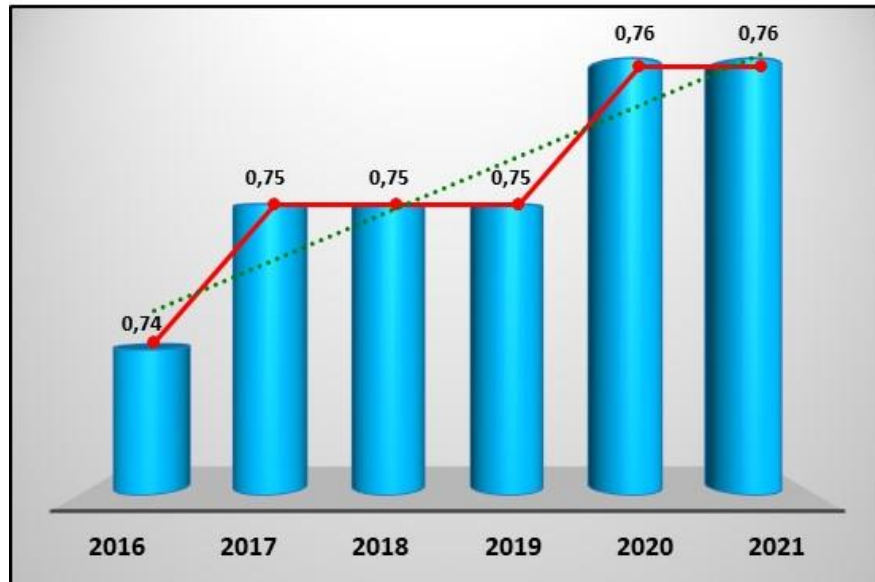
Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan indikator keluarga sehat dari setiap keluarga. Indikator tersebut dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Keduabelas indikator tersebut mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan, yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat.

Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8 (Kementrian Kesehatan RI, 2016). Capaian IKS masih tergolong rendah untuk beberapa daerah di Indonesia, hasil perhitungan IKS dari 9 provinsi sasaran awal yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sulawesi Selatan per 8 Juni 2017 didapatkan keluarga yang memiliki IKS di atas 0,8 sebesar 0,163 dari 570.326 keluarga (Pusdatin, 2018).

IKS adalah Indeks Keluarga Sehat yang perhitungannya diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi menjadi 3, yaitu :

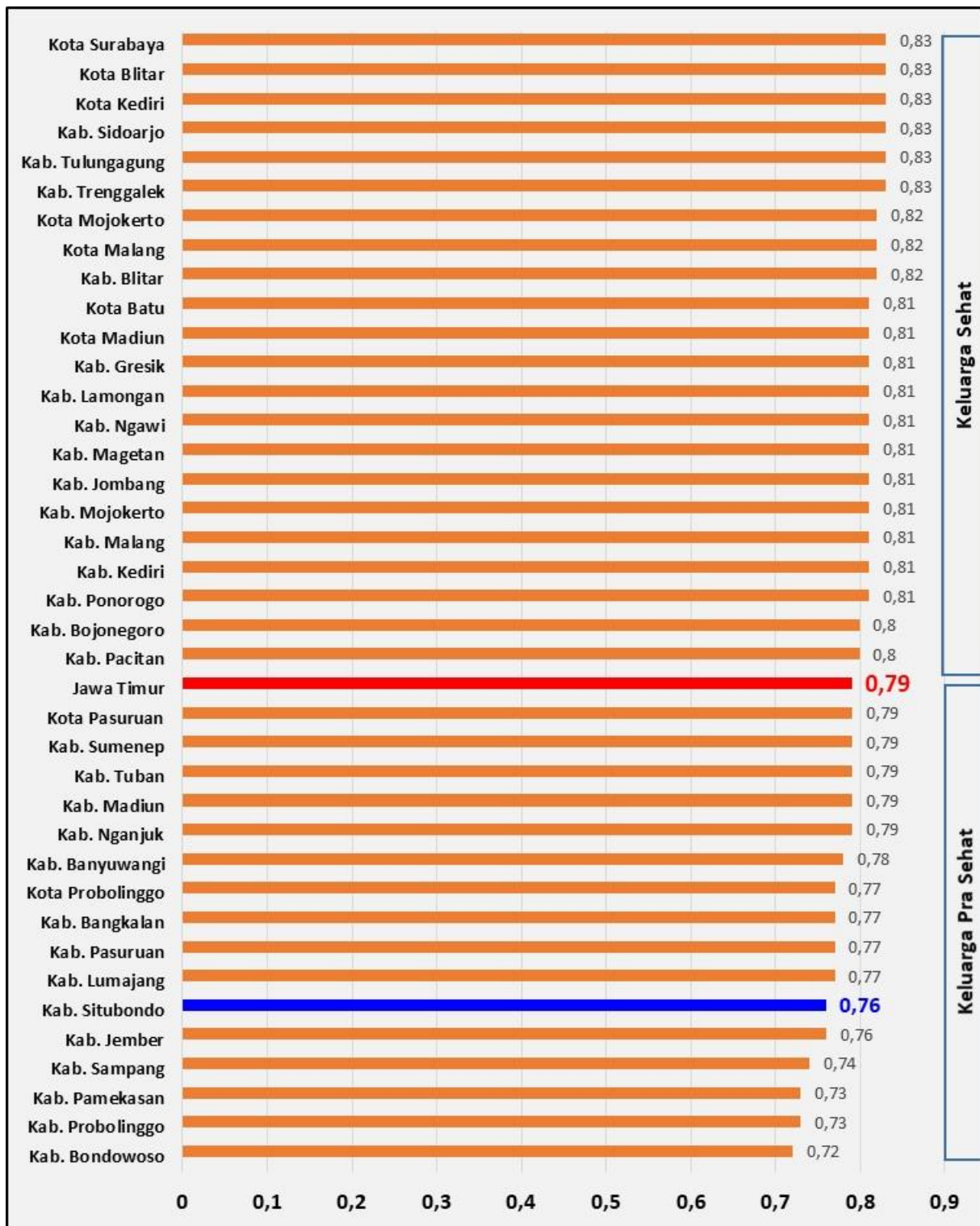
1. Keluarga Sehat, bila IKS > 0,800;
2. Keluarga Pra Sehat, bila IKS = 0,500-0,800;
3. Keluarga Tidak Sehat, bila IKS < 0,500

Kondisi IKS di Kabupaten Situbondo tercatat dalam periode tahun 2016-2021 berada pada angka 0,74 pada tahun 2016, dan cenderung mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 0,76, sehingga dapat dikategorikan pada Keluarga Pra Sehat.



Gambar 2.23 Grafik Perkembangan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Situbondo Tahun 2016- 2021

Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Situbondo tahun 2021 sebesar 0,76 tersebut, secara regional berada dalam urutan 6 (enam) diantara 38 Kab./Kota di provinsi Jawa Timur, bersama Kabupaten Jember, Sampang, Pamekasan, Probolinggo, dan Bondowoso, meskipun masih berada di bawah Indeks Keluarga Sehat (IKS) Provinsi Jawa Timur sebesar 0,79.



Gambar 2.24 Grafik Posisi Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Situbondo Tahun 2021

Berdasarkan uraian pengertian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di atas, terdapat korelasi positif antara IKS dan AHH, antara lain :

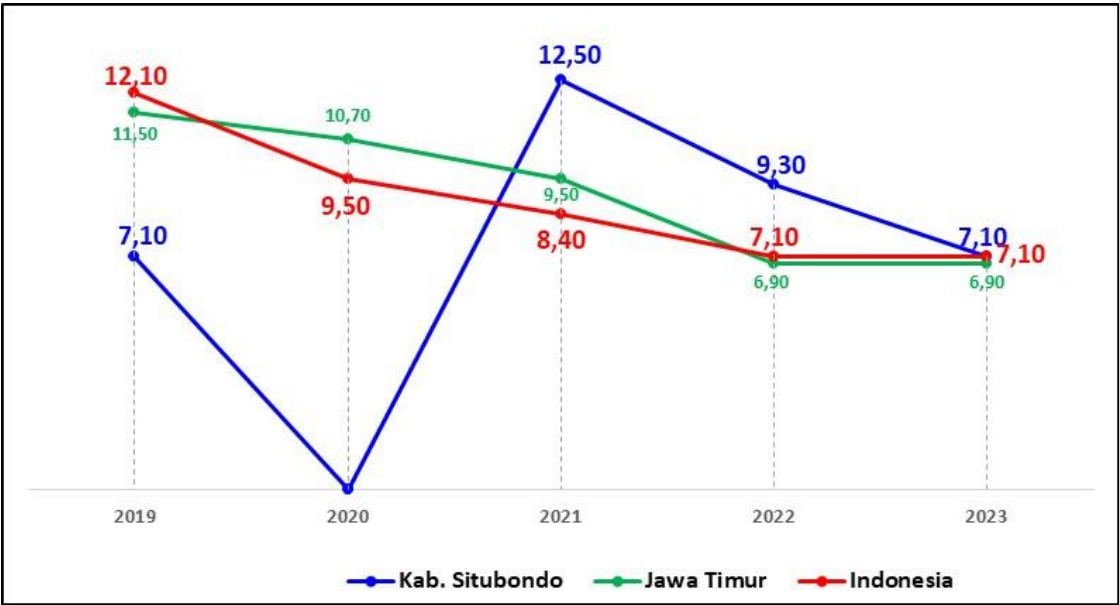
1. IKS mencakup indikator yang mempengaruhi kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan keluarga. Dengan meningkatkan kualitas hidup dan praktik hidup sehat di keluarga, maka kesehatan individu dan keluarga secara keseluruhan juga meningkat. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya AHH;
2. Indikator IKS yang mencakup lingkup dan akses hidup sehat, seperti akses air bersih dan sanitasi yang layak, dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit menular dan tidak menular. Dengan mengurangi resiko penyakit tersebut, maka akan berdampak pada meningkatnya AHH;

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 (dua) tahun.

Dampak dari stunting bukan hanya terhadap pertumbuhan fisik, tetapi juga pada fungsi penting tubuh lainnya, seperti perkembangan otak dan sistem kekebalan tubuh. Balita stunting berpotensi memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, lebih rentan terhadap penyakit, dan di masa depan dapat berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu program prioritas nasional. Data stunting yang ada berupa Prevalensi. Prevalensi adalah proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu. Data prevalensi stunting yang terkait dengan kabupaten Situbondo dari Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut.

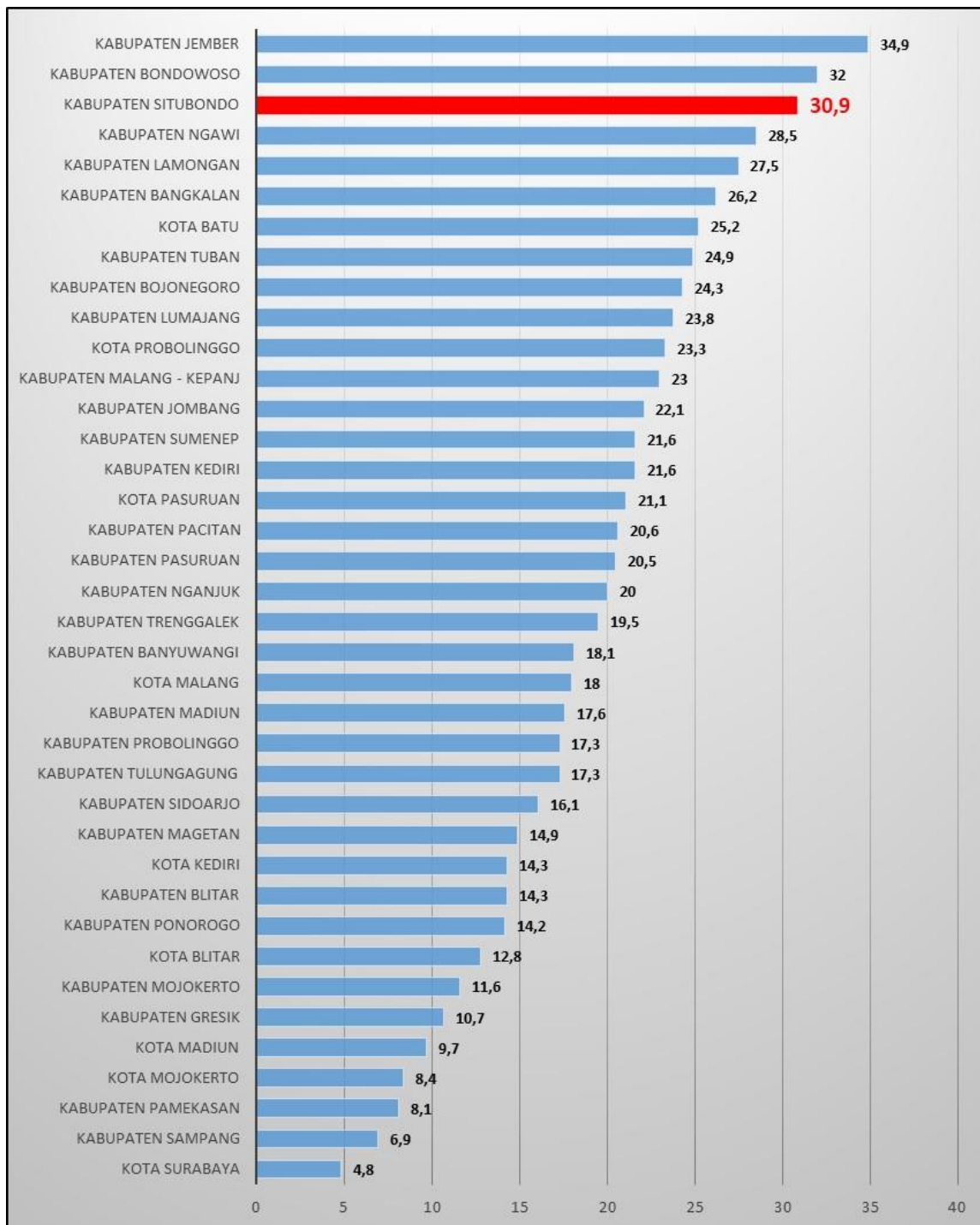
WILAYAH	TAHUN - PREVALENSI STUNTING (%)					RATA-RATA
	2019	2020	2021	2022	2023	
Kab. Situbondo	7,1	0	12,5	9,3	7,1	7,20
<i>pertumbuhan</i>		- 100,00		- 25,60		- 62,80
Jawa Timur	11,50	10,70	9,50	6,90	6,90	9,10
<i>pertumbuhan</i>		-6,96	-11,21	- 27,37	0,00	- 11,38
Indonesia	12,1	9,5	8,4	7,1	7,1	8,84
<i>pertumbuhan</i>		-21,49	-11,58	- 15,48	0,00	- 12,14

Sumber : Ditjen Bangda Kemendagri,
<https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev/index/5>, diakses : 14 November
 2013, 11:45 WIB.



Gambar 2.25 Grafik Posisi Prevalensi Stunting Kabupaten Situbondo Tahun 2018 – 2022

Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Situbondo sangat fluktuatif pada tahun 2019-2020, dan berada diatas angka stunting regional Jawa Timur dan nasional. Meskipun demikian terjadi kecenderungan mulai menurun sejak tahun 2021. Sedangkan posisi prevalensi balita stunting di Kabupaten Situbondo pada tahun 2022 masih sangat tinggi secara regional provinsi Jawa Timur berada di tiga besar (peringkat 36) bersama dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember.



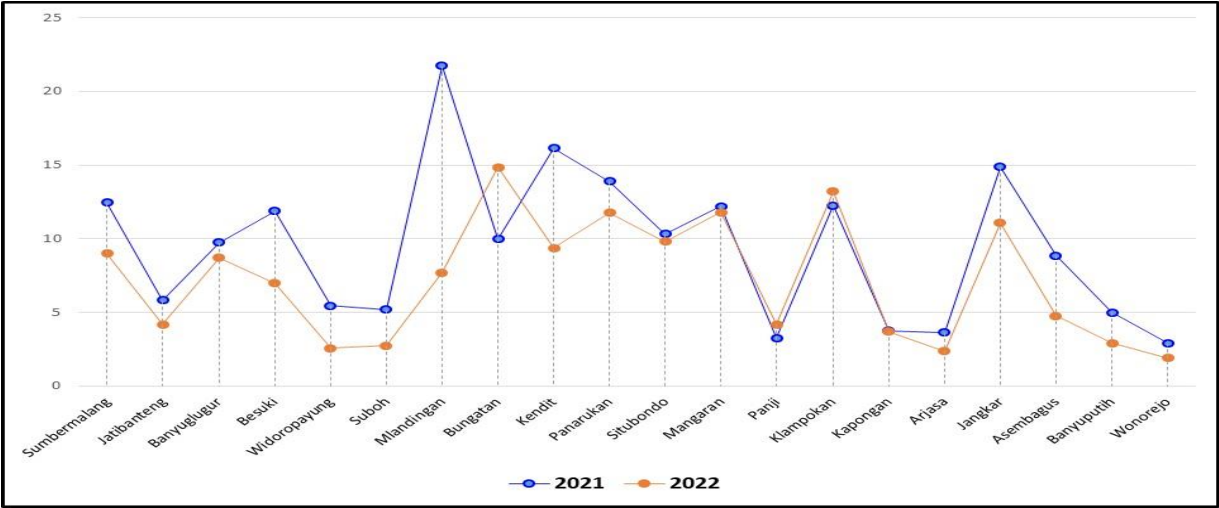
Gambar 2.24 Grafik Posisi Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Situbondo Tahun 2022 di Provinsi Jawa Timur

Kondisi prevalensi Stunting dari hasil pemantauan di beberapa Puskesmas berdasarkan bulan timbang Agustus 2021 s.d Agustus 2023 di Kabupaten Situbondo sebagian besar mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2023. Namun untuk jumlah Desa dan kecamatan sebagai Lokus Stunting dari tahun 2021 ke tahun 2023 mengalami peningkatan. Tahun 2021 terdapat 15 desa dan 13 kecamatan, sedangkan tahun 2022 menurun menjadi 10 desa dan 5 kecamatan, namun tahun 2023 meningkat menjadi 20 desa dan 10 kecamatan.

Tabel 2.14 : Hasil Pemantauan Prevalensi Stunting di Beberapa Puskesmas di Kabupaten Situbondo Tahun 2021 - 2022

PUSKESMAS KECAMATAN		TAHUN		+/-
		2021	2022	
1	Sumbermalang	12,46	8,98	3,48
2	Jatibanteng	5,81	4,17	1,64
3	Banyuglugur	9,74	8,69	1,05
4	Besuki	11,88	6,97	4,91
	Widoropayung	5,45	2,56	2,89
5	Suboh	5,19	2,74	2,45
6	Mlandingan	21,75	7,7	14,05
7	Bungatan	9,97	14,85	-4,88
8	Kendit	16,14	9,38	6,76
9	Panarukan	13,89	11,76	2,13
10	Situbondo	10,31	9,79	0,52
11	Mangaran	12,2	11,78	0,42
12	Panji	3,24	4,18	-0,94
	Klampokan	12,24	13,2	-0,96
13	Kapongan	3,74	3,7	0,04
14	Arjasa	3,64	2,37	1,27
15	Jangkar	14,87	11,07	3,8
16	Asembagus	8,85	4,75	4,1
17	Banyuputih	4,99	2,92	2,07
	Wonorejo	2,92	1,91	1,01
KABUPATEN		9,28	7,08	2,2

Sumber : Sibesti, <https://sibesti.situbondokab.go.id/stunting>, diakses : 14 November 2023, 19:00 WIB.



Gambar 2.27 Hasil Pemantauan Prevalensi Stunting di Beberapa Puskesmas di Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2022

Tabel dan gambar tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan penurunan angka prevalensi stunting dari tahun 2021 ke tahun 2022, meskipun di beberapa kecamatan terdapat peningkatan, seperti Kecamatan Bungatan dan kecamatan Panji. Penurunan yang sangat drastis terjadi di Kecamatan Mlandingan, Kendit, Besuki dan Asembagus.

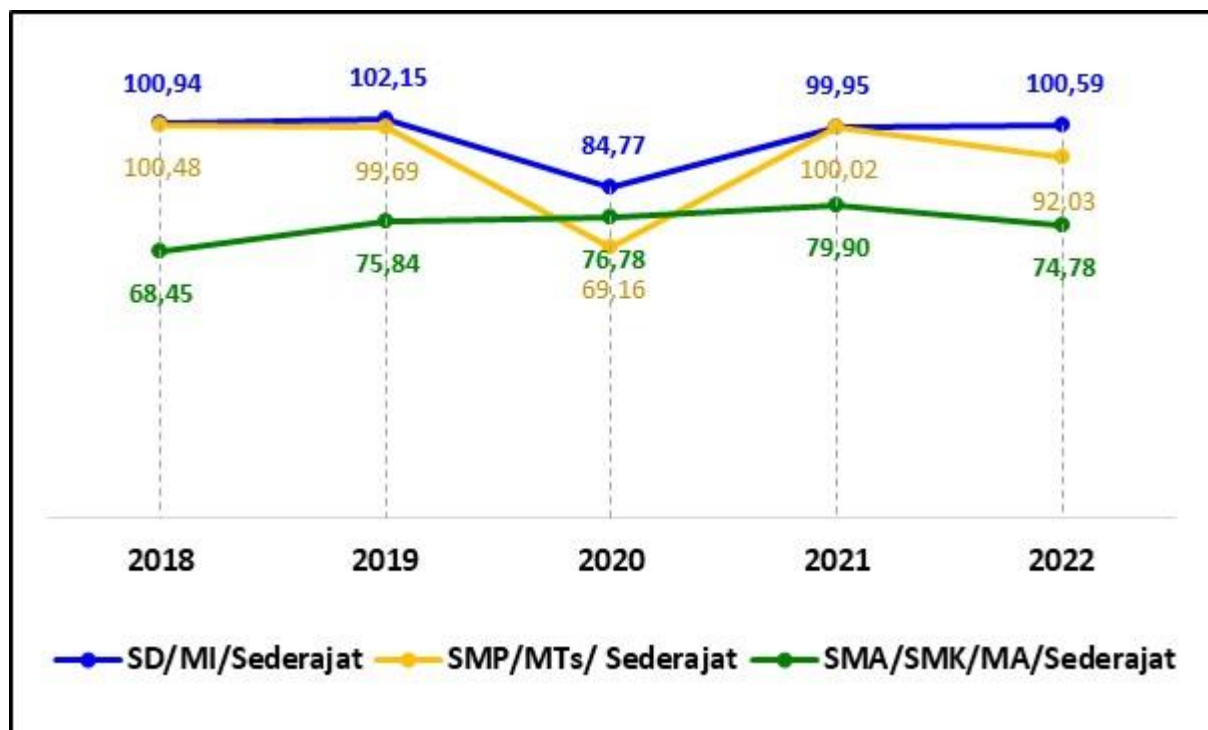
2.2.3 Hasil Evaluasi Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas Pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) juga merupakan salah satu indikator tercapainya pembangunan dalam bidang pendidikan di suatu wilayah.

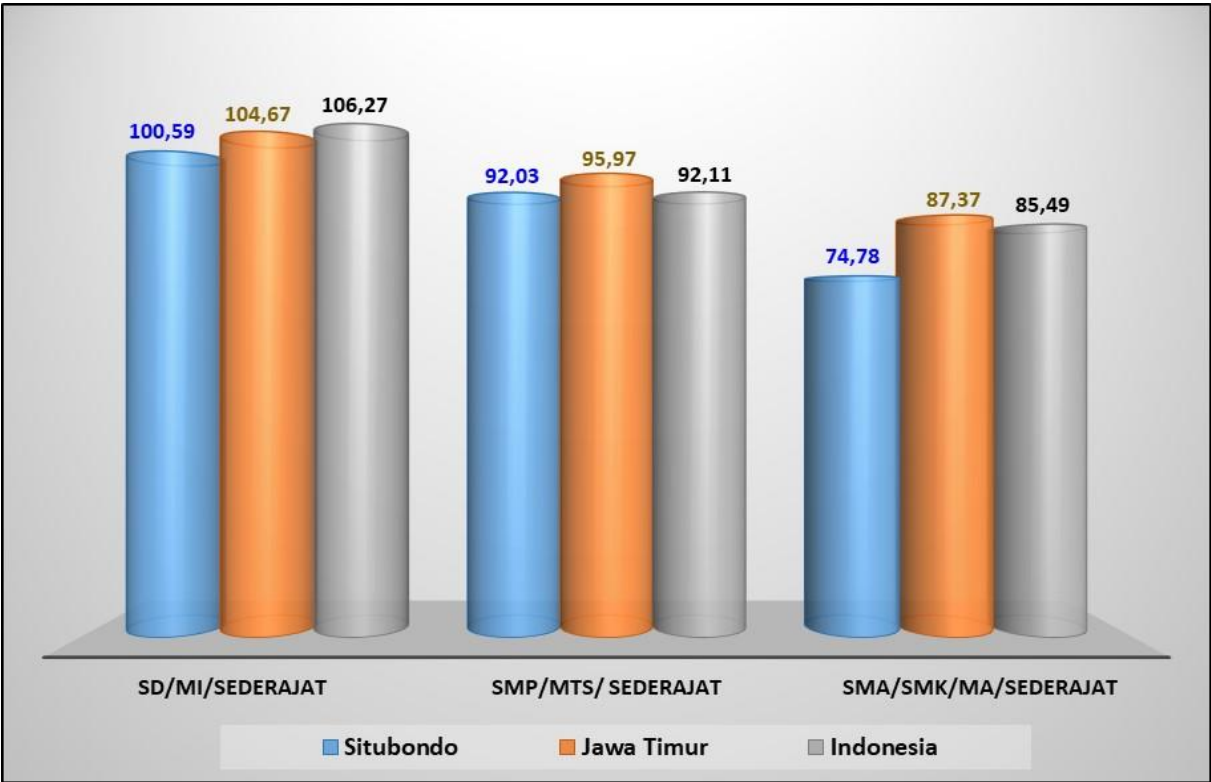
A. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Kondisi APK di Kabupaten Situbondo dalam periode tahun 2018-2022 berdasarkan data Kabupaten Situbondo Dalam Angka cenderung mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2020, pada saat pandemi Covid 19, terjadi penurunan pada jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/ Sederajat, sedangkan untuk SMA/SMK/MA/Sederajat mengalami kenaikan.



Gambar 2.28 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Situbondo Tahun 2018 – 2022

Sedangkan kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) pada masing-masing Lembaga Pendidikan antara lokal Kabupaten Situbondo, regional provinsi Jawa Timur, dan nasional Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa angka APK Kabupaten Situbondo masih berada dibawah angka APK regional dan nasional.

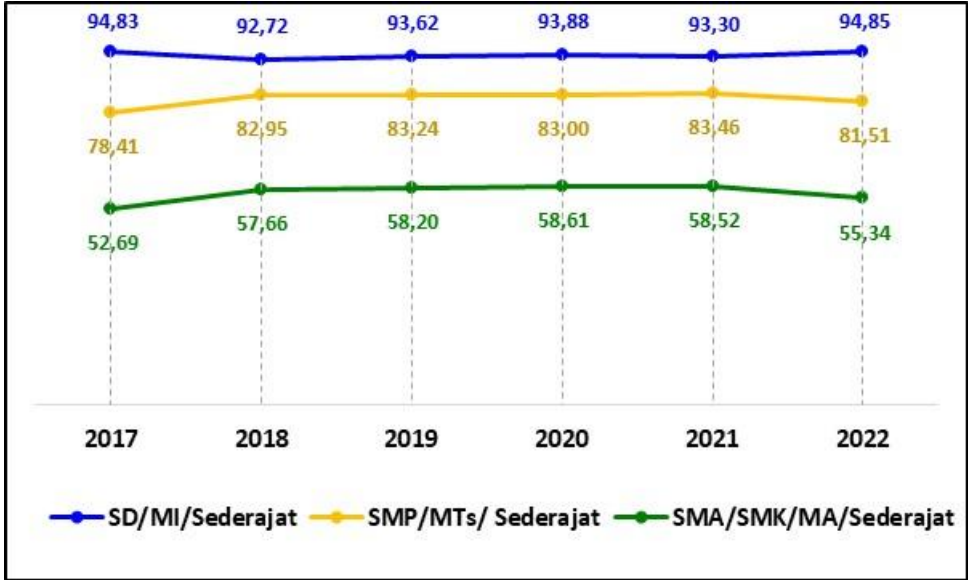


Gambar 2.29 Grafik Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2022 Antara Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Indonesia

B. Angka Partisipasi Murni SMA/MA

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah dibanding APK karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama.

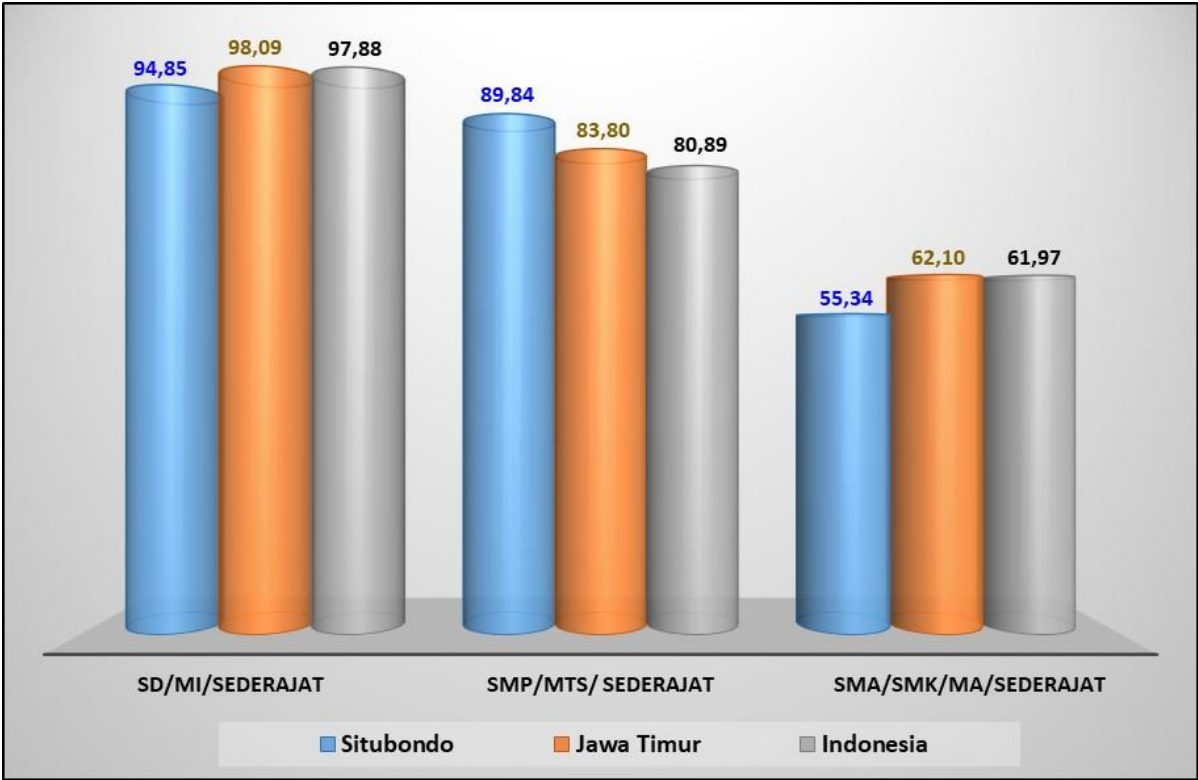
Kondisi APM di Kabupaten Situbondo dalam periode tahun 2018-2022 berdasarkan data Kabupaten Situbondo Dalam Angka cenderung mengalami kenaikan, namun pada tahun 2023, terjadi penurunan pada jenjang pendidikan SMP/MTs/ Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat, hanya SD/MI/Sederajat yang mengalami kenaikan.



Gambar 2.30 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Situbondo Tahun 2018 – 2022

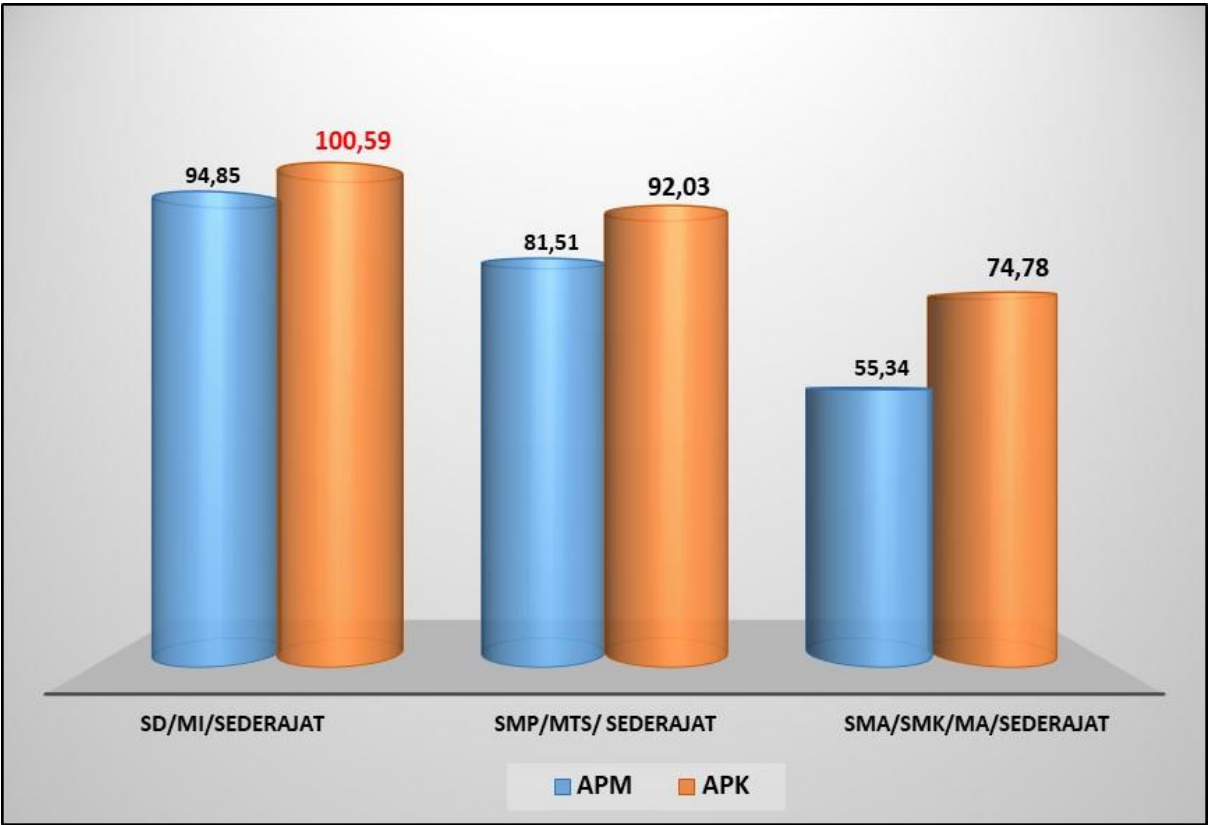
Sedangkan kondisi Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-masing Lembaga Pendidikan antara lokal Kabupaten Situbondo, regional

provinsi Jawa Timur, dan nasional Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa angka APK Kabupaten Situbondo masih berada dibawah angka APK regional dan nasional,kecuali untuk SMP/MTs/ Sederajat, posisi APM Kabupaten Situbondo lebih tinggi dari APM regional provinsi Jawa Timur dan nasional. Sedangkan dari sisi lembaga pendidikan terlihat bahwa APM untuk SMA/SMK/MA/Sederajat lebih rendah dari pada APM SMP/MTs/ Sederajat dan SD/MI/Sederajat.



Gambar 2.31 Grafik Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2022 Antara Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Indonesia

Sedangkan untuk perbandingan antara APK dan APM di Kabupaten Situbondo Tahun 2022, posisi APM masih berada di bawah APK, jarak yang cukup besar terjadi pada lembaga pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat sebesar 19,44.

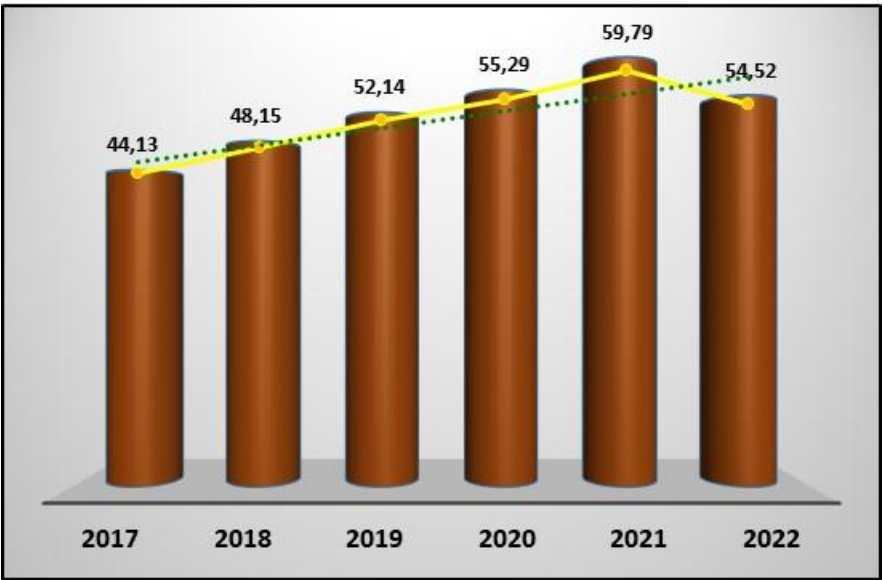


Gambar 2.32 Grafik Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Situbondo Tahun 2022

2.2.4 Hasil Evaluasi Bidang Infrastruktur Dasar

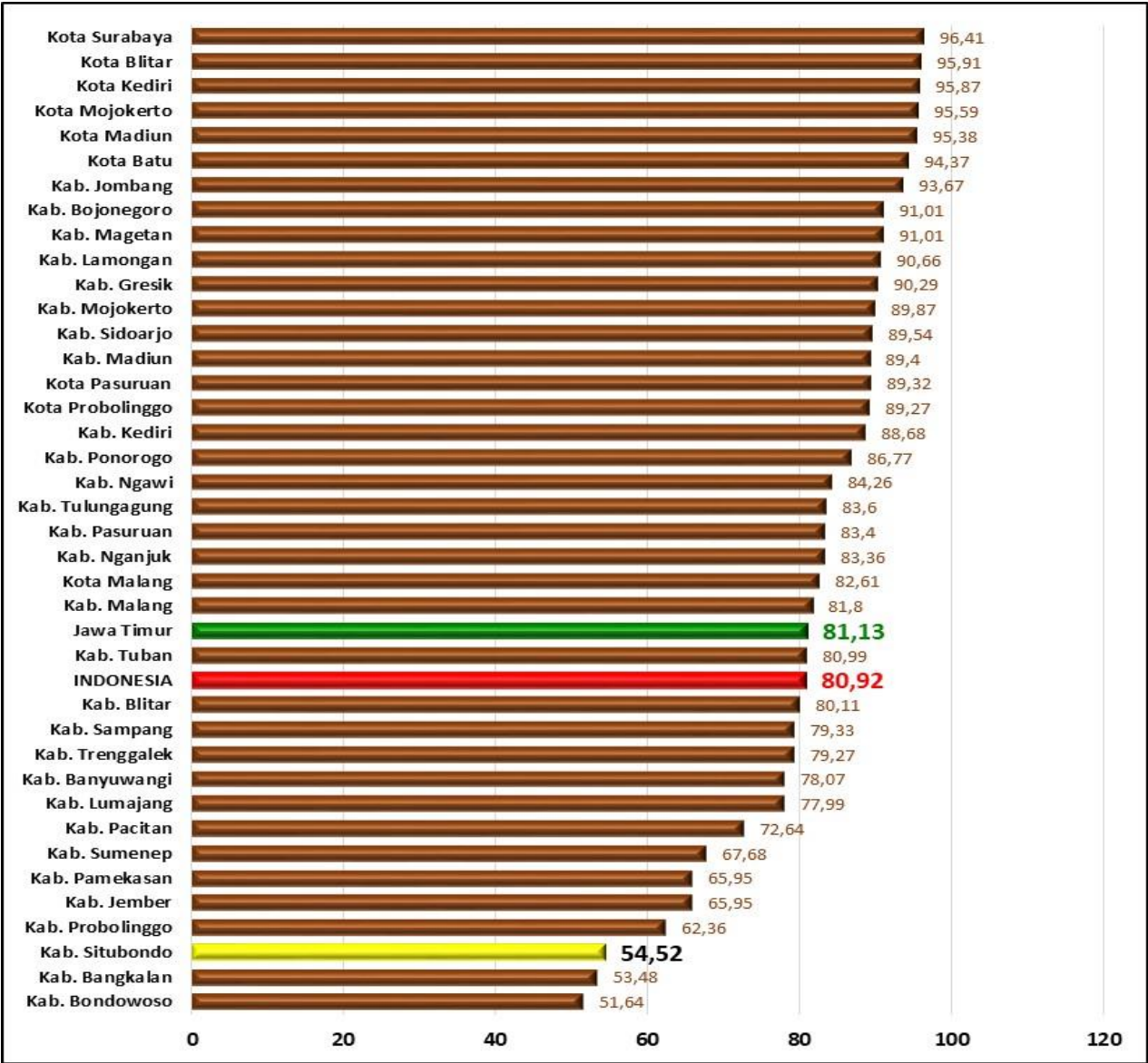
A. Rumah Tangga memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat. Akses sanitasi layak termasuk dalam strategi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur perkotaan, dengan target sasaran RPJMN 2020 – 2024 sebesar 90% hunian dengan akses sanitasi layak, dan yang termasuk akses aman sebesar 15%. Kondisi akses sanitasi layak di Kabupaten Situbondo dalam periode 2017-2022 rata-rata sebesar 52,34% 4,55%/tahun.



Gambar 2.33 Grafik Perkembangan Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Situbondo Tahun 2017 - 2022

Sedangkan posisi persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Kabupaten Situbondo pada tahun 2022 sebesar 54,52% dan berada pada urutan ke 3 (tiga) terendah diantara Kabupaten/Kota lainnya dalam regional Jawa Timur, dan juga masih berada di bawah presentase regional Jawa Timur (81,13%) dan nasional (80,92%).



Gambar 2.34 Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Situbondo Tahun 2022 diantara Kabupaten/Kota di Regional Jawa Timur



Gambar 2.35 Grafik Perkembangan Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Situbondo Tahun 2017 - 2022 diantara Regional Jawa Timur dan Nasional

2.3 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022

Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo disusun ke dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2022-2026 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan yang diintegrasikan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mana dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) dilakukan melalui tiga strategi utama yaitu (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat, (2) peningkatan pendapatan masyarakat, dan (3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Program prioritas Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 dalam penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

Tabel 2.15 Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2022

Birulah (Bikin Rumah Layak Huni)	Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (ODF)
Sehati (Situbondo Sehat Gratis)	Program Penyediaan Air Minum
Bantuan Modal Usaha bagi Pengusaha Mikro	Bantuan Sembako untuk Masyarakat Miskin terdampak Covid-19
Beasiswa Situbondo Cerdas dan Sharing BPDGS	Program Totop Lobang (Tolob)
Insentif Guru Ngaji/Guru Minggu, Kader Posyandu, RT	Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
BLT dan Bantuan Pangan Kepada Masyarakat Miskin	Pupuk Gratis kepada Petani Kecil
Ramadhan Bersama Rakyat (RBR)	Pengembangan Benih Padi BK Situbondo 01 dan 02 Agritan
DID dan BKK Desa	Penerangan Jalan Umum (PJU)

Adapun berbagai program penanguangan kemiskinan melalui kolaborasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16 : Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2022

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
1	Program Pengelolaan pendidikan			√	Penambahan Ruang Kelas Baru	DAU dan DAK	368.723.000	359.284.581	97,44%	2 SD/MI	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Tidak ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				√	Pengembangan Sarana dan Prasarana dan utilitas sekolah	DAU, DAK, SILPA DID dan SILPA DAK	1.777.883.000	1.766.536.598	99,36%	23 SD/MI	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Tidak ada	
				√	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas	DAU, DAK, SILPA DID dan SILPA DAK	9.620.364.000	9.440.968.188	98,14%	44 SD Negeri	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Tidak ada	
		√			Rehabilitasi sedang/ berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	DAU, DAK, SILPA DID dan SILPA DAK	245.023.000	243.117.949	99,22%	8 SD Negeri	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Tidak ada	
				√	Pengadaan Perlengkapan Siswa (utk Siswa SD)	DAU	99.565.400	89.193.495	89,58%	2 SD Negeri	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Tidak ada	
				√	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	SIPLA DID	260.000.000	258.551.242	99,44%	2 SD Negeri	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Tidak ada	
				√	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	DAU dan DAK	747.858.000	730.491.334	97,68%	4 SD Negeri	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Tidak ada	
				√	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	DAU dan SILPA DID	360.986.500	359.429.310	99,57%	5 SD Negeri	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				√	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	DAK	239.144.000	238.323.792	99,66%	2 SD Negeri	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Tidak ada	
				√	Pengadaan Mebel Sekolah	DAU	50.000.000	49.450.500	98,90%	1 SD Negeri	1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Mei	Tidak ada	
				√	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	DAU	99.565.400	89.193.495	89,58%	2 SD Negeri	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Mei	Tidak ada	
		√			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	DAK dan SILPA DID	4.264.408.500	4.199.610.000	98,48%	37 SD	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Mei	Tidak ada	
		√			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DAU	90.000.000	88.166.870	97,96%	Siswa	Masing-masing siswa bervariasi sesuai dengan tingkat juaranya masing-masing	Dilaksanakan pada Bulan Mei	Tidak ada	
		√			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	BOS Pusat	230.875.890	216.893.400	93,94%	Lembaga SD dan SMP	Masing-masing lembaga tidak sama sesuai dengan jumlah siswa yang dimiliki	Dilaksanakan pada Bulan April, Juli dan Oktober	Tidak ada	
				√	Penambahan Ruang Kelas Baru	DAU dan DAK	1.320.244.000	1.207.835.387	91,49%	2 SMP/MTs	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				√	Pengembangan Sarana dan Prasarana dan utilitas sekolah	DAU, DAK dan SILPA BK Provinsi	1.268.954.000	1.210.919.260	95,43%	8 SMP/MTs	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Tidak ada	
				√	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah	DAU	100.000.000	99.612.424	99,61%	1 SMP	1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Tidak ada	
				√	Rehabilitasi sedang/ berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	DAK	24.897.000	24.742.884	99,38%	1 SMP	1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Tidak ada	
		√			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	BOS Pusat	39.835.271.591	38.071.619.275	95,57%	Lembaga SD	Masing-masing sekolah bervariasi sesuai dengan jumlah siswa	Dilaksanakan pada Bulan Maret, Juli dan September	Tidak ada	
		√			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	DAU dan BK Provinsi	10.727.338.240	10.661.492.975	99,39%	Lembaga SD, SMP swasta dan MADIN	Masing-masing sekolah bervariasi sesuai dengan jumlah siswa	Dilaksanakan pada Bulan Desember	Tidak ada	
		√			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	BOS Pusat	17.023.611.900	15.842.622.613	93,06%	Lembaga SD	Masing-masing sekolah bervariasi sesuai dengan jumlah siswa	Dilaksanakan pada Bulan Maret, Juli dan September	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				√	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	DAK	507.783.000	475.057.141	93,56%	1 SMP	1 Paket	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Tidak ada	
				√	Pengadaan Mebel Sekolah	SILPA DID	46.695.000	46.000.065	98,51%	1 SMP	1 Paket	Dilaksanakan pada Bulan Mei	Tidak ada	
				√	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	DAU	149.950.900	149.683.500	99,82%	1 SMP	1 Paket	Dilaksanakan pada Bulan Mei	Tidak ada	
		√			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	SILPA DID dan DAK	944.910.000	892.920.000	94,50%	13 SMP	Masing-masing lembaga 1 Paket	Dilaksanakan pada Bulan Mei	Tidak ada	
				√	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	DAU	4.033.837.357	3.551.955.147	88,05%	Lembaga SMP	Masing peserta mendapatkan bantuan transport @.50,000	Dilaksanakan pada Bulan April	Tidak ada	
		√			Pengelolaan Dana BOP PAUD	BOP Pusat	13.163.400.000	13.112.400.000	99,61%	Lembaga PAUD	Masing-masing lembaga bervariasi sesuai dengan jumlah siswa	Dilaksanakan pada Bulan Maret, Juli dan September	Tidak ada	
				√	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	DAU dan DAK	2.948.279.000	2.782.555.547	94,38%	17 TK/SPS	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Tidak ada	
				√	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	DAU dan DAK	1.622.280.000	1.509.278.869	93,03%	4 TK/SPS	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				√	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	SILP BK dan DAU	250.000.000	249.128.524	99,65%	14 TK/KB	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Tidak ada	
				√	Pengadaan Perlengkapan PAUD	DAU	50.242.500	50.116.500	99,75%	4 TK/KB	1 paket	Dilaksanakan pada Bulan April	Tidak ada	
		√			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	DAK dan DAU	360.000.000	351.059.700	97,52%	12 TK/KB	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan April	Tidak ada	
		√			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	DAU	95.258.730	64.158.050	67,35%	Lembaga PAUD	Masing-masing lembaga tidak sama sesuai dengan jumlah siswa yang dimiliki	Dilaksanakan pada Bulan Maret, Juli dan September	Tidak ada	
				√	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan	DAU	640.000.000	632.798.607	98,87%	4 Lembaga	Masing-masing lembaga tidak sama sesuai dengan jumlah siswa yang dimiliki	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Tidak ada	
				√	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	DAU dan DAK	1.475.687.000	1.341.097.566	90,88%	7 Lembaga	Masing-masing lembaga tidak sama sesuai dengan jumlah siswa yang dimiliki	Dilaksanakan pada Bulan Juli	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				√	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	DAU	112.472.000	72.205.500	64,20%	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Situbondo	1 Paket	Dilaksanakan pada Bulan Mei	Tidak ada	
		√			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	DAK	100.000.000	99.394.000	99,39%	SKB Situbondo	1 Paket	Dilaksanakan pada Bulan Mei	Tidak ada	
				√	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	DAU	154.484.118	128.470.020	83,16%	Lembaga PKBM	1 Paket	Dilaksanakan pada Bulan Maret, Juli dan September	Tidak ada	
		√			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan	Pajak Rokok	2.952.284.972	2.685.819.804	90,97%	Mahasiswa	Masing-masing mahasiswa tidak sama sesuai dengan besaran UKT	Dilaksanakan pada Bulan Mei dan September	Tidak ada	
		√			Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/ Kesetaraan	DAU	2.343.294.985	2.285.142.995	97,52%	Warga Belajar	Masing-masing warga belajar tidak sama sesuai dengan jenjangnya	Dilaksanakan pada Bulan Juni dan Oktober	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		√			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	BOP Pusat	735.900.000	724.278.000	98,42%	Lembaga PKBM	Masing-masing lembaga PKBM tidak sama sesuai dengan jumlah PD nya	Dilaksanakan pada Bulan Maret, Juli dan September	Tidak ada	
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional		√		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Dana Alokasi Umum, BKK dari Pemerintah Provinsi	389.979.418	323.459.600	82,94%	125 Peserta	Pembinaan kepada pelaku kesenian	Dilaksanakan Sepanjang Tahun 2022	Tidak ada	
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			√	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	4.509.635.094	4.344.442.465	96,34%	Fasilitas Kesehatan	3 Unit faskes penerima bantuan	Dilaksanakan pada Bulan April dan Mei	Tidak ada	Dinas Kesehatan

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				√	Pengembangan Puskesmas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DBH CHT	4.500.206.436	4.413.519.108	98,07%	5 Puskesmas	Pembangunan paving ruang isolasi pada puskesmas kendi, arjasa dan wonorejo. Perluasan lahan puskesmas Kapongan, dan pembangunan ruang PPI pada puskesmas jangkar	Dilaksanakan pada Bulan Februari, Juni dan September	Tidak ada	
				√	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dana Alokasi Umum, Pajak Rokok, DBH CHT	3.047.236.015	2.908.131.245	95,44%	Ponkesdes dan Pustu	Pembangunan pagar dan pavingisasi 8 unit ponkesdes dan pustu	Dilaksanakan pada Triwulan 3 dan Triwulan 4	Tidak ada	
				√	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dana Alokasi Umum, DAK Fisik - Bidang Kesehatan	215.000.000	213.134.411	99,13%	3 Puskesmas	Rehabilitasi puskesmas jatibanteng dan klampokan, serta rehab ruang rawat inap puskesmas suboh	Dilaksanakan pada Bulan Maret, Juli dan Oktober	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				√	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dana Alokasi Umum, DBH CHT	2.007.926.391	1.868.755.081	93,07%	12 Ponkesdes dan Pustu	Rehab Ponkesdes dan Pustu di beberapa kecamatan	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Tidak ada	
		√			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dana Alokasi Khusus Fisik	658.649.000	582.076.296	88,37%	3 Puskesmas di Wilayah Kabupaten Situbondo	Pembangunan IPAL di 3 Puskesmas Puskesmas	Dilaksanakan pada Bulan Mei, September dan Desember	Tidak ada	
		√			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pajak Rokok, DBH CHT, Dana Alokasi Khusus Fisik	47.268.870.885	42.119.380.836	89,11%	Fasilitas Kesehatan	Pembelian alat kesehatan untuk menunjang pelayanan pada fasilitas kesehatan	Dilaksanakan pada Bulan Maret, Juli dan Oktober	Tidak ada	
		√			Pengadaan Obat, Vaksin	Pajak Rokok, DBH CHT, Dana Alokasi Khusus Fisik	4.508.144.379	3.914.060.812	86,82%	Fasilitas Kesehatan	Pembelian obat dan vaksin sebesar 1 paket pembelian	Dilaksanakan pada Bulan April, Agustus dan November	Tidak ada	
		√			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pajak Rokok, DBH CHT, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	9.457.735.263	8.667.606.097	91,65%	Puskesmas	pengadaan 30 bahan habis pakai di beberapa puskesmas	Dilaksanakan pada Bulan April, Juli dan Oktober	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Alokasi Umum, Pajak Rokok, DAK Non Fisik	1.402.417.504	1.306.300.004	93,15%	Masyarakat dan Puskesmas	866 peserta yang mengikuti pembekalan dan 9 puskesmas dengan cakupan K4 yang memenuhi target >80%	Dilaksanakan pada Bulan April, Agustus dan November	Tidak ada	
		√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik	617.057.790	172.794.396	28,00%	Masyarakat dan Puskesmas	Klaim biaya persalinan 422 paket, peserta Diseminasi penurunan AKI dan AKB dan updating pelayanan kesehatan keluarga sejumlah 153 peserta, serta 14 puskesmas dengan cakupan persalinan yang memenuhi target 100%	Dilaksanakan pada Bulan Februari, Juni dan September	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pajak Rokok	73.823.850	59.948.220	81,20%	Masyarakat dan Puskesmas	50 Peserta diseminasi lokus AKI AKB dan 13 Puskesmas yang memenuhi target pelayanan kesehatan ibu bayi baru lahir	Dilaksanakan pada Bulan Mei, September dan Desember	Tidak ada	
		√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	653.004.507	577.911.919	88,50%	Masyarakat dan Puskesmas	100 Peserta Penguatan perkembangan balita dan 14 Puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita yang memenuhi target >90%	Dilaksanakan pada Bulan Mei, September dan Desember	Tidak ada	
		√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	607.673.360	547.351.966	90,07%	Masyarakat dan Puskesmas	262 Peserta pelatihan dan 14 Puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang memenuhi target	Dilaksanakan pada Bulan April, Agustus dan November	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pajak Rokok, Dana Alokasi Khusus Non Fisik	92.800.000	83.059.740	89,50%	Masyarakat usia produktif	453.174 orang sasaran masyarakat usia produktif	Dilaksanakan pada Bulan Februari, Juni dan September	Tidak ada	
		√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pajak Rokok	620.596.524	566.273.154	91,25%	Penduduk lansia dan puskesmas	140 Peserta seminar dan workshop, serta 12 Puskemas dengan cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut dengan kemandirian A	Dilaksanakan pada Bulan April, Agustus dan November	Tidak ada	
		√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pajak Rokok, Dana Alokasi Khusus Non Fisik	540.351.530	503.245.641	93,13%	Penderita TBC	9250 Masyarakat suspek penderita penyakit TBC	Dilaksanakan pada Bulan Maret, Juli dan Oktober	Tidak ada	
		√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pajak Rokok, Dana Alokasi Khusus Non Fisik	376.466.500	340.705.363	90,50%	Penderita HIV	350 Penderita HIV mendapatkan penanganan sesuai standar	Dilaksanakan pada Bulan April, Agustus dan November	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pajak Rokok	4.394.012.189	4.267.137.225	97,11%	Masyarakat dan Rumah Tangga	1.701 peserta sosialisasi dan pemberian bantuan pembangunan jamban kepada Rumah Tangga di 75 desa	Dilaksanakan pada Bulan Mei, September dan Desember	Tidak ada	
		√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dana Transfer Umum, Pajak Rokok	111.500.000	95.178.622	85,36%	Peserta Bimtek dan ODGJ	Pemberian bimtek kepada 328 peserta dan pemberian layanan kepada 1317 orang penderita ODGJ berat	Dilaksanakan pada Bulan Februari, Juni dan September	Tidak ada	
		√			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Alokasi Umum, Pajak Rokok, DAK Non Fisik	2.691.944.093	2.390.862.921	88,82%	Penderita Penyakit menular binatang dan peserta bimtek	350 kasus penderita penyakit menular dan 686 peserta mendapatkan bimtek	Dilaksanakan pada Bulan April, Agustus dan November	Tidak ada	
		√			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dana Alokasi Umum, Pajak Rokok - Pembayaran Iuran JKN	34.207.000.000	31.055.780.343	90,79%	Masyarakat penerima bantuan Program Sehat (Situbondo Sehat Gratis) dan preminya	23.317 orang penerima bantuan JKN dan 153.109 penduduk yang terlayani program Sehat	Dilaksanakan pada Bulan Maret, Juli, dan Oktober	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
										dibayarkan oleh pemerintah daerah yang terintegrasi dengan JKN				
		√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.350.730.640	920.071.752	68,12%	Peserta pembinaan	300 Petugas puskesmas mendapatkan pembinaan pelacakan kontak kasus penyakit COVI-19	Dilaksanakan pada Bulan Maret, Juli, dan Oktober	Tidak ada	
		√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dana Alokasi Umum, Pajak Rokok, DAK Non Fisik, DBH CHT	2.205.798.535	1.718.437.266	77,91%	Masyarakat	Pelacakan kasus gizi buruk sejumlah 60 kasus dan 5.344 kasus sasaran rentan gangguan gizi yang mendapatkan intervensi	Dilaksanakan pada Bulan Mei, September dan Desember	Tidak ada	
		√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dana Alokasi Umum, Pajak Rokok, DAK Non Fisik	940.760.867	880.504.463	93,59%	Masyarakat dan kelompok olahraga	140 kelompok olahraga mendapatkan pembinaan dan 1.371 peserta mendapatkan bimtek sosialisasi	Dilaksanakan pada Bulan Januari, Mei, dan Agustus	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80.000.000	80.000.000	100,00%	Puskesmas dan masyarakat	4 Puskesmas dengan pelayanan kesehatan sesuai standart dan Workshop/Bimtek kepada 407 orang	Dilaksanakan pada Bulan Mei, September dan Desember	Tidak ada	
		√			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Alokasi Umum, Pajak Rokok, DAK Non Fisik	2.128.733.027	1.751.847.865	82,30%	Puskesmas dan masyarakat	425 peserta mengikuti sos haji sehat dan 20 puskesmas dengan cakupan investigasi KLB>80%	Dilaksanakan pada Bulan Maret, Juli, dan Oktober	Tidak ada	
		√			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	DAU	195.000.000	195.000.000	100,00%	Masyarakat dan Puskesmas	10 Puskesmas yang melaksanakan intervensi keluarga sehat dan pemberian bimtek kepada masyarakat	Dilaksanakan pada Bulan April, Agustus dan November	Tidak ada	
		√			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	DAU	128.595.000	66.191.270	51,47%	Masyarakat	Pelaksanaan Kab/Kota Sehat dengan melibatkan unsur masyarakat di tingkat	Dilaksanakan pada Bulan Februari, Juni dan September	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
											desa			
		√			Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Pajak Rokok	250.000.000	213.612.976	85,45%	Masyarakat	Survey kepuasan masyarakat sejumlah 25 lembaga	Dilaksanakan pada Bulan April, Agustus dan November	Tidak ada	
		√			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dana Alokasi Umum, Pajak Rokok	2.100.000.000	1.524.150.538	72,58%	Masyarakat dan Puskesmas	100 Peserta mengikuti pertemuan dan melaksanakan monev kepada 20 Puskesmas	Dilaksanakan pada Bulan Maret, Juli, dan Oktober	Tidak ada	
		√			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	DAU	295.288.000	295.150.210	99,95%	Masyarakat	Penanganan gawat darurat kepada 20 kasus dan pemberian pelatihan	Dilaksanakan pada Bulan Juli sampai November	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	DAK Non Fisik	751.245.000	705.501.750	93,91%	Keluarga	melakukan intervensi keluarga sehat kepada 64.000 KK	Dilaksanakan pada Triwulan 2 dan Triwulan 3	Tidak ada	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	√			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pajak Rokok, Dana Alokasi Khusus Non Fisik	110.000.000	109.782.903	99,80%	Media	Penggunaan 3009 media dalam pelaksanaan KIE PHBS dalam rangka promotif dan preventif	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Bulan Desember	Tidak ada	
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			√	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	APBD	597.500.000	548.575.131	91,81%	Petani	Untuk memperkuat tebing sekitar pemukiman penduduk avour 150 meter	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Suplay bahan material terganggu karena lokasi padat huni penduduk	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
				√	Normalisasi/Restorasi Sungai	APBD	1.500.000.000	548.575.131	36,57%	Petani	Untuk memperkuat tebing avour 150 meter	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Kesulitan distribusi alat berat ke lokasi kegiatan	
				√	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	APBD	600.000.000	597.785.000	99,63%	Petani yang terdampak banjir	Untuk tanggap darurat penanganan bencana banjir	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Distribusi material disaat bencana	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				√	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	APBD	200.000.000	195.778.000	97,89%	Petani	Terbangunnya sumur jaringan air tanah sebanyak 12 unit	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Kondisi geografis tipologi tanah	
				√	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	APBD	2.201.449.700	1.870.078.294	84,95%	Petani dan Warga	Terpeliharanya sumur jaringan Irigasi permukaan 1100 meter	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Air tidak mengalir sementara ketika proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi sehingga petani merasa ada yang dirugikan	
				√	Rehabilitasi Bendung Irigasi	APBD	1.500.000.000	1.350.667.874	90,04%	Petani dan Warga	Untuk mengoptimalkan pendistribusian Air dan menaikkan tinggi muka air 2 unit Bendung (DI Curah Suri 60 meter dan DI Sumberteles 28,27 meter)	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Air tidak mengalir sementara ketika proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi sehingga petani merasa ada yang dirugikan	
				√	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	APBD	1.858.600.000	1.736.954.546	93,45%	Juru dan PPA	Untuk mempermudah Juru dan PPA dalam melaksanakan tugas sebagai	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Distribusi peralatan memerlukan waktu yang tepat terhadap aspek manfaat barang yang	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
											pembagi air pada lahan pertanian Juru 45 orang dan 45 orang		diadakan	
				√	Operasional Unit Pengelola Irigasi	APBD	100.000.000	94.095.000	94,10%	Kelompok HIPPA, GHIPPA dan IHIPPA	Untuk meningkatkan kinerja HIPPA, GHIPP dan IHIPPA dalam memberikan pelayanan kepada petani pemakai air	Dilaksanakan pada Bulan September	Memerlukan koordinasi lintas sektor dan lintas program	
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			√	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	APBD/DAU	2.025.000.000	1.764.407.402	40,20%	18 Kelompok Masyarakat	Mencakup kegiatan pembinaan dan dokumen rangkuman hasil kegiatan pembinaan. G enelarisir per pelaksanaan kegiatan dan survey yaitu Rp 5.000.000 per pokmas	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Harus ada verifikasi kelompok masyarakat yang aktif	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				√	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	APBD/DAU	90.000.000	36.180.000	97,83%	1) 1 Dokumen Geolistrik di desa sopet panapan, sopet bengko alas, kedunglo, rajekwesi, widoropayung, semambung 2) 1 dokumen feasibility study pembangunan SPAM kawasan di desa baderan, tlogosari, plalangan	1) Mencakup kegiatan survey ke lokasi, konsultan uji geolistrik beserta dokumen akhirnya 75.000.000 2) Mencakup kegiatan survey ke lokasi, konsultan survey beserta dokumen studi kelakaan akhir dan perantara 75.000.000	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Tidak ada	
				√	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	PAPBD/DAU	150.000.000	146.739.172	90,95%	Desa Kedunglo 135 Rumah Tangga; Sopet 150 rumah tangga; Sumbertengah 171 rumah tangga	Desa Kedunglo 1.138.266.000; Desa Sopet 1.365.000.000; Desa Sumbertengah 1.547.000.000	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				√	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	APBN/DAK	4.900.593.000	4.456.941.720	92,86%	Desa Bloro 240 rumah tangga	Desa Bloro kegiatan penggantian pompa, kelistrikan, jaringan dan SR total 1.564.436.000. Generalisir jika dihitung per rumah tangga 6.518.483	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Tidak ada	
				√	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	APBN/DAK	1.564.436.000	1.452.772.323	95,09%	Desa yang membutuhkan perbaikan jaringan pipa perdesaan	Kegiatan berupa pengadaan dan pemasangan pipa dan penggantian pompa submersible. Nilai kegiatan Rp 68.195.124. Kegiatan pemasangan Pipa PVC mof S12.5 diameter 4" 2 lonjor; Pipa PVC mof S12.5 diameter 3" 1 lonjor; Pipa PVC mof S12.5	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
											diameter 2" 72 lonjor. Kegiatan perbaikan pompa submersible franklin 4 KW/5.5 HP			
				√	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	APBD/DAU	75.000.000	71.319.400	92,78%	47 sambungan rumah tangga	Kegiatan meliputi pembangunan tandon, jaringan pipa beserta pemasangan SR. Generalisir per sambungan rumah tangga bernilai 4.255.319	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Tidak ada	
				√	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	APBD/DAU	200.000.000	185.554.000	95,81%	460 Rumah tangga miskin Ekstrim	masing masing penerimaan untuk jamban 2.500.000 per unit	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Tidak ada	
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			√	Pembangunan /Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	APBD/DAU	1.649.997.255	1.580.903.300	95,81%	460 Rumah tangga miskin Ekstrim	masing masing penerimaan untuk jamban 2.500.000 per unit	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Tidak ada	
				√	Pembangunan /Penyediaan	APBN/DAK	1.673.273.7	1.614.189.500	96,47%	200 rumah tangga lokus	masing masing	Dilaksanakan pada	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
					Sarana dan Prasarana IPLT		00			stunting	penerimaan untuk jamban 7.000.000 per unit	Bulan Juni sampai Bulan Desember		
8	Program Pengembangan Permukiman			√	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	APBD/ DAU	815.000.000	761.205.000	93,40%	Kawasan permukiman yang belum ada akses atau akses dalam keadaan rusak sebagian	Nilai fisik di : Karangasem Rp 44.853.000; Desa Besuki Rp 190.833.000; Desa Kalibagor Rp 93.455.000; Plaosa RT3/RW3 Rp 44.062.000; Kec Kendit Rp 152.401.000; Desa Kesampirampak Rp 90.070.000	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Tidak ada	
9	Program Penyelenggaraan Jalan			√	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	APBD	250.000.000	247.104.000	98,84%		kegiatan dilaksanakan oleh konsultan dengan output dokumen	Dilaksanakan pada Bulan Agustus dan September	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				√	Rehabilitasi Jalan	SILPA BK PROV	17.065.782.295	15.695.671.424	91,97%	Masyarakat	Perbaikan Infrastruktur guna memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Tidak ada	
				√	Pemeliharaan Rutin Jalan	APBD	7.579.460.000	5.655.663.178	74,62%	Masyarakat	Perbaikan Infrastruktur guna memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Tidak ada	
				√	Pembangunan Jembatan	DAK	4.102.047.000	3.830.838.253	93,39%	Masyarakat	Perbaikan Infrastruktur guna memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Tidak ada	
				√	Rehabilitasi Jembatan	APBD	1.400.000.000	1.292.305.371	92,31%	Masyarakat	Perbaikan Infrastruktur guna memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	√			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	APBD	100.000.000	79.667.500	79,67%	Tenaga kerja konstruksi dan anggota Badan Usaha yang belum memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi di Kab. Situbondo	Semakin bertambahnya SDM yang memiliki standart kompetensi yang sesuai pada setiap Badan Usaha di Kab. Situbondo	Dilaksanakan pada Bulan Desember	kurangnya kemampuan SDM secara teknologi dalam proses pelaksanaan pelatihan	
			√		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	APBD	30.000.000	23.272.900	77,58%	Perwakilan dari Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Bidang Teknis DPUPP	Meningkatnya kemampuan kapasitas dan pengetahuan stake holder penyelenggara jasa konstruksi di Kab. Situbondo	Dilaksanakan pada Bulan November	tidak ada	
11	Program Pengembangan Perumahan			√	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	APBD	99.999.075	99.751.509	99,75%	Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	kegiatan dilaksanakan oleh konsultan dengan output dokumen	Dilaksanakan pada Triwulan 3	tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
12	Program Kawasan Perumahan			√	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	APBD	99.996.952	99.567.000	99,57%	Masyarakat di lokasi SK Kumuh	kegiatan dilaksanakan oleh konsultan dengan output dokumen	Dilaksanakan pada Triwulan 4	tidak ada	
13	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			√	Perbaikan RTLH untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	APBD	16.175.000.000	16.076.386.420	99,39%	Rumah tangga Miskin Ekstrem	masing masing penerima bantuan sebesar Rp. 15.000.000,00	Dilaksanakan pada Bulan Triwulan 3 dan Triwulan 4	Ada kegiatan yang dilaksanakan pada PAPBD, sehingga kegiatan hanya waktu 2 bulan	
14	Program Rehabilitasi Sosial	√			Penyediaan Sandang	DAU	25.627.780	6.686.505	26,09%	5 Orang	Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan kepada balita terlantar	Dilaksanakan pada Bulan Oktober	Harga Barang Mengalami Kenaikan di Mbiz sehingga target sasaran menjadi berkurang	Dinas Sosial
		√			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	DAU	28.279.870	7.812.100	27,62%	30 Orang	Pendampingan bimbingan kepada keluarga reonivikasi	Dilaksanakan Sepanjang Tahun 2022	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		√			Penyediaan Alat Bantu	DAU	153.863.130	93.745.850	60,93%	28 ORANG	Penyediaan alat bantu yang diberikan kepada penyandang disabilitas	Dilaksanakan pada Bulan September	Tidak ada	
		√			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	DAU	69.345.570	54.272.900	78,26%	Siswa dan siswi SMP	Bantuan Transport 50.000	Dilaksanakan pada Bulan Mei	Tidak ada	
		√			Pemberian Layanan Rujukan	DAU	99.999.870	65.620.274	65,62%	PMKS yang terjaring razia	Layanan Rehabilitasi	Dilaksanakan Sepanjang Tahun 2022	Tidak ada	
				√	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	DAU	141.379.750	41.501.366	29,35%	Anak Terlantar, anak cacat, dan anak jalanan	OT: Pemulangangan ke Daerah Asal PSBR: 300.000 Paket sandang berupa kaos, tas sekolah dan sepatu	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Bulan Desember	Adanya Pembatasan Kuota PSBR dari UPT Provinsi	
15	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	√			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DAU	120.547.230	102.605.000	85,12%	PKH kab Situbondo	Bantuan Transport 50.000	Dilaksanakan pada Bulan September dan Oktober	Tidak ada	
		√			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DAU & DBHCHT	12.297.613.366	11.474.002.601	93,30%	BLT DBHCHT : 4.536 ORANG PAKET	BLT DBHCHT : Rp 900.000 PAKET SEMBAKO	Dilaksanakan pada Bulan Maret, Juli dan November	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
										SEMPAKO COVID INDUK: 16.280 OTANG PAKET SEMPAKO TERDAMPAK COVID PAK : 14.025 KPM PAKET SEMPAKO TERDAMPAK INFLASI: 27.200 KPM BLT TERDAMPAK INFLASI: 2.168 KMP	COVID INDUK: Paket sembako senilai Rp 113.150 PAKET SEMPAKO TERDAMPAK COVID PAK : Paket sembako senilai Rp.105.973 PAKET SEMPAKO TERDAMPAK INFLASI: Paket sembako senilai Rp.105.700 BLT TERDAMPAK INFLASI: Paket sembako senilai Rp. 600.000			
16	Program Penanganan Bencana	√			Penyediaan Makanan	DAU	78.294.080	76.532.474	97,75%	100 KPM	Paket sembako senilai ; Rp. 175.830	Dilaksanakan Sepanjang Tahun 2022	KURANG TANGGAPNYA MASYARAKAT DALAM MENGINFORMASIKAN TERJADINYA BENCANA DILINGKUNGAN	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
													WILAYAHNYA, SEHINGGA PENANGANAN TERHDAP KORBAN BENCANA BLM OPTIMAL	
		√			Penyediaan Sandang	DAU	179.442.920	175.796.960	97,97%	50 veteran dan 24 LKSA	Veteran : Rp. 50.000 LKSA: Rp. 5.788.200	Dilaksanakan Sepanjang Tahun 2022	tidak ada	
17	Program Pemberdayaan Sosial	√			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU	49.999.860	37.505.000	75,01%	Pekerja Sosial Masyarakat	1. Pemberian pengetahuan tentang peran PSM terhadap penanganan masalah sosial; 2. Pemberian motivasi PSM dalam berkoordinasi dengan pilar-pilar sosial;	Dilaksanakan pada Bulan Juli sampai Oktober	TIDAK ADA	
			√		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU	100.000.000	40.525.400	40,53%	Wanita rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dengan kriteria yaitu wanita berusia 18 sampai dengan 59 tahun sudah menikah, belum	1. Pemberian pengetahuan analisa usaha dan pelatihan memasak selama 2 hari dengan 12 resep; 2. Pemberian pengetahuan dan keterampilan	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai Juli	Waktu pelaksanaan yang terbatas	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
										menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.	berwirausaha Wanita; 3. Pemberian motivasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi untuk berani menciptakan rintisan usaha sesuai keterampilan yang telah dimiliki melalui pelatihan yang telah diikuti			
		√			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU	124.999.910	117.809.960	94,25%	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Honorarium TKSK dalam penanganan PMKS di wilayah Kab. Situbondo senilai Rp 500.000/bulan	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Juni	TIDAK ADA	
		√			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU	49.999.930	44.438.097	88,88%	Ketua / Sekretaris Karang Taruna Desa/Kelurahan	Rp. 47.000,- (Besaran Penerimaan Transport Peserta Kegiatan)	Dilaksanakan pada Bulan Februari dan Maret	Tidak ada Kendala	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		√			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	DAU	24.999.770	24.382.985	97,53%	Tim LK3 Kabupaten Situbondo	Bimtek kepada Tim LK3 Kab. Situbondo Sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM	Dilaksanakan pada Triwulan 3	Tidak ada Kendala	
18	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		√		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	DAU	70.000.480	69.814.640	99,73%	Nelayan	Penyusunan dokumen data dan informasi sumber daya ikan	Dilaksanakan pada Triwulan 3	Tidak ada	Dinas Peternakan dan Perikanan
			√		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	DAU	394.627.466	390.485.806	98,95%	Masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata dan perikanan	Pembangunan galeri minapolitan, rehabilitasi kampung kerapu, dan rehab TPT Panarukan	Dilaksanakan pada Bulan Juli sampai November	Tidak ada	
			√		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	DAU	1.165.757.410	1.133.799.605	97,26%	Penerima Gill Net: 4 KUB; Penerima Trammel Net: 4 KUB; Penerima Cool Box:8 KUB; Penerima Genset: 3 KUB	Restocking ikan sejumlah 20.000 ekor dan pengadaan sarana usaha perikanan tangkap 100 unit	Dilaksanakan pada Bulan Juli sampai November	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
			√		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	APBD Kabupaten	674.807.62 ₂	671.106.380	99,45%	5 Orang	Pelatihan Mesin Kapal dan Mesin Kapal 24 PK	Dilaksanakan pada Bulan April sampai September	Tidak ada	
			√		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	APBD Kabupaten	180.813.42 ₂	166.446.701	92,05%	8 Orang	Pelatihan Pengasapan Ikan dan Lemari Mesin Ikan Asap	Dilaksanakan pada Semester 2	Tidak ada	
19	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		√		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	APBD Kabupaten (Musrem)	149.999.80 ₀	149.368.600	99,58%	3 Orang	149.999.800	Dilaksanakan pada Semester 2	Tidak ada	
			√		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	APBD Kabupaten (JASMAS)	49.999.875	48.628.625	97,26%	1 Orang	48.628.625	Dilaksanakan pada Triwulan 3	Tidak ada	
			√		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	DAU	162.500.64 ₅	162.039.800	99,72%	3 Orang	162.039.800	Dilaksanakan pada Triwulan 2	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
			√		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DAU	200.000.000	198.388.930	99,19%	Pelaku usaha perikanan	Rehabilitasi tambak UPT PB ATAP Desa Gelung, Kec. Panarukan	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai November	Tidak ada	
			√		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	DAU	75.000.000	74.398.800	99,20%	Kelompok masyarakat	Sosialisasi kepada 15 kelompok masyarakat	Dilaksanakan pada Triwulan 2	Tidak ada	
			√		Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	DAU	517.058.300	456.557.264	88,30%	Nelayan dan pelaku usaha perikanan	Peningkatan Produksi ikan budidaya air laut dan air payau	Dilaksanakan pada Triwulan 2 dan 3	Tidak ada	
20	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		√		Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	DAU	329.735.200	312.733.007	94,84%	Peternak	Bimtek kepada 6 kelompok peternak untuk mengelola pakan serta limbah ternak dengan baik	Dilaksanakan pada Triwulan 3	Tidak ada	
21	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		√		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atas standart pada usaha pengolahan	DAU	62.727.160	62.626.920	99,84%	Kelompok nelayan dan pelaku usaha perikanan	Pembinaan kepada 2 kelompok dan 40 orang pelaku usaha	Dilaksanakan pada Bulan April sampai Oktober	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
					dan pemasaran skala mikro dan kecil									
			√		Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	DAU	239.220.000	236.943.800	99,05%	Masyarakat yang bekerja di sektor perikanan	fasilitasi kepada 200 orang yang bekerja di sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dilaksanakan pada Bulan April sampai Oktober	Tidak ada	
22	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			√	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	APBN/DAK FISIK	227.823.000	227.823.000	100,00%	Gapoktan Harapan Tani	1 Unit Bangunan Lumbung	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Mebutuhkan waktu dalam pengurusan sertifikat hibah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				√	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	APBN/DAK FISIK	56.640.000	56.640.000	100,00%	Gapoktan Harapan Tani	1 Lantai Jemur	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Mebutuhkan waktu dalam pengurusan sertifikat hibah	
				√	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	APBN/DAK FISIK	715.537.000	715.537.000	100,00%	Gapoktan Harapan Tani	1 Unit RMU dan Bedryer	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan Desember	Mebutuhkan waktu dalam pengurusan sertifikat hibah	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
23	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			√	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	APBD	16.183.000	16.183.000	100,00%	OPD dan Instansi Terkait	1 Dokumen	Dilaksanakan sepanjang Tahun 2022	Tidak Ada	
		√			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	APBD	23.817.000	23.817.000	100,00%	OPD dan Instansi Terkait	1 Dokumen	Dilaksanakan sepanjang Tahun 2023	Tidak Ada	
		√			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	APBD	120.257.000	120.257.000	100,00%	1 Gapoktan	12.110 Kg Gabah	Dilaksanakan pada Bulan Desember	Tidak Ada	
				√	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	APBD	100.827.400	100.827.400	100,00%	3 Sekolah Dasar atau Sederajat	Sosialisasi B2SA	Dilaksanakan pada Bulan Desember	Tidak Ada	
			√		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	APBD dan APBN/DAK Non Fisik	223.478.820	223.478.820	100,00%	5 Kelompok Tani/KWT	SL Gempur Pelakarangann dan DAK Nonfisik (TKDD 15 Juta Per Kelompok	Dilaksanakan sepanjang Tahun 2022	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
24	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		√		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DAU DBH	8.030.763.015	8.030.763.015	100,00%	Petani	Pengadaan 5 unit cultivator, pengadaan 27.033 batang bibit buah, pengadaan pupuk bersubsidi dan non subsidi	Dilaksanakan sepanjang tahun 2022	Tidak ada	
25	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		√		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	DAU	1.460.722.400	1.460.722.400	100,00%	Petani	Pegembangan padi organik seluas 10Ha	Dilaksanakan pada bulan Februari sampai Desember	Tidak ada	
				√	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	DAU	5.640.000.000	5.640.000.000	100,00%	Petani	Pembangunan jaringan irigasi 11 unit, pembangunan sumur dalam 5 unit dan pembangunan sumur dangkal 9 unit	Dilaksanakan pada Semester 2	Tidak ada	
				√	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DAK Fisik	2.799.025.100	2.799.025.100	100,00%	Petani	Pembangunan Jalan Usaha Tani di 5 Desa sejumlah 18 unit	Dilaksanakan pada Semester 2	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				√	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	DAU DAK Fisik	2.122.955.000	2.122.955.000	100,00%	Kelompok Tani	Pembangunan Sumur Dangkal sejumlah 7 Unit dan Sumur Dalam Sejumlah 5 Unit	Dilaksanakan pada Semester 2	Tidak ada	
26	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		√		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	DAU	340.496.538	340.496.538	100,00%	Petani	Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium Pertanian sejumlah 32 unit, Pendampingan pengendalian massal 68 kali, dan penyediaan pestisida sejumlah 10 jenis		Tidak ada	
27	Program Penyuluhan Pertanian		√		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dana Alokasi Umum Dana Bagi Hasil	25.000.000	25.000.000	100,00%	Lembaga Petani	Pelatihan kepada 839 lembaga petani dan Pelatihan kepada 60 orang pemuda tani milenial		Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
			√√		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum Dana Bagi Hasil	75.000.000	75.000.000	100,00%	Lembaga Petani	Sekolah lapang kepada 30 lembaga Petani		Tidak ada	
			√		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dana Alokasi Umum Dak Non Fisik	290.700.000	290.700.000	100,00%	Lembaga Tani dan Penyuluh Pertanian	Program rembuk tani yang diadakan di 17 Kecamatan se-Kabupaten Situbondo serta pelatihan kepada penyuluh pertanian sejumlah 85 orang		Tidak ada	
			√		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	-Dana Alokasi Umum -Dana Alokasi Khusus Fisik -Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.275.000.000	1.275.000.000	100,00%	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	Pembanguna dan pengelolaan di Balai Penyuluh Pertanian dan pelaksanaan DEM Area kepada 20 kelompok tani		Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
28	Program Penanganan Kerawanan Pangan	√			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	APBD	38.215.710	38.215.710	100,00%	1 Kelompok Tani	1 Kali Pelatihan Olahan Pangan		Tidak Ada	
29	Program Penataan Desa			√	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	APBD	700.000.000	59.855.200	94,50%	Masyarakat Desa Campoan	Dialokasikan untuk pelebaran Jalan dan Pembuatan Gorong - Gorong serta Plengsengan	Dilaksanakakan pada Bulan Agustus sampai Bulan November	Lokasi yang sulit dijangkau oleh angkutan menyulitkan penyaluran bahan bangunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
30	Program Peningkatan Kerjasama Desa			√	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	DAU	60.000.000	2.488.659.030	99,76%	Pemerintah Desa	Pelaksanaan kegiatan Ex PNPM mandiri perdesaan	Dilaksanakan sepanjang Tahun 2022	Tidak ada	
31	Program Administrasi Pemerintahan Desa			√	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	APBD	3.038.458.480	119.488.100	81,91%	BPJS Kesehatan untuk 1479 Perangkat Desa, Peningkatan Kapasitas Perangkat desa 528 org	- BPJS Kesehatan Rata Rata Rp. 147,370,606 perbulan (Pagu Rp. 2,233,560,480, Realisasi 1,722,932,960 Silpa 510,627,520) - Biaya Pelaksanaan sosialisasi Siskeudes Rp. 765,706,070	Dilaksanakan sepanjang Tahun 2022	Validasi data yang kurang maksimal, keterlambatan penyampaian data, Kurangnya Pemahaman kemampuan tim kecamatan dan operator dalam proses asistensi dan validasi PKD, jaringan internet kurang baik	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				√	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	APBD dan APBN	120.000.000	155.561.900	99,57%	33 Lembaga/BU MDes	Dana Reguler sebesar 70.000.000 dialokasikan untuk pembinaan BUMdesa dan Dana BKK sebesar 50.000.000 untuk pengeembangan di 6 lembaga/BU Mdesa	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Bulan November	BUMDesa masih belum berbadan, Management Pengelolaan Adminitrasi dan Keuangan masih belum tertib dan benar karena SDM, Kepala Desa Kurang mendukung pengelolaan usaha yang dilakukan oleh BUMDesa.	
32	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		√		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	APBD KAB	162.000.000	73.791.700	96,03%	Keluarga	252 Keluarga Penerima Manfaat	Dilaksanakan pada Bulan Agustus sampai November	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
			√		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	DAU	80.000.000	725.984.111	92,24%	Pemerintah Desa	Pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) di Desa	Dilaksanakan pada Bulan Agustus sampai November	Tidak ada	
			√		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DAU	731.076.424		99,30%	Pemerintah Desa	Fasilitasi TP PKK di Desa dan Kelurahan	Dilaksanakan pada Bulan Agustus sampai November	Tidak ada	
33	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		√		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD	39.419.193	32.069.193	81,35%	40 orang Pengurus/Koperasi	Kegiatan pelatihan selama 3 hari	Dilaksanakan pada Bulan April	Rendahnya mutu kualitas produk koperasi dan kemasan	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
34	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		√		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	APBD	92.999.764	92.999.764	100,00%	30 Peserta	30 Peserta	Dilaksanakan pada Bulan September	1.Kurangnya waktu Pelatihan,2.Pemasaran pasca pelatihan	
			√		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	APBD	40.000.000	30.949.720	77,37%	250 Peserta	250 Peserta	Dilaksanakan pada Bulan November dan Desember	1.Telat dalam pemberkasan, 2.Kurang koordinasi antar perangkat desa dengan keluarga,3.Pemasangan patok,4.Sengketa batas tanah	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
36	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		√		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	APBD Kab/ Kota, DBHCHT	1.879.914.700	1.878.941.658	99,95%	324 pencari kerja	Kegiatan ini dibagi menjadi 16 Pelatihan yang diperuntukkan untuk 324 orang pencari kerja	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Bulan Desember	kesulitan dalam menyusun jadwal karena pelatihan yang dilaksanakan bekerjasama dengan UPTBLK yang memiliki program pelatihan sendiri sehingga dinas ketenagakerjaan harus menyesuaikan dengan jadwal pelatihan yang diselenggarakan dengan UPTBLK	Dinas Ketenagakerjaan
37	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi			√	Penyuluhan Transmigrasi	APBD Kab/ Kota	15.000.000	14.886.200	99,24%	Warga Resettlemen	Kegiatan dibagi dengan 2 kali penyuluhan kepada total 60 KK	Dilaksanakan pada Bulan Desember	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
38	Program Penempatan Tenaga Kerja		√		Perluasan Kesempatan Kerja	APBD Kab/Kota	318.799.922	318.150.093	99,80%	Diberikan kepada 55 peserta pelatihan	Kegiatan dibagi menjadi tiga kali pelatihan yaitu dua kali Pelatihan Pemasaran Online dan satu kali Pelatihan Memasak	Dilaksanakan pada Bulan November	Tidak Ada	
39	Program Hubungan Industrial	√			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	APBD Kab/Kota	88.894.456	88.353.740	99,39%	Perusahaan se Kabupaten Situbondo	Tidak ada bantuan yang diberikan	Dilaksanakan pada Triwulan 3	Minimnya pengetahuan SDM di perusahaan tentang perundang-undangan	
			√		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	APBD Kab/Kota	62.160.500	61.585.950	99,08%	Perusahaan se Kabupaten Situbondo	Tidak ada bantuan yang diberikan	Dilaksanakan pada Triwulan 2	Mediator belum berfungsi sebagaimana mestinya	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
			√		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	APBD Kab/Kota	35.486.400	35.032.700	98,72%	Lembaga Kerja Sama Tripartit Kab. Situbondo	Tidak ada bantuan yang diberikan	Dilaksanakan pada Triwulan 3	SDM anggota lembaga kurang kompatibel dengan kondisi saat ini	
40	Program Pendaftaran Penduduk	√			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	DAU	46.673.970	45.994.420	98,54%	Masyarakat	Masyarakat memiliki dokumen kependudukan	Dilaksanakan sepanjang Tahun 2022	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		√			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DAU	21.472.330	20.730.965	96,55%	Masyarakat	Masyarakat memiliki dokumen kependudukan	Dilaksanakan sepanjang Tahun 2022	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	
		√			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	DAU	12.412.620	12.184.390	98,16%	Masyarakat	Masyarakat memiliki dokumen kependudukan	Dilaksanakan sepanjang Tahun 2022	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
41	Program Pencatatan Sipil	√			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	DAU	74.695.210	65.433.520	87,60%	Masyarakat	Masyarakat memiliki dokumen pencatatan sipil	Dilaksanakan sepanjang Tahun 2022	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	
		√			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	DAU	14.088.080	13.083.046	92,87%	Masyarakat	Masyarakat memiliki dokumen pencatatan sipil	Dilaksanakan sepanjang Tahun 2022	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	
		√			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	DAU	46.359.280	46.304.982	99,88%	Masyarakat	Masyarakat memiliki dokumen pencatatan sipil	Dilaksanakan sepanjang Tahun 2022	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
42	Program Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan	√			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	DAU	36.946.010	36.930.172	99,96%	OPD dan Kecamatan	OPD dan Kecamatan mengetahui pelaksanaan adminduk	Dilaksanakan sepanjang Tahun 2022	untuk mengolah dan penyajian data Adminduk per semester harus menunggu data PDAK dari Kemendagri (Dirjen Dukcapil)	
		√			Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	DAU	6.500.000	6.498.700	99,98%	OPD	untuk OPD bekerjasama dg Dukcapil Pusat mengetahui kebenaran NIK	Dilaksanakan sepanjang Tahun 2022	untuk kerjasama dengan OPD harus di kirim ke pusat untuk mendapatkan persetujuan	
		√			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	DAU	55.982.900	50.976.824	91,06%	OPD	untuk OPD bekerjasama dg Dukcapil Pusat mengetahui kebenaran NIK	Dilaksanakan sepanjang Tahun 2022	untuk kerjasama dengan OPD harus di kirim ke pusat untuk mendapatkan persetujuan	
		√			Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	DAU	24.455.330	21.171.100	86,57%	Masyarakat	Mempercepat kepemilikan adminduk di masyarakat	Dilaksanakan sepanjang Tahun 2022	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	
		√			Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	DAU	45.048.240	44.137.990	97,98%	masyarakat	Meningkatkan kepemilikan	Dilaksanakan sepanjang Tahun 2022	Kurangnya kesadaran masyarakat	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
					Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat						adminduk masyarakat		mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	
43	Program Pengelolaan n Profil Kependudukan	√			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	DAU	13.299.700	4.335.100	32,60%	OPD	Tersedianya data perkembangan dan proyek kependudukan	Dilaksanakan sepanjang Tahun 2022	Sulitnya koordinasi permintaan data dengan OPD Lain	
44	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		√		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	APBD Kab/ Kota	66.644.760	63.059.075	94,62%	30 orang desa trebungan, 15 orang desa demung, 16 orang kec. situbondo dan 20 orang u arjasa	462.000 untuk 30 orang desa trebungan, 821.600 untuk 15 orang desa demung, 57.406 untuk 16 orang kec situbondo dan 704.700 untuk 20 orang desa arjasa	Dilaksanakan pada Bulan Juni, Juli, November, dan Desember	tidak ada	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			√		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	APBD Kab/ Kota	312.808.946	305.299.289	97,60%	44 opd se kabupaten situbondo	Pelatihan kuliner dan pelatihan Perempuan Kepala Rumah Tangga (PEKKA)	Dilaksanakan pada Bulan Agustus, November dan Desember	Kurangnya pemahaman tentang pentingnya PUG	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		√			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD Kab/Kota	33.904.000	33.798.650	99,69%	Kabupaten situbondo	Peningkatan kapasitas kepada 4 Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Dilaksanakan Sepanjang Tahun 2022	belum terorganisir kegiatan yang dilakukan oleh OPD bersama forum PUSPA Rengganis	
45	Program Perlindungan Perempuan	√			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	APBN	107.219.616	41.649.333	38,84%	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Situbondo	Perempuan yang mengalami tindak kekerasan mendapatkan 6 fungsi layanan yaitu Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi dan Pendampingan Korban.	Dilaksanakan Sepanjang Tahun 2023	Kurangnya Pemahaman dan pengenalan terhadap Masyarakat tentang Layanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak melalui UPT PPA	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		√			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD Kab/Kota	36.000.000	36.000.000	100,00%	Masyarakat	Masyarakat di Kabupaten situbondo	Dilaksanakan pada Bulan Januari, April, Agustus, dan Desember	Masih kurangnya kesadaran dan keberanian masyarakat dalam memberi laporan terhadap kasus kekerasan khususnya pada perempuan dan anak	
47	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		√		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD Kab/Kota	45.607.400	44.706.900	98,03%	OPD terkait KLA	17 kecamatan, 136 desa bisa menerapkan Dekelara dan kelana	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Bulan Mei	Desa dan kecamatan belum sepenuhnya memahami KLA	
		√			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD Kab/Kota	6.910.400	6.910.400	100,00%	Forum Anak	6 kali pertemuan untuk FA	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Bulan Juni	kegiatan dilaksanakan pada hari libur terkait dengan waktu luang FA	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
48	Program Perlindungan Khusus Anak	√			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik	56.440.600	48.230.375	85,45%	Lintas sektor dan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap Anak	OPD dan linsek mengetahui pentingnya pencegahan kekerasan thd anak	Dilaksanakan pada Triwulan 3	tidak ada	
		√			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	APBN	170.124.624	105.343.309	61,92%	Korban Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Situbondo	Anak yang mengalami tindak kekerasan mendapatkan 6 fungsi layanan yaitu Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi dan Pendampingan Korban.	Dilaksanakan Sepanjang Tahun 2022	Kurangnya Pemahaman dan pengenalan terhadap Masyarakat tentang Layanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak melalui UPT PPA	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		√			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU dan DAK Non Fisik	100.988.360	100.283.250	99,30%	Tokoh Masyarakat, tokoh agama, masyarakat Situbondo	kegiatan dilakukan sebanyak 4 kali baik ditingkat desa maupun tingkat kabupaten	Dilaksanakan pada Triwulan 2, 3 dan 4	tidak ada	
49	Program Pengendalian Penduduk			√	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	APBD Kab/ Kota	31.595.000	31.264.600	98,95%	Penyuluh KB dan Lintas Sektor	Kegiatan dibagi 2 kali berupa Sosialisai Data stunting dan Pencetakan Formulir Verval KRS	Dilaksanakan pada Triwulan 4	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				√	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	APBN	141.600.000	120.001.711	84,75%	- Balai Penyuluhan KB 17 Kecamatan dan Perwakilan Faskes se Kabupaten Situbondo	Pembayaran Paket internet untuk pengentrian Data di Aplikasi New Siga dan Sosialisasi terkait pengisian Data layanan KB di Aplikasi New Siga bagi Faskes Se Kabupaten Situbondo	Dilaksanakan sepanjang Tahun 2022	- Aplikasi New Siga yang lambat - Kurangnya petugas Entry Data di Aplikasi New Siga	
50	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	√			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	APBN	406.125.000	406.125.000	100,00%	- 17 Kecamatan Se Kabupaten Situbondo	1231 Akseptor Implant 1057 Akseptor cabut 44 akseptor iud 77 akseptor mop 25 akseptor mow 28 akseptor	Dilaksanakan pada Bulan Mei, Juni, Agustus, September dan Oktober	Kurangnya sarana Penjemputan akseptor	
		√			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	APBD Kab/ Kota	5.300.000	5.297.000	99,94%	Akseptor yang mengalami kegagalan	1 akseptor	Dilaksanakan pada Bulan Maret	Komplain dari pihak keluarga	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		√			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	APBN	12.600.000	12.600.000	100,00%	Tenaga Kesehatan	60 faskes	Dilaksanakan pada Bulan Maret, Juni, September dan Oktober	Tidak ada	
51	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	√			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	APBD Kab/ Kota	129.443.368	128.950.220	99,62%	340 Kader BKR dan PIK	Meningkatnya kapasitas kader BKR dan PIKR	Dilaksanakan pada Bulan Oktober dan November	Kurangnya pelatihan kader	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		√			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	APBD Kab/Kota	28.012.800	23.934.800	85,44%	Dinkes, DPMP, Organisasi Keagamaan, Kementerian Agama Situbondo, Pengadilan Agama	Meningkatnya dukungan Lintas sektor akan program penanganan penurunan Stunting	Dilaksanakan pada Bulan September, Oktober, dan November	Belum tertandatangani MoU lintas sektor	
52	Program Pengelolaan Pelayaran			√	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	APBD Kab/Kota	7.706.137.588	7.365.851.231	95,58%	seluruh masyarakat pengguna pelabuhan	pembangunan jaringan air bersih sebesar Rp 155.000.000, pembangunan pos pantau sebesar Rp 170.000.000, pemasangan toll gate sebesar Rp 65.000.000, pembuatan akses jalan masuk dan keluar	Dilaksanakan pada Bulan Oktober dan Desember	Tidak ada kendala	Dinas Perhubungan

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
											pelabuhan sebesar Rp 7.197.499.028, Rehab kios sebesar Rp 30.000.000, Rehab Toilet sebesar Rp 50.300.000, perbaikan jaringan listrik pelabuhan sebesar Rp 73.757.560			
				√	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	APBD Kab/Kota	6.000.000	6.000.000	100,00%	seluruh masyarakat pengguna pelabuhan	lembur dan mamin penjaga posko lebaran dan nataru sebesar Rp 6.000.000	Dilaksanakan pada Bulan Mei dan Desember	Tidak ada kendala	
53	Program Pembinaan Perpustakaan	√			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	APBD	96.029.200	93.911.300	97,79%	Seluruh masyarakat	Menumbuhkan minat baca masyarakat	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Bulan Desember	Terbatasnya koleksi yang dimiliki	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		√			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	APBD	28.243.800	26.454.800	93,67%	Seluruh masyarakat	Meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan melalui pembaruan/update dan keberagaman koleksi bacaan	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Bulan Desember	Terbatasnya kerjasama dengan penerbit, kurangnya tenaga teknis pengelola bahan pustaka	
54	Program Penanggulangan Bencana	√			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum	97.000.000	97.000.000	100,00%	Korban Bencana Alam	Paket pemberian bantuan rekonstruksi bangunan kepada korban bencana alam	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Bulan Desember	Tidak ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		√			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	APBD Kab/Kota	138.316.800	138.316.800	100,00%	Diberikan Kepada Korban Terdampak Bencana di Kabupaten Situbondo	Logistik yang disediakan berupa 570 paket bahan pangan/sembako yang diperuntukan bagi korban bencana	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai Bulan Desember	- Terbatasnya jumlah dan jenis logistik - Terbatasnya Kendaraan Operasional Pendukung distribusi logistik - kondisi gudang yang kurang memadai	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		√			Pencarian, Pertolongan, dan evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	APBD Kab/Kota	8.000.000	8.000.000	100,00%	Korban Terdampak Bencana di Kabupaten Situbondo	Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendukung upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Dilaksanakan pada Bulan Januari sampai Bulan November	- Terbatasnya Mobil Rescue - Lokasi Kejadian Bencana yang jauh dan sulit diakses - Terbatasnya Peralatan Rescue dan Pengungsian	
55	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan			√	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	DAU	278.000.000	277.444.000	99,80%	Masyarakat	Sebagai Sekretariat TKPKD Kab. Situbondo untuk mengoordinasikan Perangkat Daerah yang berperan dalam program penanggulangan kemiskinan	Dilaksanakan sepanjang Bulan Januari s.d. Desember	Tidak Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				√	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	DAU	120.000.000	119.773.022	99,81%	Masyarakat	Pendataan Penduduk Miskin Ekstrem Kab. Situbondo Tahun 2022	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
					Pembangunan Manusia						sebagai upaya penyediaan data BNBA dalam penanggulangan kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran			
56	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		√		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	APBN	299.935.145	233.625.279	77,89%	80 ORANG	masing - masing peserta pelatihan mendapatkan bantuan transport sebesar 200.0000 dan tas pelatihan	dilaksanakan pada bulan september hingga oktober	Tidak Ada	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			√		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	APBN	299.935.142	232.902.248	77,65%	80 ORANG	masing - masing peserta pelatihan mendapatkan bantuan transport sebesar 200.0000 dan tas pelatihan	dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus	Tidak Ada	
57	Program Informasi dan Komunikasi Publik			√	Pelayanan Informasi Publik	DAU	131.944.000	122.565.900	92,89%	Masyarakat	Pelayanan Informasi kepada Masyarakat	Dilaksanakan Pada Januari sampai dengan Desember	Tidak ada	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
58	Program Aplikasi Informatika			√	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah berbasis Elektronik	DAU	104.406.400	101.613.290	97,32%	Masyarakat	Pelayanan Informasi kepada Masyarakat	Dilaksanakan Pada Januari sampai dengan Desember	Tidak ada	
59	Program Penanggulangan Bencana			√	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	DAU	38.316.000	38.195.724	99,69%	Pengiriman bantuan tenaga Tim reaksi cepat penanggulangan bencana Satpolpp	Bantuan Transpot Petugas	Dilaksanakan pada Bulan Januari Sampai Oktober	Tidak ada	Satuan Polisi Pamong Praja

2.4 EVALUASI PROGRAM PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (PPKE) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022

2.4.1 Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

Pelaksanaan strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Kabupaten Situbondo Tahun 2022 untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat didukung dengan 23 program yang dilaksanakan oleh 10 OPD sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Dinas Kesehatan,
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman,
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
5. Dinas Sosial,
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
10. Dinas Ketenagakerjaan.

Adapun kendala dalam pelaksanaan 23 program pendukung pencapaian pengurangan beban pengeluaran masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.15 : Kendala Pelaksanaan Program PPKE Pendukung Pencapaian Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun 2022

No.	Program PPKE	Kendala
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Tidak Ada
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tidak Ada
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Tidak Ada
4.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Kurangnya kemampuan SDM secara teknologi dalam proses pelaksanaan pelatihan
5.	Program Penanggulangan Bencana	a. Terbatasnya jumlah dan jenis logistik b. Terbatasnya Kendaraan Operasional Pendukung distribusi logistik c. Kondisi gudang yang kurang memadai d. Terbatasnya Mobil Rescue e. Lokasi Kejadian Bencana yang jauh dan sulit diakses f. Terbatasnya Peralatan Rescue dan Pengungsian
6.	Program Rehabilitasi Sosial	Harga Barang Mengalami Kenaikan di Mbiz sehingga target sasaran menjadi berkurang
7.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tidak Ada
8.	Program Penanganan Bencana	Kurang tanggapnya masyarakat dalam menginformasikan terjadinya bencana di

No.	Program PPKE	Kendala
		lingkungan wilayahnya sehingga penanganan terhadap korban bencana belum optimal
9.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Belum terorganisir kegiatan yang dilakukan oleh OPD bersama forum PUSPA Rengganis
10.	Program Perlindungan Perempuan	a. Kurangnya Pemahaman dan pengenalan terhadap Masyarakat tentang Layanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak melalui UPT PPA b. Masih kurangnya kesadaran dan keberanian masyarakat dalam memberi laporan terhadap kasus kekerasan khususnya pada perempuan dan anak
11.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kegiatan dilaksanakan pada hari libur terkait dengan waktu luang FA
12.	Program Perlindungan Khusus Anak	Kurangnya Pemahaman dan pengenalan terhadap Masyarakat tentang Layanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak melalui UPT PPA
13.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	Tidak Ada
14.	Program Pendaftaran Penduduk	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
15.	Program Pencatatan Sipil	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil
16.	Program Pengelolaan Informasi Kependudukan	a. Untuk mengolah dan penyajian data Adminduk per semester harus menunggu data PDAK dari Kemendagri (Dirjen Dukcapil) b. Untuk kerjasama dengan OPD harus di kirim ke pusat untuk mendapatkan persetujuan c. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
17.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Sulitnya koordinasi permintaan data dengan OPD Lain
18.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	a. Kurangnya sarana Penjemputan akseptor b. Komplain dari pihak keluarga
19.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	a. Kurangnya pelatihan kader b. Belum tertandatanganinya MoU lintas sektor
20.	Program Pembinaan Perpustakaan	Terbatasnya kerjasama dengan penerbit, kurangnya tenaga teknis pengelola bahan pustaka
21.	Program Hubungan Industrial	Minimnya pengetahuan SDM di perusahaan tentang perundang-undangan

No.	Program PPKE	Kendala
22.	Program Pemberdayaan Sosial	Tidak Ada
23.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tidak Ada

Pelaksanaan program yang mendukung pengurangan beban pengeluaran masyarakat tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Alokasi anggaran program dan realisasinya pada tahun 2022 sebagai berikut;

Tabel 2.16 : Alokasi dan Realisasi Anggaran Program PPKE Pendukung Pencapaian Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun 2022

No.	Program PPKE	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	92.966.120.208	89.384.771.177	96,15%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	118.708.198.443	105.600.141.645	88,96%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	110.000.000	109.782.903	99,80%
4.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100.000.000	79.667.500	79,67%
5.	Program Penanggulangan Bencana	243.316.800	243.316.800	100,00%
6.	Program Rehabilitasi Sosial	377.116.220	228.137.629	60,50%
7.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	12.418.160.596	11.576.607.601	93,22%
8.	Program Penanganan Bencana	257.737.000	252.329.434	97,90%
9.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	33.904.000	33.798.650	99,69%
10.	Program Perlindungan Perempuan	143.219.616	77.649.333	54,22%
11.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	6.910.400	6.910.400	100,00%
12.	Program Perlindungan Khusus Anak	327.553.584	253.856.934	77,50%
13.	Program	160.257.000	160.257.000	100,00%

No.	Program PPKE	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi
	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat			
14.	Program Pendaftaran Penduduk	80.558.920	78.909.775	97,95%
15.	Program Pencatatan Sipil	135.142.570	124.821.548	92,36%
16.	Program Pengelolaan Informasi Kependudukan	168.932.480	159.714.786	94,54%
17.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	13.299.700	4.335.100	32,60%
18.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	437.324.700	428.357.100	97,95%
19.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	157.456.168	152.885.020	97,10%
20.	Program Pembinaan Perpustakaan	124.273.000	120.366.100	96,86%
21.	Program Hubungan Industrial	88.894.456	88.353.740	99,39%
22.	Program Pemberdayaan Sosial	249.999.470	224.136.042	89,65%
23.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	38.215.710	38.215.710	100,00%
Total		227.346.591.041	209.427.321.927	92,12%

2.4.2 Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Pelaksanaan strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Kabupaten Situbondo Tahun 2022 untuk peningkatan pendapatan masyarakat didukung dengan 19 program yang dilaksanakan oleh 10 OPD sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman,
2. Dinas Ketenagakerjaan,
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan,
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Dinas Peternakan dan Perikanan,
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
9. Dinas Sosial,
10. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Adapun kendala dalam pelaksanaan 19 program pendukung pencapaian peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.17 : Kendala Pelaksanaan Program PPKE Pendukung Pencapaian Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun 2022

No.	Program PPKE	Kendala
1.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Tidak Ada
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kesulitan dalam menyusun jadwal karena pelatihan yang dilaksanakan bekerjasama dengan UPTBLK yang memiliki program pelatihan sendiri sehingga dinas ketenagakerjaan harus menyesuaikan dengan jadwal pelatihan yang diselenggarakan dengan UPTBLK
3.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kurangnya pemahaman tentang pentingnya PUG
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Desa dan kecamatan belum sepenuhnya memahami KLA
5.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tidak Ada
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rendahnya mutu kualitas produk koperasi dan kemasan
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	a. Kurangnya waktu Pelatihan b. Pemasaran pasca pelatihan c. Telat dalam pemberkasan d. Kurang koordinasi antar perangkat desa dengan keluarga e. Pemasangan patok f. Sengketa batas tanah
8.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Tidak Ada
9.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Tidak Ada
10.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Tidak Ada
11.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tidak Ada
12.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tidak Ada
13.	Program Hubungan Industrial	a. Mediator belum berfungsi sebagaimana mestinya b. SDM anggota lembaga kurang kompatibel dengan kondisi saat ini
14.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Tidak Ada
15.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Tidak Ada

No.	Program PPKE	Kendala
16.	Program Penyuluhan Pertanian	Waktu pelaksanaan yang terbatas
17.	Program Pemberdayaan Sosial	Tidak Ada
18.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tidak Ada
19.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tidak Ada

Pelaksanaan program yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Alokasi anggaran program dan realisasinya pada tahun 2022 sebagai berikut;

Tabel 2.15 : Alokasi dan Realisasi Anggaran Program PPKE Pendukung Pencapaian Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun 2022

No.	Program PPKE	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi
1.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	30.000.000	23.272.900	77,58%
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.879.914.700	1.878.941.658	99,95%
3.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	379.453.706	368.358.364	97,08%
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	45.607.400	44.706.900	98,03%
5.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	223.478.820	223.478.820	100,00%
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	39.419.193	32.069.193	81,35%
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	132.999.764	123.949.484	93,20%
8.	Program Pengembangan Kesenian	389.979.418	323.459.600	82,94%

No.	Program PPKE	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi
	Tradisional			
9.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.486.006.400	2.431.653.132	97,81%
10.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.154.558.620	1.089.382.019	94,35%
11.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.821.220.615	9.804.218.422	99,83%
12.	Program Penempatan Tenaga Kerja	318.799.922	318.150.093	99,80%
13.	Program Hubungan Industrial	97.646.900	96.618.650	98,95%
14.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	973.076.424	955.337.711	98,18%
15.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	340.496.538	340.496.538	100,00%
16.	Program Penyuluhan Pertanian	1.665.700.000	1.665.700.000	100,00%
17.	Program Pemberdayaan Sosial	100.000.000	40.525.400	40,53%
18.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	301.947.160	299.570.720	99,21%
19.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	599.870.287	466.527.527	77,77%
Total		20.934.568.467	20.481.710.231	97,84%

2.4.3 Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan

Pelaksanaan strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Kabupaten Situbondo Tahun 2022 untuk penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan didukung dengan 27 program yang dilaksanakan oleh 13 OPD sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

2. Dinas Kesehatan,
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman,
4. Dinas Sosial,
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
8. Dinas Perhubungan,
9. Dinas Ketenagakerjaan,
10. Kecamatan,
11. Dinas Komunikasi dan Informatika,
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
13. Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun kendala dalam pelaksanaan 27 program pendukung penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan beban pengeluaran masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.14 : Kendala Pelaksanaan Program PPKE Pendukung Pencapaian Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan di Kabupaten Situbondo Tahun 2022

No.	Program PPKE	Kendala
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Tidak Ada
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tidak Ada
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Suplay bahan material terganggu karena lokasi padat huni penduduk Kesulitan distribusi alat berat ke lokasi kegiatan Distribusi material disaat bencana Kondisi geografis tipologi tanah Air tidak mengalir sementara ketika proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi sehingga petani merasa ada yang dirugikan Air tidak mengalir sementara ketika proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi sehingga petani merasa ada yang dirugikan Distribusi peralatan memerlukan waktu yang tepat terhadap aspek manfaat barang yuang diadakan Memerlukan koordinasi lintas sektor dan lintas program
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Harus ada verifikasi kelompok masyarakat yang aktif
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Tidak Ada
6.	Program Pengembangan Permukiman	Tidak Ada
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	Tidak Ada
8.	Program Pengembangan	Tidak Ada

No.	Program PPKE	Kendala
	Perumahan	
9.	Program Kawasan Permukiman	Tidak Ada
10.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Ada kegiatan yang dilaksanakan pada PAPBD, sehingga kegiatan hanya waktu 2 bulan
11.	Program Rehabilitasi Sosial	Adanya Pembatasan Kuota PSBR dari UPT Provinsi
12.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Mebutuhkan waktu dalam pengurusan sertifikat hibah
13.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	Tidak Ada
14.	Program Penataan Desa	Lokasi yang sulit dijangkau oleh angkutan menyulitkan penyaluran bahan bangunan
15.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Tidak Ada
16.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Validasi data yang kurang maksimal, keterlambatan penyampaian data, Kurangnya Pemahaman kemampuan tim kecamatan dan operator dalam proses asistensi dan validasi PKD, jaringan internet kurang baik BUMDesa masih belum berbadan, Management Pengelolaan Adminitrasi dan Keuangan masih belum tertib dan benar karena SDM, Kepala Desa Kurang mendukung pengelolaan usaha yang dilakukan oleh BUMDesa.
17.	Program Pengendalian Penduduk	- Aplikasi New Siga yang lemot - Kurangnya petugas Entry Data di Aplikasi New Siga
18.	Program Pengelolaan Pelayaran	Tidak Ada
19.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tidak Ada
20.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Tidak Ada
21.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kurangnya waktu pendataan
22.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Tidak Ada
23.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Masih ada PSU yang belum diserahkan ke Pemda Masih banyak perumahan yang belum melakukan penyerahan PSU
24.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Tidak Ada
25.	Program Aplikasi Informatika	Tidak Ada

No.	Program PPKE	Kendala
26.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tidak Ada
27.	Program Penanggulangan Bencana	Tidak Ada

Pelaksanaan program yang mendukung penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Alokasi anggaran program dan realisasinya pada tahun 2022 sebagai berikut;

Tabel 2.15 : Alokasi dan Realisasi Anggaran Program PPKE Pendukung Pencapaian Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan di Kabupaten Situbondo Tahun 2022

No.	Program PPKE	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	28.475.352.775	27.066.803.930	95,05%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	14.280.003.936	13.747.982.310	96,27%
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	8.557.549.700	6.942.508.976	81,13%
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.005.029.000	8.113.914.017	90,10%
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.323.270.955	3.195.092.800	96,14%
6.	Program Pengembangan Permukiman	815.000.000	761.205.000	93,40%
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	30.397.289.295	26.721.582.226	87,91%
8.	Program Pengembangan Perumahan	99.999.075	99.751.509	99,75%
9.	Program	99.996.952	99.567.000	99,57%

No.	Program PPKE	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi
	Kawasan Permukiman			
10.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	16.175.000.000	16.076.386.420	99,39%
11.	Program Rehabilitasi Sosial	141.379.750	41.501.366	29,35%
12.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%
13.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	100.827.400	100.827.400	100,00%
14.	Program Penataan Desa	700.000.000	661.526.567	94,50%
15.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	60.000.000	59.855.200	99,76%
16.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.158.458.480	2.608.147.130	82,58%
17.	Program Pengendalian Penduduk	173.195.000	151.266.311	87,34%
18.	Program Pengelolaan Pelayaran	7.712.137.588	7.371.851.231	95,59%
19.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.561.980.100	10.561.980.100	100,00%
20.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	15.000.000	14.886.200	99,24%
21.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	354.724.288	325.158.600	91,67%
22.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan	348.640.800	346.207.000	99,30%

No.	Program PPKE	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi
	Kelurahan			
23.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	459.999.900	403.683.655	87,76%
24.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	131.944.000	122.565.900	92,89%
25.	Program Aplikasi Informatika	104.406.400	101.613.290	97,32%
26.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	398000000	397217022	99,80%
27.	Program Penanggulangan Bencana	38316000	38195724	99,69%
Total		93.117.144.683	85.555.285.644	91,88%

Anggaran kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2022 sebesar Rp.185.171.053.363,00 mengalami peningkatan dari Tahun 2021 yang sebesar Rp.123.987.286.621,00 atau sebesar 49%. Dengan adanya peningkatan anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar 49% melalui pelaksanaan program kegiatan prioritas di 33 kegiatan, tingkat kemiskinan tahun 2022 turun 6,73% dari tahun 2021 dan tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 turun 67,17% dari tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2022	Penurunan
Tingkat Kemiskinan	12,63	11,78	6,73%
Tingkat Kemiskinan Ekstrem	2,65	0,87	67,17%

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2023

3.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SITUBONDO

Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Situbondo mengacu pada Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 yang memuat terkait empat strategi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, yakni:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Empat strategi tersebut dijabarkan ke dalam berbagai program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Program-program tersebut terdiri atas:

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil
4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin

Lebih lanjut, merujuk Dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 terkait penanggulangan kemiskinan tersebut dijelaskan bahwa setiap daerah perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah selama 5 tahun. Dengan adanya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah maka setiap daerah akan mampu memetakan kondisi kemiskinannya. Karena kemiskinan memiliki dimensi yang sangat kompleks tidak hanya sekedar terkait kemampuan ekonomi (konsumsi) masyarakat tetapi menyangkut status kehidupan sosial. Selain itu penting juga untuk menetapkan konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan untuk penanggulangannya. Kabupaten Situbondo telah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah periode tahun 2022 – 2026.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 – 2026 disusun untuk mendukung pencapaian Visi Kabupaten Situbondo yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang Berakhlak, Sejahtera, Adil, dan Berdaya”. Adapun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 – 2026 selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Situbondo yang termuat pada Misi 2 “Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas

dan Meningkatkan Peran Perempuan” serta Misi 3 “Membangun Infrastruktur, Ekonomi, dan Berdaya Saing” yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Aksi Tahunan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Situbondo.

Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, peternakan, perikanan, infrastruktur dan ketenagakerjaan sebagai upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Pembangunan yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo seperti yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2022-2026 dijabarkan melalui upaya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin hingga usaha mikro kecil
2. Peningkatan pembangunan sosial
3. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar bidang pendidikan untuk masyarakat miskin
4. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar untuk penerangan dan energi untuk masyarakat miskin
5. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar untuk hunian layak dan infrastruktur untuk masyarakat miskin
6. Penguatan tata kelola kelembagaan untuk penanggulangan kemiskinan

Strategi dalam mencapai target penanggulangan kemiskinan didukung dengan penguatan komitmen, koordinasi dan sinergitas lintas sektor antara berbagai stakeholder diantaranya perangkat daerah, kecamatan (eksekutif) dan legislative, pemerintah desa, perguruan tinggi, CSR, organisasi masyarakat, media massa, Baznas, KORPRI, Lazisnu, Lazismu, pemerintah pusat dan instansi vertikal dengan peran sebagai berikut:

Stakeholder	Peran
Perangkat Daerah, Kecamatan (eksekutif) dan legislative	<ul style="list-style-type: none">▪ Pelaksanaan pogram kegiatan sesuai cascading kinerja▪ Masing-masing memiliki ukuran kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran.▪ Penyediaan aturan hukum yang jelas sebagai landasan program kegiatan.▪ Legislatif memberikan pengawasan dan mengawal pelaksanaan pembangunan
Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none">▪ Sinergitas dan sinkronisasi perencanaan kabupaten dan desa▪ Meningkatkan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa
Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none">▪ Terlibatnya perguruan tinggi negeri maupun swasta dalam proses pembangunan.▪ Adanya mou kerjasama antara perguruan tinggi dengan pemerintah kabupaten
CSR	Keterlibatan perusahaan swasta dalam upaya mendukung program prioritas pemerintah. Misal : dukungan program sosial, pendidikan , kesehatan; pemberdayaan masyarakat, dsb.

Stakeholder	Peran
Organisasi Masyarakat	Ormas berperan dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi. Misal : teribatnya peran aktif PPDiS (Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo) dalam pembangunan Inklusi. Situbondo meraih penghargaan KABUPATEN TERINKLUSIF dari USAID tahun 2021. dan TEMU INKLUSI NASIONAL 2023.
Media Massa	Terlibatnya media massa dalam proses pembangunan, mulai penyebarluasan program-kegiatan pemerintah, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan
Baznas, KORPRI, Lazisnu, Lazismu	mengambil peran yang signifikan dalam upaya pemerintah daerah untuk menghapus kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem
Pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sinerginya perencanaan, pelaksanaan , dan pengawasan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ▪ Berperannya instansi vertikal mendukung pelaksanaan program prioritas kabupaten, seperti Kemenag, Pengadilan Agama, Kodim, Polres dan jajarannya dalam upaya penanggulangan kemiskinan

3.2 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2023

Pemerintah Kabupaten Situbondo senantiasa melaksanakan upaya secara terus menerus untuk menanggulangi kemiskinan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mengentaskan dan mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun, pemerintah memandang penting untuk melakukan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi pengeluarannya, Sehingga kemampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya semakin meningkat. Ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin (kedalaman dan keparahan kemiskinan) juga merupakan permasalahan kemiskinan yang harus diminimalisasi selain menurunkan persentase dan jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan di Kabupaten Situbondo dan upaya penanggulangannya harus bersifat lintas sektor dan lintas program berkolaborasi lintas pemerintahan baik bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun antar Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan desa.

Dalam penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah membuat inovasi “Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten (PEKA)” yang dikembangkan sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan arah kebijakan pembangunan nasional salah satunya adalah Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, selaras dengan tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2023 “Percepatan Infrastruktur Strategis Terintegrasi untuk Peningkatan Investasi dan Inovasi Daerah Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat”. Inovasi PEKA didasarkan pada Perda No.6 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perbup No.7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendataan, Pemutahiran, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kemiskinan Ekstrem. Ruang lingkup dari inovasi PEKA sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan terhadap variable penyusun indikator perencanaan pembangunan berbasis partisipatif di Tingkat Desa/Kelurahan;
2. Menyediakan database bagi Desa, Kecamatan dan Daerah;
3. Pengolahan dan Analisis data ;
4. Menyediakan data basis kependudukan by name by address by NIK;
5. Menyediakan analisis data terpilah sebagai dasar perencanaan pembangunan Daerah;
6. Menyediakan peta lokasi prioritas berdasar tematik isu pembangunan;
7. Menyediakan data sasaran pembangunan tematik terpilah (Tingkat Kesejahteraan masyarakat, Pembangunan Rumah Layak Huni, Indeks kekumuhan Wilayah, Sanitasi dan Air Minum, indikator ODF, Kepemilikan Aset, Kepemilikan Jaminan Kesehatan, Indikator Pendidikan masyarakat, Status Pekerjaan, Jenis & Jumlah Disabilitas, Usaha Mikro, Kepemilikan Listrik, dll);
8. Sebagai supporting integrasi data bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
9. Menampilkan data sasaran penerima program pembangunan secara terpilah dalam penanganan kemiskinan.

Inovasi ini diinisiasi oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Situbondo, dan menjadi tanggung jawab Kepala BAPPEDA serta melibatkan berbagai stakeholder diantaranya seluruh Perangkat Daerah terkait penanggulangan kemiskinan, PPDIs Kabupaten Situbondo, BPD, BAZNAS, BPS, TKPK Desa, TKPK Kecamatan, TKPK Daerah, Akademisi, LSM, Forum CSR, dan Komunitas /Lembaga Keagamaan. Anggaran inovasi PEKA menggunakan APBD Kabupaten Situbondo dengan biaya sebesar Rp.48.000.000.000,- dengan tujuan dan sasaran inovasi PEKA sebagai berikut:

1. Mendapatkan data penduduk miskin yang valid sesuai kondisi daerah dan klasternya baik tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desas ebagai dasar penyusunan program & kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan baik di Tingkat Daerah maupun Desa;
2. Meningkatkan partisipasi dan koordinasi seluruh pihak dalam Program Penanggulangan Kemiskinan;
3. Mendorong Responsifitas Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan;

4. Membangun kemandirian data di Desa, karena berawal dari data, Desa bisa melakukan perencanaan pembangunan, pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik & administrasi dengan jauh lebih baik dan terarah;
5. Mendorong keterbukaan informasi di Desa, terutama berkait Data & Program Pengentasan Kemiskinan.

Inovasi PEKA ini dikembangkan untuk diintegrasikan dengan Sistem Aplikasi yang membutuhkan/menggunakan data dasar kependudukan berbasis NIK, baik di tingkat Desa, Kecamatan, Daerah bahkan Pusat. Pemanfaatan teknologi di tingkat Desa yaitu melalui aplikasi berbasis web Sistem Informasi desa/Kelurahan berbasis SQI dan di tingkat Kabupaten melalui aplikasi berbasis web Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Gambaran proses pengumpulan data PEKA adalah:



Adapun Output yang dihasilkan oleh inovasi ini diantaranya adalah penyediaan data sasaran penerima program yang diambil dari penetapan SK Bupati Situbondo Nomor 188/130/P/001.3/2022 tentang Data Penduduk Miskin Ekstrem Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022, dengan rincian :

1. Pemerintah Kabupaten
 - a. Intervensi perbaikan RTLH sebanyak 714 unit, dengan total anggaran Rp.16.860.000.000,00, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman. Lokasi sasaran intervensi adalah 5 kecamatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi yaitu : Kecamatan Besuki, Kecamatan Sumbermalang, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Suboh, dan Kecamatan Panji.
 - b. Intervensi pembangunan Jamban sebanyak 1.824 unit, dengan total anggaran Rp.5.550.000.000,00, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman, dan Dinas Kesehatan. Lokasi sasaran intervensi adalah 4 kecamatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi yaitu Kecamatan Besuki, Kecamatan Sumbermalang, Kecamatan Arjasa, dan Kecamatan Suboh.

- c. Ramadhan Mesra dengan membagikan 16.280 sembako, dan pemberian 40.800 paket sembako untuk masyarakat miskin korban covid-19 dan yang terdampak inflasi, yang disalurkan oleh Dinas Sosial.
 - d. Pemberian 3160 BLT untuk buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok; 730 BLT untuk masyarakat miskin; dan 2926 BLT untuk masyarakat miskin terkena dampak inflasi, yang disalurkan oleh Dinas Sosial, total anggaran sebesar Rp. 3.328.346.313,00 yang disalurkan oleh Dinas Sosial.
 - e. Bantuan Sembako sebanyak 1871 paket, dengan total anggaran sebesar Rp. 144.800.000,00, dari CSR Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Desa :
- a. Intervensi perbaikan RTLH sebanyak 270 unit pada 66 desa, dengan total anggaran sebesar Rp. 4.050.739.600,00.
 - b. Intervensi pembangunan jamban sebanyak 1.118 unit pada 87 desa, dengan total anggaran Rp. 2.865.771.000,00.
 - c. Penyaluran BLT-DD untuk 15.540 KPM di 132 desa dengan anggaran Rp.55.944.000.000,00.

Pada tahun 2023, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni serta pembangunan Jamban, dilakukan dengan sasaran rumah tangga miskin ekstrem yang ditetapkan dalam SK Bupati Situbondo Nomor 188/376/P/001.3/2022 tentang Data Penduduk Miskin Ekstrem Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Hasil Pemutakhiran Data Program Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dengan rincian :

- 1. Intervensi perbaikan RTLH sebanyak 943 unit, dengan total anggaran Rp. 7.005.000.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman.
- 2. Intervensi pembangunan Jamban sebanyak 2003 unit, dengan total anggaran Rp. 10.237.850.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman, dan Dinas Kesehatan.
- 3. Pemberian bantuan sosial dengan anggaran sebesar Rp. 2.853.883.889,00 yang disalurkan oleh Dinas Sosial.

Sedangkan outcome dan dampak yang dihasilkan dari inovasi PEKA diantaranya adalah:

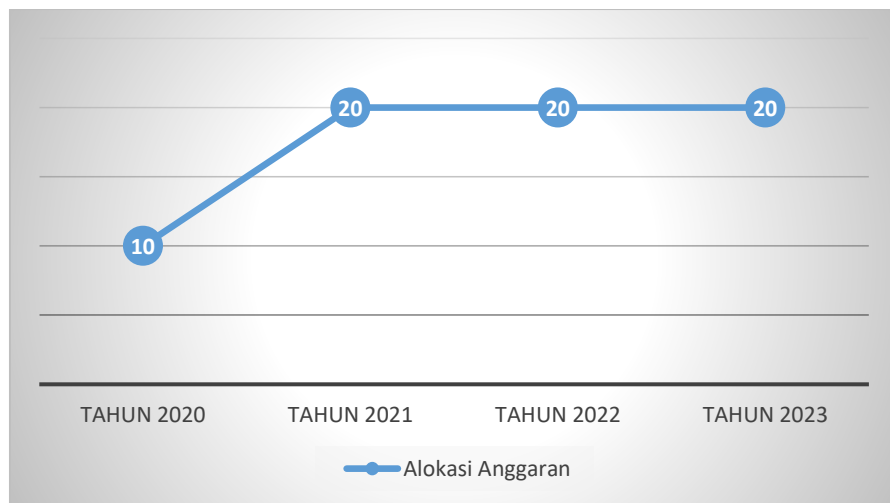
- 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan terwujud; Terbukti Kemiskinan Ekstrem Kab. Situbondo turun signifikan dari angka 2,65% Tahun 2021 menjadi 0,87% di Tahun 2022, dengan kinerja penurunan sebesar 67% (nomor 2 terbaik di Jawa Timur). Dan secara keseluruhan persentase kemiskinan kabupaten Situbondo pada tahun 2021 sebesar 12,63% turun menjadi 11,78 pada tahun 2022.
- 2. Peningkatan kualitas pembangunan manusia dengan indikator capaian angka IPM yakni sebesar 67,78 pada tahun 2021 naik menjadi 68,25 pada tahun 2022.

Selain keberhasilan dalam pembuatan inovasi PEKA, Pemerintah Kabupaten Situbondo juga terdapat berbagai program prioritas yang terkait penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan diantaranya sebagai berikut:

- 1. Program SEHATI (Situbondo Sehat Gratis)

Program SEHATI (Situbondo Sehat Gratis) merupakan inovasi yang bertujuan memudahkan masyarakat miskin dalam mendapatkan layanan kesehatan secara gratis hanya dengan menunjukkan e-KTP Masyarakat Miskin yang tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan (JKN) mendapat layanan Kesehatan Gratis di Pusat Layanan Kesehatan terdekat (Puskesmas / RSUD). Adapun alokasi anggaran untuk Program SEHATI mulai tahun 2020 sampai tahun 2023 sebagai berikut:

Alokasi Anggaran Program SEHATI Tahun 2020 – 2023 (Milyar)



2. Insentif Guru Ngaji dan Guru Minggu

Pemberian bantuan intensif guru ngaji dan guru minggu diberikan kepada 4. 861 orang guru ngaji dan guru minggu yang ada di Kabupaten Situbondo. Masing-masing guru ngaji dan guru minggu mendapatkan bantuan sebesar Rp.1.500.000,- dengan total anggaran yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk program ini per tahun sebesar Rp.7.291.500.000,-

3. Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan sharing dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) dengan Alokasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 5.228.670.000,- yang bertujuan untuk memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mendasar dan pokok bagi Santri/Warga Belajar/Siswa.

4. Bantuan Hibah Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren

Bantuan Hibah Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren ini dianggarkan sebesar Rp.8.680.000.000,- dengan rincian Rp.5.180.000.000,- untuk tempat peribadatan dan Rp.3.500.000.000,- untuk tempat pendidikan agama.

5. Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) Se-Kabupaten Situbondo

Program Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) Se-Kabupaten Situbondo mengalokasikan anggaran dari APBD Tahun 2023 sebesar Rp.1.600.000.000 untuk diberikan insentif kepada 3.345 Ketua RT se Kabupaten Situbondo dengan masing-masing Ketua RT menerima insentif sebesar Rp.500.000,-.

6. Insentif Kader Posyandu dan Kader KB Se-Kabupaten Situbondo

Program Insentif Kader Posyandu dan Kader KB Se-Kabupaten Situbondo diberikan pada kader yang bekerja dengan sukarela untuk membantu peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah kerja posyandu. Program ini dialokasikan melalui APBD Tahun 2023 sebesar Rp.1.157.000.000 untuk 4.615 Kader Posyandu Balita pada 914 Posyandu Se-Kabupaten Situbondo dengan masing-masing Kader menerima insentif sebesar Rp.250.000,-.

7. Insentif Kepada Guru PAUD Se-Kabupaten Situbondo

Insentif Kepada Guru PAUD Se-Kabupaten Situbondo yang diberikan pada tahun 2023 meningkat dari Rp.150.000,- menjadi Rp.250.000,- yang diberikan kepada 1.824 orang Guru PAUD dengan total alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.5.478.000.000,-.

8. Beasiswa Situbondo Cerdas

Program Situbondo Cerdas merupakan program beasiswa untuk mahasiswa dan calon mahasiswa yang diberikan melalui beasiswa jalur prestasi akademik, prestasi non akademik dan kriteria ekonomi tidak mampu yang bekerjasama dengan 26 Perguruan Tinggi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.283.800.000,-. Pencairan tahap I untuk 257 mahasiswa. Selanjutnya akan dicairkan tahap II untuk 267 mahasiswa.

9. Pemberian Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Pangan Kesejahteraan Keluarga

Bantuan pangan kepada Masyarakat terdampak covid19 dan stabilitas ekonomi terhadap kenaikan BBM sebesar Rp 6 M yang disalurkan pada acara Ramadhan Bersama Rakyat dengan sasaran 22.271 KPM, serta buruh tani tembakau pada 136 Desa/Kelurahan, dengan realisasi sampai saat ini Rp. 4 M.

10. DID dan BKK Desa

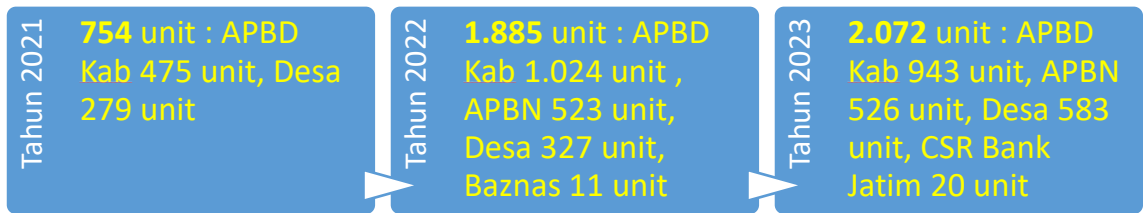
DID dan BKK Desa diberikan untuk desa yang berkomitmen mensukseskan dan mendukung prioritas nasional dan daerah seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, ketahanan pangan, pemberdayaan, dan desa inklusi. BK Khusus diberikan untuk 5 desa sebesar Rp.500.000.000,- dan BK Umum diberikan untuk 5 desa sebesar Rp.250.000.000,-.

11. Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Mata Masyarakat dan Operasi Katarak Gratis

Program ini dilaksanakan dalam bentuk pelayanan pemeriksaan mata masyarakat (2.199 orang), mata anak-anak Sekolah Dasar (SD), pemberian kacamata (1.189 pasang), pemberian obat tetes mata 658 botol, pemberian bola mata palsu 9 orang, dan operasi katarak 284 orang.

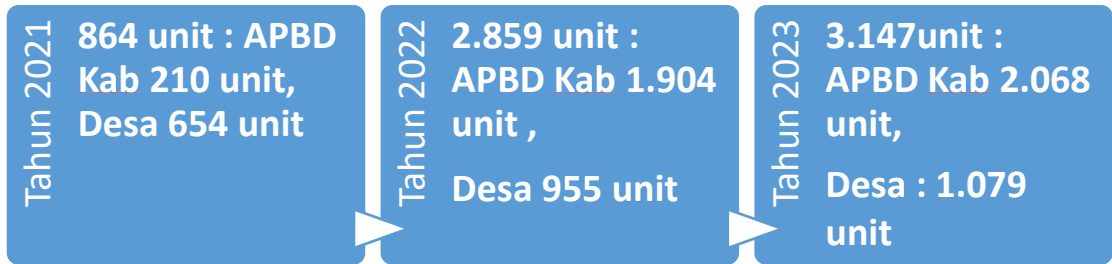
12. Program BIRULAH (Bikin Rumah Layak Huni)

Program BIRULAH telah dilaksanakan mulai tahun 2021 dengan penganggaran sebanyak 943 unit masing-masing mendapatkan Rp.15.000.000,- dengan total anggaran sebesar Rp.14.145.000.000,- yang dialokasikan melalui APBN, APBD, Baznas, Desa, dan CSR dengan rincian sebagai berikut:



13. Program Jamban Keluarga

Program Jamban Keluarga telah dilaksanakan mulai tahun 2021 dengan alokasi anggaran APBD Kabupaten dan Desa sebagai berikut:



14. Program Penyediaan Air Minum

Penyediaan Jaringan distribusi air minum dan sambungan rumah bagi masyarakat miskin dengan anggaran sebesar Rp9.478.491.000.

15. Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (ODF)

Pembangunan jamban sebanyak 2028 unit bagi Masyarakat Miskin Ekstrem (P3KE) dan masyarakat sangat miskin dengan total anggaran sebesar Rp10.429.400.000 yang dilaksanakan oleh DPUPP dan Dinas Kesehatan (sumber dana DAU, DAK Sanitasi dan DBHCHT)pada 17 Kecamatan.

16. Pembangunan Insfrastruktur Jalan dan Jembatan

Program Infrastruktur jalan tersebar di seluruh kecamatan sebanyak 127 ruas jalan dan pembangunan /pemeliharaan jembatan sebanyak 5 unit dengan total anggaran sebesar Rp154.294.871.540,-.

17. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Irigasi

Program Infrastruktur jaringan irigasi tersebar di seluruh kecamatan melalui pembangunan Saluran Irigasi dan Pembangunan Tanggul Sungai total anggaran sebesar Rp12.260.000.000,-.

18. Penyelenggaraan Jalan dan Tolob (Totop Lobang)

Program penyelenggaraan jalan dan Tolob (Totop Lobang) merupakan program pemeliharaan rutin jalan yang dianggarkan pada 3 UPT Pengelolaan Jalan yaitu UPT Asembagus, UPT Besuki dan UPT Panji dengan total anggaran selama 1 tahun sebesar Rp13.415.200.000. Adapun anggaran yang dialokasikan mulai tahun 2021 sebagai berikut:

Tahun	Anggaran	Panjang Jalan
2021	Rp.268.615.149.036,-	42,540 km
2022	Rp.117.236.119.000,-	40,977 km
2023	Rp.157.935.825.140,-	56,454 km

19. Peningkatan Jalan Dusun Sidomulyo – Dusun Merak Desa Sumber Waru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo (Kawasan Taman Nasional Baluran)

Tahun 2022 telah dilakukan peningkatan jalan dengan kontruksi perkerasan berbutir Lapis Pondasi Batu belah (Telford) lebar 3,00 m, bahu

jalan lebar 1,00 m (kanan & kiri), drainase pasangan batu dan galian tanah lebar 1,00 s/d 2,80 m sepanjang 10,00 km. Jika melihat kondisi masyarakat di Dusun Merak yang merupakan Masyarakat eks HGU Gunitir dengan jumlah lebih kurang 100 jiwa. Dengan kondisi minim sarana prasarana dasar maka dilakukan peningkatan Jalan Makadam menjadi Lapen.

20. Perbaikan Akses Jalan Ke Pelabuhan Jangkar

Akses jalan ke Pelabuhan Jangkar terdapat Panjang jalan 835 m dengan lebar 10 m yang dibangun dengan anggaran bantuan BK dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur senilai Rp.10.000.000.000,-. Sisa Panjang jalan 2.950 km yang belum dilebarkan dengan kondisi lebar jalan eksisting 5 M.

21. Perbaikan Penerangan Jalan Umum

Pengadaan dan pemasangan PJU dianggarkan pada jalan Kabupaten dengan anggaran Rp. 21.526.800.330 (Sumber dana DAU dan DBHCHT). Perkembangan alokasi anggaran perbaikan penerangan jalan umum mulai tahun 2021 sebagai berikut:

Tahun	Anggaran	Unit
2021	Rp. 3.652.532.000,-	525
2022	Rp.14.275.000.000,-	966
2023	Rp.21.526.800.330,-	1.290

22. Program Pupuk Gratis

Ketersediaan Pupuk merupakan problematika petani, disamping harga pupuk non subsidi yang mahal. Program Pupuk Gratis di Kabupaten Situbondo ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi oleh petani. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalokasikan anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- dan POC sebesar Rp.5.000.000.000,-.

23. Pengembangan Bibit Unggul Padi BK Situbondo 01 dan 02 Agritan

Pemberian stimulan bagi petani dalam bentuk bantuan benih sebesar Rp1.000.000.000. Bantuan benih padi BK ini direncanakan sebanyak 60.000 kg untuk alokasi 1.200 hektar. Sedangkan sisanya digunakan untuk Bimbingan Teknis dalam bentuk SL PTT bagi petani dan Farm Field Day (FFD) saat panen raya.

Pemerintah Kabupaten Situbondo mengembangkan bibit unggul padi BK Situbondo 01 dan 02 yang mana memiliki keunggulan sebagai berikut:

Keunggulan Padi BK Situbondo 01 Agritan	Keunggulan Padi BK Situbondo 02 Agritan
Berumur Sangat Genja (75n – 80 HST)	Berumur Genjah (sekitar 80 – 85 HST)
Potensi Hasil 9,83 Ton per Hektar	Potensi Hasil 9,59 Ton per hektar
Rata-rata hasil 8 sampai 9 ton per hektar	Rata-rata hasil sekitar 9 sampai 10 Ton per hektar
Bentuk Gabah Medium	Bentuk Gabah Medium
Tahan terhadap hama	Cukup Tahan terhadap hama
Tahan dan tumbuh dengan baik di lokasi lahan kurang air	Tahan dan tumbuh baik di lokasi lahan yang kurang air

Adapun perbandingan hasil produksi padi konvensional dan padi BK sebagai berikut:

URAIAN	PADI KONVENSIONAL	PADI BK
Produktivitas	5 ton per hektar	8,5 ton per hektar
Pola Tanam Pertahun	3 kali tanam (IP 300)	4 kali tanam (IP 400)
Masa Panen	110 HST	77 – 85 HST

Jika dengan luas areal tanam 38.984 hektar maka surplus produksi padi yang dihasilkan sekitar 460.011 ton dengan perbandingan sebagai berikut:

URAIAN	Padi Konvensional	Padi BK
Gabah	584.760 ton	1.247.488 ton
Beras	350.856 ton	810.867 ton

24. Pengembangan Mangga Arum Merah Situbondo

Mangga Arum merah Situbondo merupakan mangga khas Situbondo dengan citra rasa tersendiri. Berasal dari 1 Induk Tunggal yang berlokasi di Desa BAYEMAN. Dikembangkan menjadi 15 pohon di sekitar pohon induk Tunggal. Pada Tahun 2023 dikembangkan menjadi 4000 pohon. Harapannya dengan pengembangan mangga arum merah Situbondo dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

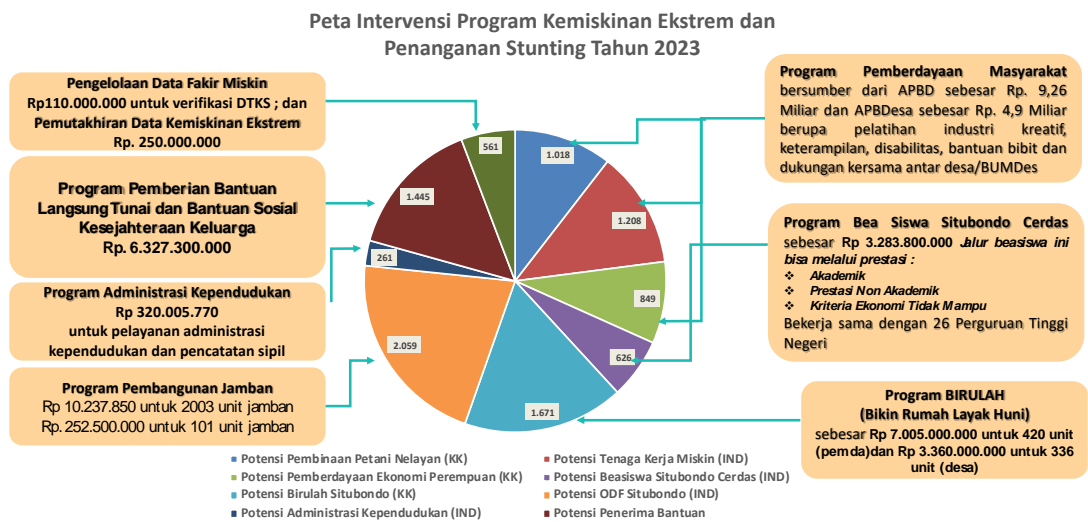
Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19, Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan program antara lain:

- 1. Bantuan Modal Usaha bagi Pengusaha Mikro, khususnya yang terkena dampak diberlakukannya PPKM Level IV
- 2. Bantuan Sembako untuk Masyarakat Miskin terdampak Covid-19

Selain melaksanakan program-program prioritas sebagai strategi penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Situbondo juga melakukan intervensi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem antara lain:

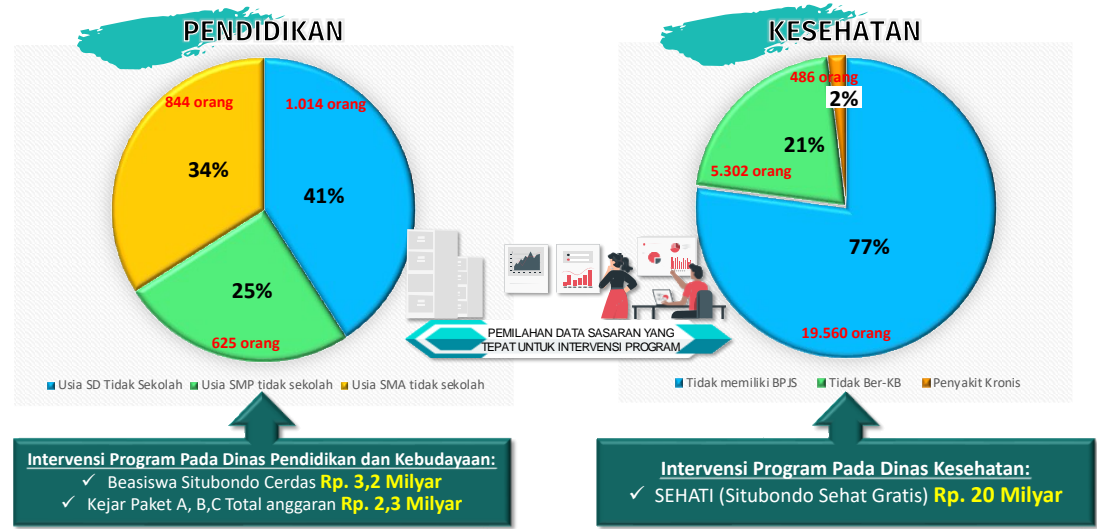
- 1. Intervensi Program Kemiskinan Ekstrem dan Penanganan Stunting

Dasar intervensi program kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting yaitu SK Penetapan Data Kemiskinan Ekstrem 2022 disandingkan dengan penetapan SK Lokus Stunting 2023. Intervensi dilakukan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Beasiswa Situbondo Cerdas, program BIRULAH (Bikin Rumah Layak Huni), Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Pemutakhiran Data Kemiskinan Ekstrem, Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Program Administrasi Kependudukan, dan Program Pembangunan Jamban. Secara rinci sebagai berikut:



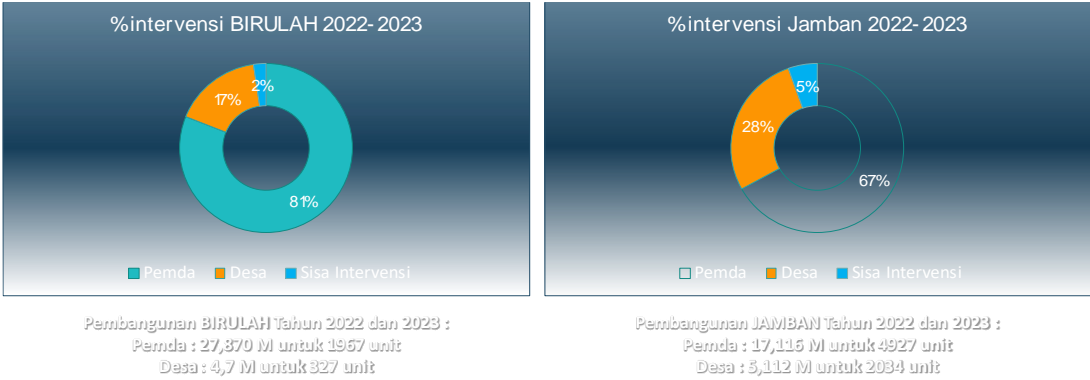
2. Intervensi Pendidikan dan Kesehatan

Intervensi program pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan melalui Beasiswa Situbondo Cerdas dan Kejar Paket A, B, C serta inervensi program pada Dinas Kesehatan melalui SEHATI (Situbondo Sehat Gratis) dengan rincian sebagai berikut:



3. Intervensi Jamban dan BIRULAH (Bikin Rumah Layak Huni) pada masyarakat miskin ekstrem dan lokus stunting

Dasar intervensi SK Bupati Situbondo Nomor : 188/139/P/004.2/2023 tentang Lokasi Fokus Desa/Kel Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023 dan SK Bupati Situbondo Nomor: 188/376/P/001.3/2022 Tentang Data Penduduk Miskin Ekstrem Daerah Kab.Situbondo 2022 Hasil Pemutakhiran Data Program Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan rincian sebagai berikut:



Adapun Program/Kegiatan sampai Sub Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2023 dan capaiannya hingga Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Program/Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2023

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
1	Program Pengelolaan Pendidikan			□	Penambahan Ruang Kelas Baru	DAU	200.000.000	199.113.109	99,56%	1 SD/MI	1 ruang	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai Juli	Tidak ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				□	Pengembangan Sarana dan Prasarana dan utilitas sekolah	DAU dan DAK Fisik	2.759.212.000	1.762.531.701	63,88%	25 SD/MI	masing-masing lembaga 1 unit	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai Desember	Tidak ada	
				□	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	DAU dan DAK Fisik	6.312.270.050	1.950.283.412	30,90%	19 SD/MI	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai September	Tidak ada	
				□	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	DAU dan DAK Fisik	369.391.100	82.825.700	22,42%	4 SD Negeri	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV	Tidak ada	
				□	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	DAU dan DAK Fisik	784.946.100	229.207.732	29,20%	4 SD Negeri	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Desember	Tidak ada	
				□	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	DAK Fisik	810.180.000	267.710.704	33,04%	10 SD Negeri	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV	Tidak ada	
				□	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	DAU dan DAK Fisik	1.258.079.750	472.068.433	37,52%	6 SD Negeri	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				<input type="checkbox"/>	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	DAK Fisik	496.188.000	128.017.549	25,80%	5 SD Negeri	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV	Tidak ada	
				<input type="checkbox"/>	Pengadaan Mebel Sekolah	DAU	1.846.276.196	1.777.126.000	96,25%	43 SD/MI	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai November	Tidak ada	
				<input type="checkbox"/>	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	DAU	320.000.000	0	0,00%	Seluruh Lembaga SD	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Tidak ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	DAU dan DAK Fisik	6.944.850.000	6.892.950.000	99,25%	79 SD/MI	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Mei Oktober	Tidak ada	
		<input type="checkbox"/>			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DAU	85.500.000	78.348.001	91,64%	Siswa	Masing-masing pemenang mendapatkan hadiah bervariasi sesuai dengan juaranya	Dilaksanakan pada Bulan Juni s.d. November	Tidak ada	
				<input type="checkbox"/>	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	DAK Fisik	2.884.245.000	979.178.352	33,95%	13 SD Negeri	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Triwulan III dan Triwulan IV	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub- Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembia- yaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengur- angan Beban penge- luaran Masyar- akat	Pening- katan Penda- patan Masya- rakat	Penurunan Jumlah Kantong- Kantong Kemis-kinan										
		<input type="checkbox"/>			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	DAU	113.500.000	2.083.500	1,84%	Siswa	Masing-masing siswa yang terancam putus sekolah mendapatkan 900,000	Dilaksanakan pada Triwulan II dan Triwulan IV	Tidak ada	
		<input type="checkbox"/>			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DAU	159.994.458	86.926.044	54,33%	Semua lembaga SD dan SMP	dilaksanakan 4 kali sosialisasi	Dilaksanakan pada Triwulan II s.d. Triwulan IV	Tidak ada	
				<input type="checkbox"/>	Pengembang- an Sarana dan Prasarana dan utilitas sekolah	DAU dan DAK Fisik	4.000.000.000	1.765.775.332	44,14%	12 SMP/MTs	Masing-masing lembaga 1 Paket	Dilaksanakan pada Bulan Juni s.d. Desember	Tidak ada	
				<input type="checkbox"/>	Rehabilitasi sedang/bera- t ruang kelas sekolah	DAK Fisik	2.998.413.600	738.677.877	24,64%	5 SMP	Masing-masing lembaga 1 Paket	Dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV	Tidak ada	
				<input type="checkbox"/>	Rehabilitasi sedang/bera- t sarana, prasarana dan utilitas sekolah	DAU dan DAK Fisik	546.222.800	308.450.731	56,47%	5 SMP	Masing-masing lembaga 1 Paket	Dilaksanakan pada Bulan Juni s.d. Desember	Tidak ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	BOS	68.633.600.000	0	0,00%	Seluruh Lembaga SD	Masing-masing lembaga tidak sama	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub- Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembia- yaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengur- angan Beban penge- luaran Masyar- akat	Pening- katan Penda- patan Masya- rakat	Penurunan Jumlah Kantong- Kantong Kemis-kinan										
		<input type="checkbox"/>			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	DAU	10.612.720.000	0	0,00%	seluruh Lembaga Madrasah Diniyah	Masing-masing lembaga tidak sama	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Tidak ada	
				<input type="checkbox"/>	Pengadaan Mebel Sekolah	DAU	1.031.267.700	985.996.343	95,61%	25 SMP	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Triwulan II dan Triwulan IV	Tidak ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	DAU dan DAK Fisik	3.783.683.204	3.637.170.000	96,13%	46 SMP/MTs	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan April sampai Oktober	Tidak ada	
				<input type="checkbox"/>	Pembinaan Kelembagaa n dan Manajemen Sekolah	DAU	2.214.100.903	1.030.717.141	46,55%	Pendidik dan Tenaga Kependidika n	Pelaksanaan sosialisasi masing- masing peserta mendapat bantuan transport 50,000	Dilaksanakan pada Triwulan II s.d. Triwulan IV	Tidak ada	
		<input type="checkbox"/>			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DAU	160.736.955	139.450.297	86,76%	Siswa	Masing-masing siswa bervairiasi dan sesuai juara yang diraihny	Dilaksanakan pada Bulan Juni s.d. November	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban penge-luaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		<input type="checkbox"/>			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DAU	78.277.460	0	0,00%	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan sosialisasi masing-masing peserta mendapat bantuan transport 50,000	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Tidak ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Dana BOP PAUD	BOP Pusat	13.806.600.000	0	0,00%	Seluruh Lembaga jenjang PAUD	Masing-masing lembaga tidak sama sesuai dengan jumlah peserta didiknya	Dilaksanakan pada Bulan Oktober dan November	Tidak ada	
				<input type="checkbox"/>	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	DAU dan DAK Fisik	770.870.400	682.535.675	88,54%	6 lembaga	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai November	Tidak ada	
				<input type="checkbox"/>	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	DAU dan DAK Fisik	784.439.000	339.585.394	43,29%	7 lembaga	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Desember	Tidak ada	
				<input type="checkbox"/>	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	DAK Fisik	432.600.000	81.461.359	18,83%	2 lembaga	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Juli s.d. Desember	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong Kantong Kemiskinan										
		<input type="checkbox"/>			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	DAU	60.000.000	59.507.100	99,18%	2 lembaga	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Triwulan III	Tidak ada	
		<input type="checkbox"/>			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	DAU	88.269.000	18.389.250	20,83%	Lembaga Penerima BOP PAUD	Masing-masing lembaga bervariasi sesuai dengan jumlah siswanya	Dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV	Tidak ada	
				<input type="checkbox"/>	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	DAU	215.000.000	214.288.180	99,67%	2 lembaga	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai Juli	Tidak ada	
				<input type="checkbox"/>	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DAU	260.000.000	255.828.658	98,40%	2 lembaga	Masing-masing lembaga 1 paket	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai Juli	Tidak ada	
				<input type="checkbox"/>	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DAU	50.256.000	0	0,00%	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan sosialisasi masing-masing peserta mendapat bantuan transport 50,000	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		<input type="checkbox"/>			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Pajak Rokok	3.416.850.000	1.325.100.249	38,78%	Mahasiswa	Masing-masing mahasiswa tidak sama dan sesuai besaran UKT masing-masing mahasiswa	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai Desember	Tidak ada	
		<input type="checkbox"/>			Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	DAU	2.067.857.121	976.591.000	47,23%	Warga Belajar	Masing-masing lembaga bervariasi sesuai dengan jumlah warga belajarnya	Dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV	Tidak ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	BOP Pusat	1.737.445.455	0	0,00%	Seluruh Lembaga PKBM	Masing-masing lembaga tidak sama sesuai dengan jumlah peserta didiknya	Dilaksanakan pada Bulan Oktober	Tidak ada	
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional		<input type="checkbox"/>		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	DAU	585.926.110	266.536.491	45,49%	SDM Kesenian Tradisional	Pendidikan dan Pelatihan kepada SDM Kesenian Tradisional sejumlah 25 orang	Dilaksanakan pada Bulan Maret sampai Desember	Tidak Ada	
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan			<input type="checkbox"/>	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pajak Rokok DBHCHT	500.000.000	22.555.180	4,51%	Masyarakat sekitar ponkesdes	Pembangunan Ponkesdes Sumberargo dan Ponkesdes Kampung Merak	Dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV	Tidak Ada	Dinas Kesehatan

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong Kantong Kemiskinan										
	Masyarakat			<input type="checkbox"/>	Pengembangan Puskesmas	Pajak Rokok DBHCHT	1.575.000.000	91.654.695	5,82%	Masyarakat sekitar Puskesmas	Peningkatan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan SDM di 2 Puskesmas agar sesuai standar	Dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV	Tidak Ada	
				<input type="checkbox"/>	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DAU Pajak Rokok	150.000.000	36.215.830	24,14%	Masyarakat sekitar Puskesmas	Pembangunan Fasilitas 3 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	Dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV	Tidak Ada	
				<input type="checkbox"/>	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	DAU DBHCHT	2.285.000.000	170.131.875	7,45%	Masyarakat sekitar Puskesmas	Rehabilitasi dan pemeliharaan pada 3 unit puskesmas	Dilaksanakan pada Semester 2	Tidak Ada	
				<input type="checkbox"/>	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DAU Pajak Rokok DBHCHT	1.975.000.000	386.106.970	19,55%	Masyarakat sekitar Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	Rehabilitasi pada 9 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	Dilaksanakan pada Semester 2	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DBHCHT	1.195.731.000	730.000.000	61,05%	Masyarakat sekitar Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	Penyediaan 10 unit fasilitas pelayanan kesehatan	Dilaksanakan pada Triwulan II dan Semester 2	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub- Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembia- yaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengur- angan Beban penge- luaran Masyar- akat	Pening- katan Penda- patan Masya- rakat	Penurunan Jumlah Kantong- Kantong Kemis-kinan										
		<input type="checkbox"/>			Pengadaan Alat Kesehatan/A lat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DBHCHT DAK Fisik	17.739.596.736	2.716.712.997	15,31%	Masyarakat	Pengadaan Alat kesehatan sejumlah 5 paket pada fasilitas kesehatan	Dilaksanakan pada Triwulan II s.d. Triwulan IV	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengadaan Obat, Vaksin	Pajak Rokok DBHCHT DAK Fisik	4.737.650.320	1.224.539.002	25,85%	Masyarakat	Penyediaan obat dan vaksin untuk fasilitas kesehatan	Dilaksanakan pada Triwulan II s.d. Triwulan IV	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengadaan Bahan Habis Pakai	DAK Fisik DAK Non Fisik	5.524.054.675	991.576.642	17,95%	Masyarakat	Pengadaan alat kesehatan 1 paket pada fasilitas kesehatan	Dilaksanakan pada Bulan Maret sampai Desember	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pajak Rokok DAK Non Fisik	1.476.843.708	854.489.777	57,86%	Masyarakat	Pelayanan kepada 500 orang ibu hamil	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Desember	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pajak Rokok DAK Non Fisik	30.000.000	2.366.000	7,89%	Masyarakat	Pelayanan kepada 500 orang Ibu Bersalin	Dilaksanakan pada Semester 1 dan Triwulan IV	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pajak Rokok DAK Non Fisik	20.000.000	14.360.000	71,80%	Masyarakat	Pelayanan kepada 500 orang Bayi Baru Lahir	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Desember	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	310.318.340	98.075.000	31,60%	Masyarakat	Pelayanan kesehatan kepada 60 Balita	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Desember	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pajak Rokok	724.687.686	262.437.768	36,21%	Masyarakat	Pelayanan kesehatan kepada Anak Usia Pendidikan Dasar sebesar 950 Orang	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Desember	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pajak Rokok	184.683.000	75.721.199	41,00%	Masyarakat	Pelayanan kesehatan kepada 450895 orang yang masuk dalam usia produktif	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Desember	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pajak Rokok DAK Non Fisik	528.424.752	321.740.791	60,89%	Masyarakat	Pelayanan kesehatan kepada 117889 penduduk usia lanjut	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Desember	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pajak Rokok	22.022.000	13.021.680	59,13%	Masyarakat	Pelayanan kesehatan kepada 147164 penderita Hipertensi	Dilaksanakan pada Semester 1 dan Triwulan IV	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub- Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembi- ayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelakasanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengur- angan Beban penge- luaran Masyar- akat	Pening- katan Penda- patan Masya- rakat	Penurunan Jumlah Kantong- Kantong Kemis-kinan										
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pajak Rokok DAK Non Fisik	834.173.000	645.307.446	77,36%	Masyarakat	Pelayanan kesehatan kepada 17386 penderita diabetes melitus	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Desember	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pajak Rokok	202.940.800	121.900.000	60,07%	Masyarakat	Pelayanan kesehatan kepada 1310 orang dengan gangguan jiwa berat	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Desember	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pajak Rokok DAK Non Fisik	2.868.691.160	130.616.400	4,55%	Masyarakat	Pelayanan kepada 425 orang terduga penderita TBC	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Desember	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pajak Rokok DAK Non Fisik	304.651.016	76.994.000	25,27%	Masyarakat	Pelayanan kepada 200 orang terduga pendertia HIV	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Desember	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	APBD KABUPAT EN	1.350.937.336	325.106.415	24,07%	Diberikan kepada 197 KK berupa jamban keluarga	Satu KK bernilai 3.500.000	Dilaksanakan pada Semester 2	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	DAK Non Fisik	68.080.000	0	0,00%	Masyarakat	Pelayanan kesehatan kepada 30 Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pajak Rokok DAK Non Fisik	3.466.082.224	1.497.111.628	43,19%	Masyarakat	Pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sosialisasi kepada penderita penyakit menular dan tidak menular	Dilaksanakan pada Triwulan 2 dan Semester 2	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-DAU -Pajak Rokok - DBHCHT	37.804.857.924	25.817.531.739	68,29%	Masyarakat	Pemberian bantuan pelayanan kesehatan gratis kepada 7903 masyarakat miskin	Dilaksanakan Sepanjang Tahun 2023	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pajak Rokok DBHCHT DAK Fisik DAK Non Fisik	10.241.825.138	5.765.255.008	56,29%	Masyarakat	Pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa paket PMT, Pengadaan Anthropometri Kit, dan alat kedokteran	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai Desember	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pajak Rokok DAK Non Fisik	910.322.970	566.622.456	62,24%	Masyarakat	Sosialisasi kepada kader kesehatan olahraga, pemeriksaan pengemudi Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 dan Pemeriksaan Pengemudi Natal dan Tahun Baru	Dilaksanakan pada Semester 2	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	DAK Non Fisik	1.574.597.016	870.527.388	55,29%	Masyarakat	Penyusunan Dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan sejumlah 1 Dokumen	Dilaksanakan pada Semester 2	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Pajak Rokok	75.000.000	16.960.000	22,61%	Masyarakat	Pembinaan penyehat tradisional oleh tim Binwasdal dan pemanfaatan asman toga	Dilaksanakan pada Semester 2	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub- Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembia- yaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengur- angan Beban penge- luaran Masyar- akat	Pening- katan Penda- patan Masya- rakat	Penurunan Jumlah Kantong- Kantong Kemis-kinan										
		□			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pajak Rokok DAK Non Fisik	357.984.780	129.055.000	36,05%	Masyarakat	PELAKSANAAN SURVEILANS AKTIF RUMAH SAKIT DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SWASTA UNTUK KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA PADA PROGRAM SURVEILANS EPIDEMIOLOGI	Dilaksanakan pada Bulan Juni dan Desember	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub- Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembi- ayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengur- angan Beban penge- luaran Masyar- akat	Pening- katan Penda- patan Masya- rakat	Penurunan Jumlah Kantong- Kantong Kemis-kinan										
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Pajak Rokok DAK Non Fisik	305.213.000	205.847.327	67,44%	Masyarakat	Pelayanan Kesehatan dalam upaya Deteksi Dini Gangguan Indera pada Anak Sekolah dan Upaya Pengendalian dan Penanggulangan Gangguan Indera bagi masyarakat	Dilaksanakan pada Semester 2	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Penyelenggar- aan Kabupaten/ Kota Sehat	Pajak Rokok	300.000.000	56.100.000	18,70%	Masyarakat	Penyusunan Dokumen Forum Kabupaten Sehat Kab. Situbondo Tahun 2023	Dilaksanakan pada Bulan Maret sampai Desember	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Penelitian Kesehatan	DAU Pajak Rokok	627.265.485	0	0,00%	Masyarakat	Kajian akademis terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat bersifat komprehensif dan holistik	Dilaksanakan pada Triwulan 4	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong Kantong Kemiskinan										
		<input type="checkbox"/>			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Pajak Rokok	265.229.800	51.879.800	19,56%	Masyarakat	Penyediaan jasa tenaga kesehatan untuk pelaksanaan program imunisasi	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Desember	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Pajak Rokok	200.000.000	141.615.600	70,81%	Masyarakat	Penanganan kasus gawat darurat yang ditangani PSC119 sejumlah 30 kasus dan Pengelolaan PSC119 yang terintegrasi dengan RSUD dalam satu SPGDT	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Desember	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-DAK Non Fisik -Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi	98.047.400	6.247.080	6,37%	Masyarakat	Intervensi tenaga puskesmas kepada keluarga terkait permasalahan kesehatan sejumlah 50 keluarga	Dilaksanakan pada Triwulan II dan Triwulan IV	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	<input type="checkbox"/>			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pajak Rokok	100.000.000	6.054.800	6,05%	Masyarakat	Sosialisasi dan penyusunan dokumen gerakan masyarakat hidup sehat Kabupaten Situbondo	Dilaksanakan pada Triwulan II dan Triwulan IV	Tidak Ada	
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			<input type="checkbox"/>	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	APBD	200.000.000	180.438.492	90,22%	Petani dan warga Desa Blimbing	Pemasangan bronjong untuk menahan tebing / tanggul sepanjang 26, 79 m	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai November	Dalam proses pengerjaan konstruksi terdapat kendala Pengaturan pembagian air dengan petani	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
				<input type="checkbox"/>	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	APBD	2.900.000.000	362.468.180	12,50%	Petani dan warga Buduan, Tanjung Pecinan dan Sumberwaru	Untuk meningkatkan daya tampung air yang sudah tidak di pergunakan untuk pengairan persawahan sepanjang 590 mtr	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Desember	Dalam proses pengerjaan konstruksi terdapat kendala Pengaturan pembagian air dengan petani	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban penge-luaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				□	Normalisasi/ Restorasi Sungai	APBD	3.300.000.000	279.739.776	8,48%	Petani dan Warga Desa Balung dan Sumberwaru	Untuk mengembalikan fungsi sungai sesuai dengan peruntukan 2.400 meter	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Desember	Dalam proses pengerjaan konstruksi terdapat kendala Pengaturan pembagian air dengan petani	
				□	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	APBD	100.000.000	0	0,00%	Juru Pengairan	Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasa juru dalam melaksanakan tugas di bidang pengairan sebanyak 45 juru	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Pelaksanaan bersamaan dengan tugas mengatur pembagian air terutama di musim kemarau	
				□	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	APBD	2.600.000.000	2.332.947.773	89,73%	Petani dan Warga di wilayah pekerjaan	Untuk mencegah kehilangan air sepanjang saluran 4.570 meter	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Desember	Dalam proses pengerjaan konstruksi terdapat kendala Pengaturan pembagian air dengan petani	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				□	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	APBD	2.420.000.000	1.490.829.377	61,60%	Juri dan PPA	Untuk mempermudah Juru dan PPA dalam melaksanakan tugas sebagai pembagi air pada lahan pertanian Juru 45 orang dan 45 orang	Dilaksanakan pada Bulan Agustus sampai Desember	Distribusi peralatan memerlukan waktu yang tepat terhadap aspek manfaat barang yuang diadakan	
				□	Operasional Unit Pengelola Irigasi	APBD	400.000.000	2.100.000	0,53%	Kelompok HIPPA, GHIPPA dan IHIPPA	Untuk meningkatkan kinerja HIPPA, GHIPP dan IHIPPA dalam memberikan pelayanan kepada petani pemakai air	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Desember	Memerlukan koordinasi lintas sektor dan lintas program	
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			□	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	APBD/D AU	750.000.000	220.746.967	29,43%	94 Rumah Tangga	Mencakup kegiatan pengeboran, jaringan perpipaan, kelistrikan juga SR. Generalisir per SR Rp 7.978.723	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai Desember	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban penge-luaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				□	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	APBD/D AU	140.000.000	0	0,00%	40 Kelompok Masyarakat	Mencakup kegiatan pembinaan dan rangkuman hasil kegiatan pembinaan. Per pelaksanaan kegiatan yaitu Rp 3.500.000 per pokmas	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Harus ada verifikasi kelompok masyarakat yang aktif	
				□	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	APBD/D AU	145.000.000	638.700	0,44%	Berupa 1 dokumen kegiatan aktualisasi data SPAM di desa se-Kabupaten Situbondo	Mencakup kegiatan pembuatan dokumen aktualisasi dan survey jaringan SPAM ke kurang lebih 30 desa di Kabupaten Situbondo. Generalisir Rp 145.000.000	Dilaksanakan pada Triwulan 1 dan Triwulan IV	Tidak semua desa memiliki jaringan SPAM Pedesaan	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				□	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1) APBN/DAK 2) APBD/DAU	8.068.491.000	1.723.895.633	21,37%	Total jumlah sambungan SR 370 rumah tangga	1) Mencakup kegiatan pengeboran, jaringan perpipaan, kelistrikan juga SR. Desa Jatisari Rp. 1.322.173.000; Desa Sopet Rp 3.308.304.000; Desa Sumbertengah Rp 1.562.172.000; Desa Wringin Anom Rp 1.550.842.000; 2) Desa Kalianget Rp 75.000.000; Desa Lubawang Rp 75.000.000; Desa Pesisir Rp 75.000.000; Desa Tlogosari Rp 100.000.000	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Desember	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban penge-luaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
				□	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	APBD/D AU	100.000.000	81.882.644	81,88%	Desa yang membutuhkan perbaikan jaringan pipa perdesaan	Kegiatan berupa pengadaan dan pemasangan pipa. Pipa PVC mof S12.5 diameter 3" 45 lonjor dengan harga pipa generalisir Rp 802.100 per lonjor. Pipa PVC mof S12.5 diameter 2" 119 lonjor dengan harga pipa generalisir Rp 386.300 per lonjor	Dilaksanakan pada Bulan Juli sampai November	Tidak Ada	
				□	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	APBD/D AU	100.000.000	10.577.523	10,58%	Desa yang membutuhkan perbaikan jaringan pipa perdesaan	Kegiatan perbaikan Rp 50.000.000 per desa	Dilaksanakan pada Bulan April sampai Desember	Lokasi dengan kontur ekstrim	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			□	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	APBD/D AU	17.663.300.000	16.497.623.000	93,40%	1.134 Rumah tangga miskin Ekstrim	masing masing penerimaan untuk jamban 3.500.000 per unit	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai November	masih banyak masyarakat miskin ekstrim yang belum menikmati bantuan	
				□	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	APBN/D AK	5.742.720.000	3.957.280.000	68,91%	672 rumah tangga lokus stunting	masing masing penerimaan untuk jamban 8.200.000 per unit	Dilaksanakan pada Semester 2	masih banyak masyarakat lokus stunting yang belum menikmati bantuan	
8	Program Pengembangan Permukiman			□	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	APBD/D AU	4.530.000.000	3.993.728.068	88,16%	Kawasan permukiman yang belum ada akses atau akses dalam keadaan rusak. Total panjang jalan lingkungan 0,467 KM	Desa Pawoan Rp 40.000.000; Desa Tribungan Rp 100.000.000; Kel Dawuhan Rp 40.000.000; Kel Mimbaan RT2/RW10 Rp 40.000.000; Kel Mimbaan Rp 100.000.000; Desa Sliwung Rp 150.000.000, Desa Tenggir Rp 100.000.000; Kel Ardirejo Rp 35.000.000; Kel Mimbaan Rp 200.000.000; Kel Patokan Rp 125.000.000; Kel Ardirejo (RL 246A) Rp 200.000.000;	Dilaksanakan pada Bulan Maret sampai Desember	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban penge-luaran Masyar-akat	Peningkatan Penda-patan Masya-rakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemis-kinan										
											Kel Mimbaan RT6/RW13 Rp 100.000.000; WR Supratman Rp 100.000.000			
9	Program Penyelenggar- aan Jalan			<input type="checkbox"/>	Survey Kondisi Jalan/Jemb- atan	APBD	400.000.000	0	0,00%	Masyarakat	kegiatan dilaksanakan oleh konsultan dengan output dokumen	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Belum ada	
				<input type="checkbox"/>	Rehabilitasi Jalan	APBD	18.805.000.000	6.376.113.380	33,91%	Masyarakat	Perbaikan Infrastruktur guna memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat	Dilaksanakan pada Triwulan II dan Semester 2	Belum ada	
				<input type="checkbox"/>	Pemeliharaa- an Rutin Jalan	APBD	13.320.000.000	8.835.378.842	66,33%	Masyarakat	Perbaikan Infrastruktur guna memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat	Dilaksanakan pada Triwulan II dan Semester 2	Belum ada	
				<input type="checkbox"/>	Rehabilitasi Jembatan	APBD	13.354.960.000	3.270.043.155	24,49%	Masyarakat	Perbaikan Infrastruktur guna memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat	Dilaksanakan pada Triwulan II dan Semester 2	Belum ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	<input type="checkbox"/>			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	APBD	100.000.000	36.794.850	36,79%	Tenaga kerja konstruksi dan anggota Badan Usaha yang belum memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi di Kab. Situbondo	Semakin bertambahnya SDM yang memiliki standart kompetensi yang sesuai pada setiap Badan Usaha di Kab. Situbondo	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai Desember	kurangnya kemampuan SDM secara teknologi dalam proses pelaksanaan pelatihan	
			<input type="checkbox"/>		Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	APBD	25.000.000	12.074.600	48,30%	Penyedia jasa konstruksi maupun pengguna jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Situbondo	Tersedianya basis data dan informasi yang memetakan badan usaha jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi serta memudahkan data bagi para pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi di Kab. Situbondo	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Desember	penyusunan data masih manual atau belum berbasis web	
				<input type="checkbox"/>	Penyediaan Perangkat Pendukung	APBD	75.000.000	0	0,00%	Stake holder penyelenggara jasa	Tersedianya aplikasi database online bagi	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Belum ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong Kantong Kemiskinan										
					Layanan Informasi Jasa Konstruksi					konstruksi	penyelenggara jasa konstruksi di Kab. Situbondo			
11	Program Kawasan Permukiman			□	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	APBD	30.000.000	299.600	1,00%	digunakan untuk BOP penerbitan rekom site plan perumahan	dilaksanakan untuk 5 penerbitan rekom site plan perumahan	Dilaksanakan pada Semester 2	Belum ada	
				□	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	APBD	100.000.000	98.518.900	98,52%	Daerah di SK Kumuh	kegiatan dilaksanakan oleh konsultan dengan output dokumen Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Dilaksanakan pada Bulan Juli sampai Oktober	Belum ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
12	Program Permukiman dan Kawasan Perumahan Kumuh			□	Perbaikan RTLH untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	APBD	644.200.000	643.880.000	99,95%	Rumah tangga miskin Ekstrim sebanyak 42 Penerima bantuan RTLH	masing masing penerima bantuan RTLH 15.000.000	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai Juli	masih banyak masyarakat miskin ekstrim yang belum menikmati bantuan RTLH dan jamban	
13	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			□	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	APBD	100.000.000	0	0,00%	Developer yang belum menyerahkan PSU	100.000.000	Dilaksanakan pada Triwulan IV	masih ada PSU yang belum diserahkan ke Pemda	
				□	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	APBD	250.000.000	231.730.395	92,69%	dilaksanakan di 2 perumahan	250.000.000	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Oktober	masih banyak perumahan yang belum melakukan penyerahan PSU	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban penge-luaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
14	Program Rehabilitasi Sosial	<input type="checkbox"/>			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	APBD Kab/Kota	557.434.550	392.844.204	70,47%	ALAT BANTU: 9 ORG, REHABILITASI : 90 ORANG, PEMBERIAN BLT VETERAN :50 ORANG, PEMBERIAN SANDANG LKSA : 21 PAKET	ALAT BANTU: 2.780.069 , REHABILITASI : PEMBERIAN REHABILITASI, PENELUSURAN KELUARGA , PEMBERIAN BLT VETERAN:600.000 , PEMBERIAN SANDANG LKSA : 7.016.190 /PAKET	Dilaksanakan pada Bulan Juli sampai November	MASIH DALAM PROSES	Dinas Sosial
		<input type="checkbox"/>			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	APBD Kab/Kota	341.880.000	28.988.200	8,48%	BIMBINGAN REHABILITASI: 50 SISWA, PEMEBRIAN ALAT KUE: 50 Orang, Pemberdayaan: 517 Orang	BIMBINGAN REHABILITASI: 50.000, PEMEBRIAN ALAT KUE: 2.999.553/orang , Pemberdayaan: 50.0000/org	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai November	MASIH DALAM PROSES	
		<input type="checkbox"/>			Pemberian Layanan Rujukan	APBD Kab/Kota	820.920.074	342.883.665	41,77%	70 ORANG	PEMBERIAN REHABILITASI DAN LAYANAN RUJUKAN	Dilaksanakan pada Bulan Juli sampai November	MASIH DALAM PROSES	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
15	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	<input type="checkbox"/>			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	APBD Kab/Kota	6.717.839.652	3.043.015.400	45,30%	PAKET SEMBAKO RBR: 22.271 KPM BLT DBHCHT : 3.697 KPM	BANTUAN RBR : Rp. 128.093 BLT DBHCHT: Rp.600.000	Dilaksanakan pada Triwulan 2 dan Semester 2	Tidak Ada	
16	Program Penanganan Bencana	<input type="checkbox"/>			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	APBD Kab/Kota	48.640.000	23.650.000	48,62%	PENYEDIAAN SEMBAKO: 125 Paket	paket sembako senilai: 159.612	Dilaksanakan pada Semester 1 dan Triwulan IV	Tidak Ada	
17	Program Pengelolaan perikanan Tangkap		<input type="checkbox"/>		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	DBHCHT	629.000.000	155.832.128	24,77%	710 Orang Nelayan (4 Kelompok)	104.150.012	Dilaksanakan pada Bulan Januari sampai Desember	Tidak Ada	Dinas Peternakan dan Perikanan
			<input type="checkbox"/>		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	DBHCHT	676.150.000	85.679.381	12,67%	200 Orang Nelayan	506.673.184	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai November	Tidak Ada	
18	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		<input type="checkbox"/>		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	APBD DAU	150.000.000	0	0,00%	20 Orang (2 Kelompok)	125.646.480	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Tidak Ada	
			<input type="checkbox"/>		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	APBD DAU	120.000.000	99.174.350	82,65%	140 Orang (5 Kelompok)	91.829.466	Dilaksanakan pada Semester 2	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub- Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembia- yaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelakasanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengur- angan Beban penge- luaran Masyar- akat	Pening- katan Penda- patan Masya- rakat	Penurunan Jumlah Kantong- Kantong Kemis-kinan										
			<input type="checkbox"/>		Pemberian Pendamping an, Kemudahan an Akses Ilmu Pengetahuan , Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggar aan Pendidikan dan Pelatihan	APBD DAU	55.000.000	1.353.350	2,46%	100 Orang (10 Kelompok)	36.370.540	Dilaksanakan pada Bulan Maret, Juli, dan September sampai November	Tidak Ada	
			<input type="checkbox"/>		Pembinaan dan Pemantauan Pembudiday aan Ikan di Darat	APBD DAU	85.830.000	60.831.000	70,87%	30 Orang	20.750.000	Dilaksanakan pada Bulan April sampai November	Tidak Ada	
			<input type="checkbox"/>		Perencanaan , dan Pengembang an Pemanfaatan Air untuk Pembudiday aan Ikan di Darat	APBD DAU	442.000.000	291.960.500	66,05%	50 Orang	438.263.330	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai November	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong Kantong Kemiskinan										
19	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		<input type="checkbox"/>		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atas standart pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	DAU	42.080.000	23.742.800	56,42%	Nelayan/ Pembudaya ikan	Pembinaan penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan kepada 7 unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai November	Tidak Ada	
			<input type="checkbox"/>		Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	DBHCHT DAU	636.000.000	274.483.831	43,16%	Nelayan/ Pembudaya ikan	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi sebesar 2 ton	Dilaksanakan pada Bulan Maret sampai Desember	Tidak Ada	
20	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<input type="checkbox"/>			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	APBD	15.987.000	358.000	2,24%	OPD dan Instansi Terkait	1 Dokumen	Dilaksanakan pada Triwulan II dan Triwulan IV	Tidak Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub- Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembi- ayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengur- angan Beban penge- luaran Masyar- akat	Pening- katan Penda- patan Masya- rakat	Penurunan Jumlah Kantong- Kantong Kemiskinan										
		<input type="checkbox"/>			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	APBD	28.040.000	18.560.000	66,19%	OPD dan Instansi Terkait	1 Dokumen	Dilaksanakan pada Triwulan II dan Triwulan IV	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pengembang- an Kelembagaa- n dan Jaringan Distribusi Pangan	APBD	33.000.000	4.480.000	13,58%	11 Poktan/Gapo- ktan	Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Distribusi Pangan	Dilaksanakan pada Triwulan II dan Triwulan IV	Tidak Ada	
				<input type="checkbox"/>	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	APBD	221.408.300	0	0,00%	4 Sekolah Dasar/Seder- ajat	Sosialisasi B2SA	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Tidak Ada	
			<input type="checkbox"/>		Pemberdaya- an Masyarakat dalam Penganekara- gaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	APBN dan APBD	393.718.800	83.925.000	21,32%	4 Kelompok Tani/KWT	P2L DAK Non Fisik berupa Bantuan Pemerintah & Pelatihan Tematik; 1 Paket SL GEMPUR PEKARANGAN terdiri dari 5 Kali Tatap Muka	Dilaksanakan pada Triwulan 2 dan Semester 2	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
21	program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		<input type="checkbox"/>		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DAU DBHCHT	18.640.171.808	1.054.370.567	5,66%	Petani	Pengembangan Pertanian Organik, Pengelolaan Kebun Banongan, Pengembangan IP 400, dan Fasilitas Legalitas Pupuk Hayati	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Desember	Tidak Ada	
			<input type="checkbox"/>		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	DAU	2.117.278.280	926.963.749	43,78%	Petani	Pendampingan Bantuan Benih Varietas Unggul Baru dan Pendaftaran HAKI Arum Merah dan Padi BK Situbondo	Dilaksanakan pada Bulan Maret sampai November	Tidak Ada	
				<input type="checkbox"/>	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	DAU DAK Fisik	2.205.410.511	3.840.000	0,17%	Petani	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani sejumlah 11 unit	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Desember	Tidak Ada	
				<input type="checkbox"/>	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	DAU DAK Fisik	1.159.600.000	3.840.000	0,33%	Petani	Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan usaha tani	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai Desember	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub- Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembia- yaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengur- angan Beban penge- luaran Masyar- akat	Pening- katan Penda- patan Masya- rakat	Penurunan Jumlah Kantong- Kantong Kemiskinan										
					n Jalan Usaha Tani									
				□	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Prasarana Pertanian Lainnya	DAU	2.557.989.500	7.040.000	0,28%	Petani	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya sejumlah 6 unit	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai November	Tidak Ada	
22	Program Penyuluhan Pertanian	□	□	□	Pembentuka n dan Penyelenggar aan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	DAU DBHCHT	1.085.009.733	368.998.600	34,01%	Petani	Pembentukan Lapangan Kelompok Tani sejumlah 7 unit	Dilaksanakan pada Bulan Juli sampai Oktober	Tidak Ada	
		□	□		Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	DAU	202.130.000	88.110.800	43,59%	Petani	Peningkatan kelembagaan penyuluhan pertanian 5 unit di kecamatan dan desa	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Desember	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban penge-luaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	DAU	3.199.700	3.199.700	100,00%	Petani	Peningkatan koordinasi Balai Penyuluhan Pertanian	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai Juni	Tidak Ada	
23	Program Penanganan Kerawanan Pangan	<input type="checkbox"/>			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	APBD	31.456.800	19.434.900	61,78%	1 Kelompok Tani	1 Kali Pelatihan Kewirausahaan	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Oktober	Tidak Ada	
24	Program Administrasi Pemerintahan Desa			<input type="checkbox"/>	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	APBD	850.000.000	117.147.400	13,78%	660 Perangkat Desa, 390 orang BPD	Rp. 290.000.000 Perangkat Desa, Rp. 92.000.000 BPD	Dilaksanakan pada Bulan Juli sampai November	Kurangnya Pemahaman dalam proses asistensi dan validasi PKD, Dan kurangnya kemampuan BPD dalam proses pelaksanaan laporan kinereja BPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				<input type="checkbox"/>	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	APBD	3.841.060.480	1.374.648.700	35,79%	BPJS Kesehatan untuk 1619 Perangkat Desa,	- BPJS Kesehatan Rata Rata Rp. 150,198,360 perbulan	Dilaksanakan sepanjang tahun 2023	Validasi data yang kurang maksimal, keterlambatan penyampaian data,	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong Kantong Kemiskinan										
				□	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	APBD dan APBN	220.000.000	80.198.900	36,45%	30 Lembaga/BU Mdesa	Dana Reguler sebesar 200.000.000 dialokasikan untuk pembinaan BUMdesa dan Dana BKK sebesar 20.000.000 untuk pengembangan di 4 lembaga/BUMdesa	Dilaksanakan pada Bulan Maret sampai November	BUMDesa masih belum berbadan, Management Pengelolaan Adminitrasi dan Keuangan masih belum tertib dan benar karena SDM, Kepala Desa Kurang mendukung pengelolaan usaha yang dilakukan oleh BUMDesa.	
25	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			□	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DAU	100.000.000	0	0,00%	Pemerintah Desa	Peningkatan Pendapatan Asli Desa Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Tidak Ada	
			□		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	APBD KAB	2.982.000.000	2.400.257.826	80,49%	173 Keluarga Penerima Manfaat	Bimtek PKK kepada orang dan inisetif RT di lingkungan desa sejumlah 3334	Dilaksanakan pada Triwulan II s.d. Triwulan IV	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban penge-luaran Masyar-akat	Peningkatan Penda-patan Masya-rakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemis-kinan										
					atan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat						orang			
			<input type="checkbox"/>		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DAU	100.000.000	0	0,00%	masyarakat desa setempat	Pemanfaatan teknologi tepat guna hasil fasilitasi pemerintah desa	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Tidak Ada	
			<input type="checkbox"/>		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	DAU	110.000.000	106.685.175	96,99%	Pemerintah Desa	Pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) di Desa	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai Desember	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban penge-luaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
			□		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DAU	1.000.000.000	524.617.690	52,46%	Pemerintah Desa	Fasilitasi TP PKK di Desa dan Kelurahan	Dilaksanakan pada Bulan April sampai Desember	Tidak ada	
26	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		□		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	APBD Kabupaten	365.000.000	353.495.450	96,85%	Diberikan pelatihan serta sosialisasi kepada Pelaku Usaha Mikro sebanyak 185 orang dan kegiatan pagelaran dengan mengikutsertakan 8 desa di kec. Suboh	Kegiatan ini terbagi menjadi 5 kegiatan, 3 kegiatan pelatihan sebesar 76.767.086 yang diberikan untuk peserta berupa bahan percontohan dan bantrans, 1 kegiatan Pagelaran Produk UMKM berupa tersedianya stand pameran sebesar 110.000.000	Dilaksanakan pada Semester 2	Kendala pada 3 kegiatan pelatihan (Terbatasnya waktu pelaksanaan) Kendala pada Pagelaran Produk UMKM (Tempat pelaksanaan yang jauh dari perkotaan, kurangnya daya beli masyarakat sekitar)	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub- Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembi- ayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengur- angan Beban penge- luaran Masyar- akat	Pening- katan Penda- patan Masya- rakat	Penurunan Jumlah Kantong- Kantong Kemiskinan										
			□		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdaya- an Usaha Mikro	APBD Kabupate- n	40.000.000	18.025.200	45,06%	Diberikan sosialisasi serta fasilitasi pembuatan sertifikat tanah sebanyak 350 UM di 16 Desa yang masing- masing desa terdiri dari minimum 10 UM.	Fasilitasi pembuatan Sertifikat Tanah secara Gratis sebanyak 350 UM	Dilaksanakan pada Semester 2	1.Telat dalam pemberkasan 2.Kurang koordinasi antar perangkat desa dengan keluarga 3.Pemasangan patok 4.Sengketa batas tanah	
			□		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausaha- an	APBD Kabupate- n	40.000.000	0	0,00%	Diberikan sosialisasi manajemen UM kepada 35 pelaku UM.	Tidak ada	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
27	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		□		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	APBD Kab/Kota, DBHCHT	2.220.000.000	1.207.251.297	54,38%	601 Pencari Kerja	Kegiatan ini dibagi menjadi 28 Pelatihan yang diperuntukkan untuk 601 orang pencari kerja	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Desember	kesulitan dalam menyusun jadwal karena pelatihan yang dilaksanakan bekerjasama dengan UPTBLK yang memiliki program pelatihan sendiri sehingga dinas ketenagakerjaan harus menyesuaikan dengan jadwal pelatihan yang diselenggarakan dengan UPTBLK	Dinas Ketenagakerjaan
28	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi			□	Penyuluhan Transmigrasi	APBD Kab/Kota	100.000.000	0	0,00%	Warga Resettlemen	Kegiatan dibagi dengan 2 kali pelatihan kepada total 32 orang	Dilaksanakan pada Bulan Desember	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong Kantong Kemiskinan										
29	Program Penempatan Tenaga Kerja		□		Perluasan Kesempatan Kerja	APBD Kab/Kota	190.000.000	187.450.876	98,66%	Diberikan kepada 25 peserta pelatihan	Kegiatan dibagi menjadi dua pelatihan yaitu Pelatihan Tata Rias dan Pelatihan Membatik	Dilaksanakan pada Bulan Triwulan II s.d. Triulan IV	Tidak Ada	
30	Program Hubungan Industrial	□			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	APBD Kab/Kota	183.386.400	68.843.000	37,54%	Perusahaan se Kabupaten Situbondo	Tidak ada bantuan yang diberikan	Dilaksanakan pada Bulan Maret sampai Desember	Minimnya pengetahuan SDM di perusahaan tentang perundang-undangan	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban penge-luaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
			□		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	APBD Kab/Kota	70.875.000	33.789.600	47,67%	Perusahaan se Kabupaten Situbondo	Tidak ada bantuan yang diberikan	Dilaksanakan pada Bulan Maret sampai November	Mediator belum berfungsi sebagaimana mestinya	
			□		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	APBD Kab/Kota	37.280.000	10.250.000	27,49%	Lembaga Kerja Sama Tripartit Kab. Situbondo	Tidak ada bantuan yang diberikan	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai November	SDM anggota lembaga kurang kompatibel dengan kondisi saat ini	
31	Program Pendaftaran Penduduk	□			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	DAU	35.588.520	34.779.808	97,73%	Masyarakat	Masyarakat memiliki dokumen kependudukan	Dilaksanakan Sepanjang Tahun 2023	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendaftaran Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		<input type="checkbox"/>			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DAU	47.356.490	36.448.351	76,97%	Masyarakat	Masyarakat memiliki dokumen kependudukan	Dilaksanakan Sepanjang Tahun 2023	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	
32	Program Pencatatan Sipil	<input type="checkbox"/>			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	DAU	46.221.710	6.075.000	13,14%	Masyarakat	Masyarakat memiliki dokumen pencatatan sipil	Dilaksanakan Sepanjang Tahun 2023	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	
		<input type="checkbox"/>			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	DAU	38.067.800	26.461.164	69,51%	Masyarakat	Masyarakat memiliki dokumen pencatatan sipil	Dilaksanakan Sepanjang Tahun 2023	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		<input type="checkbox"/>			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	DAU	13.760.000	4.500.000	32,70%	Masyarakat	Masyarakat memiliki dokumen pencatatan sipil	Dilaksanakan pada Semester II	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	
		<input type="checkbox"/>			Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	DAU	45.713.800	0	0,00%	Masyarakat	Masyarakat mengetahui akan penting Akte Kematian	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Kurangnya kesadaran akan pentingnya akte kematian	
33	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<input type="checkbox"/>			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	DAU	52.963.010	24.664.800	46,57%	OPD dan Kecamatan	OPD dan Kecamatan mengetahui pelaksanaan adminduk	Dilaksanakan pada Bulan Mei sampai Desember	untuk mengolah dan penyajian data Adminduk per semester harus menunggu data PDAK dari Kemendagri (Dirjen Dukcapil)	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong Kantong Kemiskinan										
		<input type="checkbox"/>			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	DAU	6.193.100	500.000	8,07%	OPD	untuk OPD bekerjasama dg Dukcapil Pusat mengetahui kebenaran NIK	Dilaksanakan pada Bulan Agustus sampai Oktober	untuk kerjasama dengan OPD harus di kirim ke pusat untuk mendapatkan persetujuan	
		<input type="checkbox"/>			Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	DAU	25.655.100	0	0,00%	Masyarakat	Mempercepat kepemilikan adminduk di masyarakat	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	
		<input type="checkbox"/>			Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	DAU	86.048.240	19.556.220	22,73%	masyarakat	Meningkatkan kepemilikan adminduk masyarakat	Dilaksanakan pada Bulan Juni sampai November	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	
		<input type="checkbox"/>			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	DAU	13.068.700	0	0,00%	OPD	Tersedianya data perkembangan dan proyek kependudukan	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Sulitnya koordinasi permintaan data dengan OPD Lain	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban penge-luaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
34	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	APBD Kab/Kota	240.260.375	238.957.098	99,46%	20 orang desa blimbing, 20 orang desa wedoro payung, 20 orang desa kendit dan 26 orang desa ketowan arjasa	964.956/org desa blimbing 989.173/org desa wedoro payung, 1.116.203/org kendit dan 1.487.83/org5desa ketowan arjasa	Dilaksanakan pada Bulan Maret dan April sampai Agustus	Tidak Ada	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<input type="checkbox"/>		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	APBD Kab/Kota	77.573.190	46.239.350	59,61%	44 OPD se kabupaten situbondo	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG pada 43 Perangkat Daerah	Dilaksanakan pada Bulan Mei, Juni dan November	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub- Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembia- yaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengur- angan Beban penge- luaran Masyar- akat	Pening- katan Penda- patan Masya- rakat	Penurunan Jumlah Kantong- Kantong Kemis-kinan										
		□			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdaya an Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	APBD Kab/Kota	510.483.325	300.072.404	58,78%	40 orang desa trebungan mangaran,15 orang desa klampokan panji,25 orang sumbermala ng,25 orang kilensari panarukan,2 2 Orang curah tatal arjasa Kegiatan PUSPA sasarannya anggota PUSPA	1.050.964/org u mangaran,965.470 -/Org u klampokan,1.119. 350/org u sumbermalang,1.4 50.494/org u kilensari dan 1.469.745/org u curah tatal arjasa	Dilaksanakan pada Bulan Februari, Maret dan Mei sampai Oktober	Belum optimalnya fungsi Forum PUSPA untuk kesejahteraan perempuan dan anak dan kurangnya sosialisasi Forum PUSPA di masyarakata	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong Kantong Kemiskinan										
35	Program Perlindungan Perempuan	□			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	APBN, APBD Kab/Kota	115.796.380	60.279.753	52,06%	Perempuan yang menjadi Korban tindak Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual, KDRT, Penelantaran dll.	terdapat 24 Perempuan yang mengalami Tindak Kekerasan hingga bulan Juni 2023 telah menerima 6 Fungsi Layanan UPT PPA, mendapat Bantuan Sembako serta penyaluran bantuan spesifik Pemulihan Korban	Dilaksanakan pada Bulan Maret sampai November	pada saat melakukan pemesanan barang melalui sebuah aplikasi dinilai cukup lama dan perlu sering berkoordinasi guna mempercepat pemrosesan sehingga pelaksanaan penyaluran sembako juga mengalami sedikit keterlambatan dan kurang meratanya pemberian sembako terhadap korban	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong Kantong Kemiskinan										
37	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		<input type="checkbox"/>		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	APBD Kab/Kota	65.600.000	44.137.650	67,28%	OPD terkait KLA	17 kecamatan, 136 desa bisa menerapkan Dekelara dan kelana	Dilaksanakan pada Bulan Januari sampai Oktober	Desa dan kecamatan belum sepenuhnya memahami KLA	
		<input type="checkbox"/>			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	APBD Kab/Kota	50.000.000	31.692.850	63,39%	Forum Anak	5 kali kegiatan yang dilaksanakan baik ditingkat kecamatan maupun desa	Dilaksanakan pada Bulan Januari sampai Oktober	Forum anak kecamatan masih belum aktif dan masih tidak mengetahui kegiatan apa yang akan dilaksanakan di kecamatan	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong Kantong Kemiskinan										
38	Program Perlindungan Khusus Anak	<input type="checkbox"/>			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	DAK Non Fisik	54.850.000	0	0,00%	Lintas sektor dan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap Anak	OPD dan linsek mengetahui pentingnya pencegahan kekerasan thd anak	Dilaksanakan pada Triwulan IV	tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		□			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	APBN, APBD Kab/Kota	179.912.380	72.679.421	40,40%	Anak dari Usia 0 hingga 17 Tahun yang menjadi Korban tindak Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual, Penganiayaan dll.	terdapat 17 Anak yang mengalami Tindak Kekerasan hingga bulan Juni 2023 telah menerima 6 Fungsi Layanan UPT PPA, mendapat Bantuan Sembako serta penyaluran bantuan spesifik Pemulihan Korban	Dilaksanakan pada Bulan Maret sampai November	pada saat melakukan pemesanan barang melalui sebuah aplikasi dinilai cukup lama dan perlu sering berkoordinasi guna mempercepat pemrosesan sehingga pelaksanaan penyaluran sembako juga mengalami sedikit keterlambatan dan kurang meratanya pemberian sembako terhadap korban	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban penge-luaran Masyar-akat	Peningkatan Penda-patan Masya-rakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemis-kinan										
		☐			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	DAU dan DAK Non Fisik	74.595.400	64.792.235	86,86%	Tokoh Masyarakat, tokoh agama, masyarakat Situbondo	meningkatkan pemahaman masyarakat baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten tentang pentingnya pencegahan kekerasan thd anak	Dilaksanakan pada Bulan April sampai Oktober	tidak ada	
39	Program Pengendalian Penduduk			☐	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DAK Non Fisik	197.400.000	93.963.531	47,60%	Penyuluh KB	Sosialisasi Aplikasi New Siga yang diberikan kepada para penyuluh KB	Dilaksanakan pada Bulan April sampai Oktober	Tidak Ada	
40	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	☐			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DAU DAK Non Fisik	1.704.934.000	1.034.829.969	60,70%	Masyarakat	Kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sejumlah 1216 orang	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai April dan Semester 2	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub- Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembia- yaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengur- angan Beban penge- luaran Masyar- akat	Pening- katan Penda- patan Masya- rakat	Penurunan Jumlah Kantong- Kantong Kemis-kinan										
		<input type="checkbox"/>			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	DAU	17.000.000	0	0,00%	Masyarakat	Penyediaan jasa pelayanan dokter untuk penanganan perempuan/anak dan Keluarga Berencana	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Tidak Ada	
		<input type="checkbox"/>			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejingnya	DAK Non Fisik	24.300.000	12.322.000	50,71%	Masyarakat	Pelaporan hasil pembinaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi sejumlah 46 laporan	Dilaksanakan pada Bulan April sampai November	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
41	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	□			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DAU	12.305.805	680.000	5,53%	Masyarakat	Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Dilaksanakan pada Triwulan II dan Triwulan IV	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
42	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			□	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	APBD Kab/Kota	25.000.000	18.555.600	74,22%	200 peserta balik mudik gratis dan 16 peserta kru bus balik mudik gratis	makan minum untuk peserta balik gratis sebesar Rp 8.000.000, makan minum untuk kru bus balik gratis sebesar Rp 640.000, Jasa pendamping tenaga supir sebesar Rp 976.200, sewa meja kursi dan tenda untuk peserta balik gratis sebesar Rp 4.104.000, sewa sound system sebesar Rp 2.044.000	Dilaksanakan pada Bulan April sampai Oktber	Tidak ada Kendala	Dinas Perhubungan

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong Kantong Kemiskinan										
43	Program Pengelolaan Pelayaran			□	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	APBD Kab/Kota	77.495.784	62.146.600	80,19%	masyarakat pengguna pelabuhan	Pengadaan tablet, pc dan printer sebagai perangkat ticketing sebesar Rp 53.495.784; Pembuatan aplikasi ticketing oleh narasumber sebesar Rp 19.000.000; Lembur dan mamin penjaga posko lebaran dan nataru sebesar Rp 5.000.000	Dilaksanakan pada Bulan April dan Desember	Tidak ada Kendala	
44	Program Pembinaan Perpustakaan		□		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	APBD	25.000.000	16.278.250	65,11%	Pelajar	Menumbuhkan minat baca dan mengenalkan perpustakaan kepada pelajar	Dilaksanakan pada Semester 2	Kurangnya respon dari OPD terkait, perencanaan pelaksanaan kegiatan yang kurang matang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		☐			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	APBD	111.096.525	67.327.550	60,60%	Seluruh masyarakat	Menumbuhkan minat baca masyarakat	Dilaksanakan pada Bulan Januari sampai November	Terbatasnya koleksi yang dimiliki	
		☐			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	APBD	50.042.662	23.220.000	46,40%	Seluruh masyarakat	Meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan melalui pembaruan/update dan keberagaman koleksi bacaan	Dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Desember	Terbatasnya kerjasama dengan penerbit, kurangnya tenaga teknis pengelola bahan pustaka	
45	Program Penanggulangan Bencana	☐			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	APBD Kab/Kota	150.000.000	72.594.000	48,40%	Diberikan Kepada Korban Terdampak Bencana di Kabupaten Situbondo	Logistik yang disediakan berupa 600 paket bahan pangan/sembako yang diperuntukan bagi korban bencana	Dilaksanakan pada Triwulan 2 dan Semester 2	- Terbatasnya jumlah dan jenis logistik - Terbatasnya Kendaraan Operasional Pendukung distribusi logistik - kondisi gudang yang kurang memadai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban penge-luaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
		☐			Pencarian, Pertolongan, dan evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	APBD Kab/Kota	75.000.000	13.178.250	17,57%	Korban Terdampak Bencana di Kabupaten Situbondo	Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menolong korban terdampak kekeringan melalui dropping air bersih serta mendukung upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana lainnya	Dilaksanakan Sepanjang Tahun 2023	- Terbatasnya Mobil Rescue - Lokasi Kejadian Bencana yang jauh dan sulit diakses - Terbatasnya Peralatan Rescue dan Pengungsian	
46	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			☐	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	DAU	270.000.000	157.706.600	58,41%	Masyarakat	Sebagai Sekretariat TKPKD Kab. Situbondo untuk mengoordinasikan Perangkat Daerah yang berperan dalam program penanggulangan kemiskinan	Dilaksanakan sepanjang Bulan Januari s.d. Desember	Tidak Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				☐	Koordinasi	DAU	600.000.000	423.810.178	70,64%	Masyarakat	Pendataan	Dilaksanakan	Tidak Ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban pengeluaran Masyarakat	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan										
					Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						Penduduk Miskin Ekstrem Kab. Situbondo Tahun 2023 sebagai upaya penyediaan data BNBA dalam penanggulangan kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran	pada Triwulan I dan II		
47	Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif		□		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	DAK NON Fisik DAU	647.372.000	172.301.750	26,62%	Pelaku usaha Ekraf sebanyak 80 peserta	mendapatkan uang bantuan transport 200.000 dan tas pelatihan	Dilaksanakan pada bulan Agustus dan september	Tidak Ada	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
48	Program Informasi dan Komunikasi Publik			□	Pelayanan Informasi Publik	DAU	21.661.000	4.760.000	21,97%	Masyarakat	Pelayanan Informasi kepada Masyarakat	Dilaksanakan Pada Januari sampai dengan Desember	Tidak ada	Dinas Komunikasi dan Infromatika
49	Program Aplikasi Informatika			□	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah berbasis Elektronik	DAU	51.550.000	13.464.900	26,12%	Masyarakat	Pelayanan Informasi kepada Masyarakat	Dilaksanakan Pada Januari sampai dengan Desember	Tidak ada	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Kendala Pelaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pengurangan Beban penge-luaran Masyar-akat	Peningkatan Penda-patan Masya-rakat	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemis-kinan										
50	Program Penanggulan- gan Bencana	□			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	DAU E-MARK	1.198.011.300	629.000.000	52,50%	Tenaga Banpol dan Masyarakat	Honor Bulanan Banpol POLPP dan bantuan transpot pelatihan sebanyak 60 Orang	Dilaksanakan pada Bulan Juli Sampai September	Tidak ada	Satuan Polisi Pamong Praja
		□			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	DAU	13.500.000	13.500.000	100,00%	Pengiriman bantuan tenaga Tim reaksi cepat penanggulan- gan bencana Satpolpp	Bantuan Transpot Petugas	Dilaksanakan pada Bulan Januari Sampai Oktober	Tidak ada	

BAB IV

RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN 2024

4.1 STRATEGI DAN RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

Strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Situbondo sudah tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah periode tahun 2022 – 2026 dan terintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo periode tahun 2021 – 2026 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Situbondo yaitu membangun masyarakat Situbondo sehat, cerdas dan meningkatkan peran perempuan serta membangun infrastruktur, ekonomi, dan berdaya saing.

Kondisi kemiskinan Kabupaten Situbondo dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran dan kualitas implementasi program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan. Proyeksi penurunan tingkat kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Situbondo sesuai dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2022-2026 adalah menurunkan angka kemiskinan sampai dengan 11,39-11,04% sesuai dengan target RPJMD.

Strategi dan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2024 disusun sesuai dengan Tema RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2024 yaitu “Memantapkan Stabilitas Sosial dan Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah secara Integratif, Kolaboratif dan Inovatif”. Arah kebijakan Kabupaten Situbondo tahun 2024 terkait dengan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan arah kebijakan nasional dan provinsi sebagai berikut:

Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur	Arah Kebijakan Kabupaten Situbondo
Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Mengentaskan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal

Pada arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 yaitu Pengetasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dijawab oleh 15 program intervensi daerah. Dari 15 program intervensi daerah tersebut selanjutnya akan dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur, dan sub kegiatan nomenklatur. 15 program intervensi daerah tersebut antara lain:

- 1) Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- 2) Program perekonomian dan pembangunan
- 3) Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- 4) Program perlindungan dan jaminan sosial
- 5) Program administrasi pemerintahan desa
- 6) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- 7) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

- 8) Program penempatan tenaga kerja
- 9) Program pendidikan dan latihan perkoperasian
- 10) Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)
- 11) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- 12) Program pemberdayaan sosial
- 13) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
- 14) Program rehabilitasi sosial
- 15) Program penanganan bencana
- 16) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 17) Program pengelolaan persampahan

Berikut adalah adalah program intervensi daerah yang dijawab oleh program nomenklatur, kegiatan nomenklatur dan sub kegiatan nomenklatur pada arah kebijakan Pengetasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal:

PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	DISKOPERINDAG
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	DISKOPERINDAG
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	DISKOPERINDAG
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	DISKOPERINDAG
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	DISKOPERINDAG
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam)
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BAPPEDA
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL

PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
SOSIAL		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DINAS SOSIAL
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan RTLH untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	DINAS PUPP
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALO) setempat	DINAS PUPP
Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DLH
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	DLH
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLH
Program pengelolaan persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	DLH
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	DLH
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	DLH
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DINAS KETENAGAKERJAN
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	DINAS KETENAGAKERJAN
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	DISKOPERINDAG

PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)	KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	SUB-KEGIATAN PRIORITAS (NOMENKLATUR)	PD PENGAMPU
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	DISKOPERINDAG
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	DISKOPERINDAG
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	DISKOPERINDAG
PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DP3AP2KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	DINAS SOSIAL
	NAPZA di Luar Panti Sosial	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	DINAS SOSIAL
		Pemberian Layanan Rujukan	DINAS SOSIAL
		Penyediaan Sandang	DINAS SOSIAL
		Pemberian Layanan Kedaruratan	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	DINAS SOSIAL
		Penyediaan Makanan	DINAS SOSIAL
		Penyediaan Sandang	DINAS SOSIAL

Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Situbondo yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2022-2026 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan wirausaha baru milenial untuk masyarakat miskin
2. Pelatihan wirausaha perempuan untuk peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin
3. Pinjaman lunak model usaha perempuan dari rumah tangga miskin

4. Bantuan pengembangan UMKM untuk masyarakat miskin
5. Peningkatan kerjasama dengan organisasi perempuan dan organisasi keagamaan mengenai penyadaran terhadap pendewasaan usia pernikahan
6. Sosialisasi pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi
7. Intervensi mengenai pencegahan pernikahan dini dan Kampung KB melalui BKKBN
8. Program penyadaran terhadap masyarakat mengenai praktik sumbangan
9. Beasiswa Situbondo Cerdas untuk masyarakat miskin
10. Bantuan Operasional Pendidikan Dasar untuk masyarakat miskin
11. Peningkatan dan pemeratan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
12. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
13. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan (pesantren)
14. Peningkatan kesejahteraan pengajar di pendidikan keagamaan (pesantren)
15. Penguatan komitmen pemerintah dan stakeholder terkait untuk menyelesaikan masalah anak putus sekolah melalui gerakan yang diformalkan
16. Pemetaan program dan sumber pembiayaan untuk penurunan angka putus sekolah
17. Mengidentifikasi akar masalah putus sekolah di setiap wilayah dan menetapkan intervensi berdasarkan akar masalah di masing-masing wilayah
18. Menyusun kebijakan dan melaksanakan kampanye pentingnya pendidikan dasar
19. Meningkatkan peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk sosialisasi pencegahan anak putus sekolah, terutama intervensi untuk penyadaran masyarakat terkait faktor sosial dan kultural yang menyebabkan anak putus sekolah
20. Program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan
21. Program Situbondo Sehat Gratis (SEHATI)
22. Program Peningkatan Akses Sanitasi dan Air Bersih bagi Rumah Tangga Miskin
23. Program Peningkatan Akses Listrik bagi Masyarakat Miskin
24. Program Bangun Rumah Layak Huni (Birulah) untuk masyarakat miskin
25. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan kabupaten penghubung antar kecamatan, desa dan tempat pengembangan ekonomi, pertanian, dan pariwisata.
26. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur penunjang ekonomi, pertanian dan pariwisata
27. Program pengembangan destinasi pariwisata yang melibatkan masyarakat miskin
28. Pembinaan dan Bantuan untuk Peningkatan produktifitas dan pengendalian stabilitas hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan
29. Program pengembangan sektor pertanian yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan tambahan penghasilan bagi penduduk miskin
30. Pembangunan Kawasan Unggulan Minapolitan dan Agropolitan

31. Program *updating* data, peningkatan kualitas data, dan pemanfaatan data secara terpadu (penyiapan basis data terpadu untuk penetapan sasaran dan penentuan evaluasi)
32. Program pelatihan tenaga lapangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendataan, baik dalam proses pengambilan data, monitoring dan evaluasi ketika pengambilan data, proses *input data*, dan *cleaning data*
33. Program pengembangan basis data kemiskinan di tingkat desa yang terintegrasi dengan Data Perencanaan di tingkat kabupaten
34. Program pengadaan sarana sistem informasi data kemiskinan untuk Data Perencanaan
35. Program peningkatan kapasitas tim TKPKD
36. Program penguatan kemitraan pemerintah, dunia usaha, CSR, dan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya detil Rencana Aksi tahunan dan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2024 per sektor/urusan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matriks Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	APBD (DAU)	113.500.000	Beberapa Desa di Kabupaten Situbondo	110 Siswa SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APBD (BOS REGULER DAN BOS KINERJA)	43.505.646.576	Seluruh Desa se Kabupaten Situbondo	Seluruh Lembaga SD Negeri/Swasta se Kabupaten Situbondo	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	APBD (DAU)	2.600.000.000	Seluruh Desa se Kabupaten Situbondo	Seluruh Lembaga SD Negeri se Kabupaten Situbondo	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	APBD (DAU)	155.380.000	Beberapa Desa di Kabupaten Situbondo	98 Siswa SMP	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APBD (BOS REGULER DAN BOS	24.158.753.424	Seluruh Desa se Kabupaten Situbondo	Seluruh Lembaga SMP Negeri/Swasta se Kabupaten	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
						KINERJA)			Situbondo	
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	APBD (DAU)	5.309.484.110	Seluruh Desa se Kabupaten Situbondo	Seluruh Madrasah Diniyah se Kabupaten Situbondo	
7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	APBD (DAU)	150.000.000	Seluruh Desa se Kabupaten Situbondo	Seluruh siswa PAUD se Kabupaten Situbondo	
8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√			Pengelolaan Dana BOP PAUD	APBD (BOP PAUD REGULER DAN BOP PAUD KINERJA)	12.928.800.000	Seluruh Desa se Kabupaten Situbondo	Seluruh Lembaga PAUD Negeri/Swasta se Kabupaten Situbondo	
9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik NonFormal/Kesetar aan	APBD (PAJAK ROKOK)	3.283.800.000	Seluruh Desa se Kabupaten Situbondo	155 masyarakat	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
10	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	APBD (BOP PAUD REGULER DAN BOP PAUD KINERJA)	2.370.000.000	Seluruh Desa se Kabupaten Situbondo	Seluruh Lembaga PKBM se Kabupaten Situbondo	
11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	APBD (DAU)	1.470.626.425	Seluruh Desa se Kabupaten Situbondo	460 Warga Belajar (WB)	
12	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			√	Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas sekolah	APBD (DAU DAN DAK FISIK)	1.995.000.000	Beberapa Desa di Kabupaten Situbondo	18 Lembaga SD	
13	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			√	Pembangunan Ruang Kelas Baru	APBD (DAU DAN DAK FISIK)	692.276.000	Beberapa Desa di Kabupaten Situbondo	3 Lembaga SD	
14	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			√	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	APBD (DAU DAN DAK FISIK)	344.874.000	Beberapa Desa di Kabupaten Situbondo	1 Lembaga SD	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
15	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			√	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	APBD (DAU DAN DAK FISIK)	7.857.458.000	Beberapa Desa di Kabupaten Situbondo	7 Lembaga SD/ sederajat	
16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			√	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APBD (DAU DAN DAK FISIK)	820.000.000	Beberapa Desa di Kabupaten Situbondo	8 Lembaga SMP/ Sederajat	
17	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			√	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	APBD (DAU DAN DAK FISIK)	2.384.320.000	Beberapa Desa di Kabupaten Situbondo	3 Lembaga SMP/ sederajat	
18	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			√	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	APBD (DAU DAN DAK FISIK)	393.236.000	Beberapa Desa di Kabupaten Situbondo	3 Lembaga SMP	
19	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			√	Pembangunan Ruang Kelas Baru	APBD (DAU DAN DAK FISIK)	341.990.000	Beberapa Desa di Kabupaten Situbondo	1 Lembaga SMP	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
20	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		√		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APBD (DAU)	24.806.567.290	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Situbondo	Guru Ngaji, Guru Minggu, Guru PAUD, dan Guru Pendidikan dasar Non ASN	
21	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		√		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	APBD (DAU)	380.000.000	Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji	15 Orang	
22	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	APBD (DAU dan BKK)	148.047.400	Patokan (Dinas Kesehatan)	1440 keluarga dan 213 perawat	Dinas Kesehatan

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Kesehatan Masyarakat									
23	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	APBD (DAU, DBHCHT, Pajak Rokok)	260.000.000	Patokan (Dinas Kesehatan)	10,038 ibu hamil	
24	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	APBD (pajak rokok dan Dak Non Fisik)	133.146.450	Patokan (Dinas Kesehatan)	10.309 orang	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
25	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	APBD (pajak rokok dan Dak Non Fisik)	23.760.000	Pusk Wonorejo, Banyuputih,, Asembagus,Jangkar, Arjasa, Kapongan, Panji, klampokan, mangaran Sit, panarukanKendit, Mlandingan, Bungatan,Suboh Besuki, Banyuglugur, sumbermalang, jatibanteng	10.016 bayi	
26	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	APBD (Pajak Rokok)	30.976.000	Patokan (Dinas Kesehatan)	37.695 orang	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
27	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	APBD (Pajak Rokok)	105.523.902	Patokan (Dinas Kesehatan)	78.449 anak	
28	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	APBD (Pajak Rokok)	49.689.500	Patokan (Dinas Kesehatan)	447.741 orang	
29	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	APBD (Pajak Rokok)	118.033.811	136 desa	700 kotak PMT lansia	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	dan Upaya Kesehatan Masyarakat									
30	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	APBD (Pajak Rokok dan DAU)	313.290.000	Patokan (Dinas Kesehatan)	148.292 orang	
31	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	APBD (pajak rokok dan Dak Non Fisik)	1.122.765.570	Patokan (Dinas Kesehatan)	15.508 orang	
32	Program Pemenuhan	√			Pengelolaan Pelayanan	APBD (Pajak Rokok)	47.650.000	Patokan (Dinas Kesehatan)	1325 orang	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
33	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	APBD (pajak rokok dan Dak Non Fisik)	1.191.016.400	Patokan (Dinas Kesehatan)	9.473 orang	
34	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	APBD (pajak rokok dan Dak Non Fisik)	227.900.181	Patokan (Dinas Kesehatan)	12.271 orang	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Masyarakat									
35	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	APBD (Pajak Rokok, DBHCHT, DAK Non Fisik, DAK Fisik)	1.544.550.000	Kapongan, Jatibanteng,Besuki, Suboh, Malndingan, Bungatan, Kendir,Panji, Jangkar, Arjasa	485 Kelompok masy	
36	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	APBD (DAK NON FISIK)	85.977.012	Patokan (Dinas Kesehatan)	20 Puskesmas	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
37	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	APBD (DAU, DAK Non fisik, Pajak Rokok)	2.010.655.695	Patokan (Dinas Kesehatan)	750 orang untuk sunatan massal, 252 box PMT bagi penderita penyakit menular, 1500 orang yang di skrening katarak dan 200 orang untuk operasi katarak	
38	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	APBD (Pajak Rokok, DAU dan DBHCHT)	34.500.000.000	Patokan (Dinas Kesehatan)	peserta PBI daerah sebanyak 41,503 orang dan sasaran Sehati 17.715 orang	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
39	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	APBD (DAK NON FISIK)	1.051.672.170	Pusk Wonorejo, Banyuputih,, Asembagus,Jangkar, Arjasa, Kapongan, Panji, klampokan, mangaran Sit, panarukanKendit, Mlandingan, Bungatan,Suboh Besuki , Banyuglugur, sumbermalang, jatibanteng	10.322 ibu hamil	Puskesmas
40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	APBD (DAK NON FISIK)	50.653.282	puskesmas widoropayung dan Pusk panji	1.080 orang	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
41	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	APBD (DAK NON FISIK)	572.121.086	Pusk Wonorejo, Banyuputih,, Asembagus,Jangkar, Arjasa, Kapongan, Panji, klampokan, mangaran Sit, panarukanKendit, Mlandingan, Bungatan,Suboh Besuki , Banyuglugur, sumbermalang, jatibanteng	78.449 anak	
42	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	APBD (DAK NON FISIK)	8.925.000	Puskesmas kapongan	25.948 orang	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
43	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	APBD (DAK NON FISIK)	49.000.000	Pusk Wonorejo, Banyuputih,, Asembagus,Jangkar, Arjasa, Kapongan, Panji, klampokan, mangaran Sit, panarukanKendit, Mlandingan, Bungatan,Suboh Besuki , Banyuglugur, sumbermalang, jatibanteng	15.508 orang	
44	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	APBD (DAK NON FISIK)	3.300.000	Puskesmas Suboh	383 orang	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
45	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	APBD (DAK NON FISIK)	187.991.000	Pusk Wonorejo, Banyuputih,, Asembagus, Arjasa, Kapongan, Panji, Sit, Kendit, Mlandingan, Bungatan, Besuki , Banyuglugur	7,737 orang	
46	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	APBD (DAK NON FISIK)	527.402.214	Pusk Wonorejo, Banyuputih,, Asembagus,Jangkar, Arjasa, Kapongan, Panji, klampokan, mangaran Sit, panarukanKendit, Mlandingan, Bungatan,Suboh Besuki , Banyuglugur, sumbermalang, jatibanteng	20 Puskesmas	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
47	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	APBD (DAK NON FISIK)	2.396.666.514	Pusk Wonorejo, Banyuputih,, Asembagus,Jangkar, Arjasa, Kapongan, Panji, klampokan, mangaran Sit, panarukanKendit, Mlandingan, Bungatan,Suboh Besuki , Banyuglugur, sumbermalang, jatibanteng	186.869 orang	
48	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			√	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	APBD (DAU)	350.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Petani dan warga sekitar sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
49	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			√	Normalisasi/Restor asi Sungai	APBD (DAU)	2.885.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Petani dan warga sekitar sungai	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
50	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			√	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	APBD (DAU)	9.815.013.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Petani dan warga sekitar sungai	
51	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			√	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	APBD (DAU)	10.795.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Juru dan PPA	
52	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			√	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD (DAU)	450.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelompok HIPPA, GHIPPA dan IHIPPA	
53	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			√	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	APBD (DAU)	105.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelompok Masyarakat	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
54	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			√	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	APBD (DAU)	800.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Tangga di kawasan perdesaan	
55	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			√	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	APBD (DAU)	280.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	Desa se-Kabupaten Situbondo	
56	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			√	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	APBD (DAU)	11.044.036.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Tangga di kawasan perdesaan	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
57	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			√	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	APBD (DAU)	550.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Tangga di kawasan perdesaan	
58	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM AIR LIMBAH			√	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	APBD (DAU)	4.200.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Tangga lokus stunting	
59	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM AIR LIMBAH			√	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	APBD (DAU)	12.185.528.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Tangga miskin ekstrim	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
60	PROGRAM PENYELENGG ARAAN JALAN			√	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	APBD (DAU)	600.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Masyarakat	
61	PROGRAM PENYELENGG ARAAN JALAN			√	Rehabilitasi Jalan	APBD (DAU)	10.590.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Masyarakat	
62	PROGRAM PENYELENGG ARAAN JALAN			√	Pemeliharaan Rutin Jalan	APBD (DAU)	18.370.250.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Masyarakat	
63	PROGRAM PENYELENGG ARAAN JALAN			√	Rehabilitasi Jembatan	APBD (DAU)	3.200.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Masyarakat	
64	PROGRAM PENGEMBANG AN JASA KONSTRUKSI			√	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	APBD (DAU)	200.000.000	Kab. Situbondo	Tenaga kerja konstruksi dan anggota Badan Usaha yang belum memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi di Kab. Situbondo	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
65	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			√	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	APBD (DAU)	200.000.000	Kab. Situbondo	Penyedia jasa konstruksi maupun pengguna jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Situbondo	
66	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			√	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	APBD (DAU)	150.000.000	Kab. Situbondo	Stake holder penyelenggara jasa konstruksi	
67	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			√	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	APBD (DAU)	1.445.400.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Masyarakat yang masuk dalam kawasan permukiman kumuh	
68	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			√	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	APBD (DAU)	675.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Stake holder pengguna data perumahan di lokasi rawan bencana	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
69	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			√	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	APBD (DAU)	12.740.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Tangga miskin ekstrim	
70	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			√	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	APBD (DAU)	94.600.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Developer yang belum menyerahkan PSU	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
71	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			√	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	APBD (DAU)	3.800.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Warga perumahan dengan status PSU sudah diserahkan kepada pemerintah kabupaten	
72	PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA	√			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	APBD (DAU)	50.000.000	Lokasi kegiatan difokuskan pada 1 lokasi di Kabupaten Situbondo	Target kegiatan ini sebesar 50 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
73	PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA	√			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	APBD (DAU)	37.000.000	Lokasi kegiatan difokuskan pada 1 lokasi di Kabupaten Situbondo	Target kegiatan ini sebesar 40 Keluarga dari beberapa desa rawan bencana	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
74	PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA	√			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	APBD (DAU)	120.000.000	Lokasi kegiatan tersebar di 16 Kecamatan, pada 39 Desa/Kelurahan	355 individu yang menerima pelayanan kegiatan	
75	PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA	√			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	APBD (DAU)	200.000.000	Lokasi kegiatan tersebar di 17 Kecamatan dan 136 Desa/Kelurahan	Target kegiatan ini sebesar 600 Orang	
76	PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL	√			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD (DAU)	25.000.000	Kecamatan Jatibanteng	50 Orang	Dinas Sosial

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
77	PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL	√			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD (DAU)	50.000.000	Desa Bletok Kecamatan Bungatan	20 Orang	
78	PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL	√			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD (DAU)	100.000.000	Wilayah Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Timur	300 Orang	
79	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	√			Penyediaan Sandang	APBD (DAU)	217.000.000	Se- Kabupaten Situbondo	160 Orang Penerima Manfaat	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
80	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	√			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	APBD (DAU)	120.000.000	Se- Kabupaten Situbondo (Pelaksanaan Kegiatan di UPT. Pelayanan Sosial Petirahan Anak)	50 Orang Penerima Manfaat	
81	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	√			Pemberian Layanan Rujukan	APBD (DAU)	75.000.000	Se-Kabupaten Situbondo	30 Orang Penerima Manfaat	
82	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	√			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	APBD (DAU)	70.000.000	Kecamatan Situbondo, Kecamatan Besuki, Kecamatan Mangaran, Kecamatan Psnarukan	20 Orang Penerima Manfaat	
83	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	√			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	APBD (DAU)	54.000.000	Se-Kabupaten Situbondo	100 Orang Penerima Manfaat	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
84	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	√			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	APBD (DAU)	50.000.000	Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Situbondo	10 Orang Eks Narapidana	
85	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	√			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	APBD (DAU)	87.000.000	Se- Kabupaten Situbondo (Pelaksanaan Kegiatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas sosial Provinsi Jawa Timur	20 Orang Penerima Manfaat	
86	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	√			Pemberian Layanan Rujukan	APBD (DAU)	10.000.000	Se-Kabupaten Situbondo	25 Orang Penerima Manfaat	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
87	PROGRAM PERLINDUNGA N DAN JAMINAN SOSIAL	√			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	APBD (DAU)	100.000.000	Wilayah Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Timur	33.344 KPM	
88	PROGRAM PERLINDUNGA N DAN JAMINAN SOSIAL	√			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	APBD (DAU)	120.000.000	SEMUA DESA SEMUA KECAMATAN	26.520 KPM	
89	PROGRAM PERLINDUNGA N DAN JAMINAN SOSIAL	√			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	APBD (DAU)	4.100.000.000	SEMUA DESA SEMUA KECAMATAN	75 Paket Sembako	
90	ROGRAM PENANGANAN BENCANA	√			Penyediaan Makanan	APBD (DAU)	25.000.000	SEMUA DESA SEMUA KECAMATAN	30 Paket Sandang	
91	ROGRAM PENANGANAN BENCANA	√			Penyediaan Sandang	APBD (DAU)	7.500.000	SEMUA DESA SEMUA KECAMATAN	1 Tenda 19 Velbed	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
92	ROGRAM PENANGANAN BENCANA	√			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	APBD (DAU)	27.000.000	SEMUA DESA SEMUA KECAMATAN	18 LKSA 50 Legiun Veteran	
93	ROGRAM PENANGANAN BENCANA	√			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	APBD (DAU)	180.000.000	SEMUA DESA SEMUA KECAMATAN	30 Orang	
94	ROGRAM PENANGANAN BENCANA	√			Pelayanan Dukungan Psikososial	APBD (DAU)	7.500.000	SEMUA DESA SEMUA KECAMATAN	KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	
95	ROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVIT AS TENAGA KERJA		√		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	APBD (DAU)	885.000.000	Kabupaten Situbondo	144 Peserta pelatihan	Dinas Ketenagakerjaan
96	ROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVIT AS TENAGA		√		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	APBD (DAU)	50.000.000	Kabupaten Situbondo	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Balai Latihan Kerja Komunitas di Kabupaten	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	KERJA								Situbondo	
97	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		√		Job Fair/Bursa Kerja	APBD (DAU)	200.000.000	Kabupaten Situbondo	Para pencari kerja yang ikut serta dalam kegiatan job fair	
98	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		√		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	APBD (DAU)	50.000.000	Kabupaten Situbondo	12 Individu disabilitas dan 20 perusahaan	
99	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		√		Perluasan Kesempatan Kerja	APBD (DAU)	400.000.000	Kabupaten Situbondo	70 peserta perluasan kerja	
100	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			√	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan	APBD (DAU)	152.000.203	Kabupaten Situbondo	Pekerja/Buruh/Kar yawan dan Perusahaan di Kabupaten Situbondo	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
					Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan					
101	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		√		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	APBD (DAU)	137.792.700	Kab. Situbondo	anak sekolah dan masyarakat umum	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
102	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	√			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	APBD (DAU)	35.446.629	Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo	Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
103	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	√			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	APBD (DAU)	15.356.490	Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo	Masyarakat	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
					Penduduk					
104	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	√			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	APBD (DAU)	46.221.710	Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo	Masyarakat	
105	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	√			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	APBD (DAU)	6.067.800	Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo	Masyarakat	
106	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	√			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	APBD (DAU)	13.760.000	Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo	Masyarakat	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
107	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	√			Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	APBD (DAU)	50.000.000	Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo	Operator Desa dan Kecamatan	
108	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	√			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	APBD (DAU)	25.000.000	Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo	Perangkat Daerah	
109	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	√			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	APBD (DAU)	10.000.000	Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo	Perangkat Daerah	
110	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	√			Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	APBD (DAU)	15.000.000	Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo	Masyarakat	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
111	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	√			Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	APBD (DAU)	27.026.353	Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo	masyarakat	
112	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	√			Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	APBD (DAU)	8.525.114	Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo	Perangkat Daerah	
113	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	√			Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	APBD (DAU)	10.000.000	Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo	Operator Desa	
114	PROGRAM PENATAAN DESA			√	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	APBD (DAU)	200.000.000	79 Desa	79 Peta Batas Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
115	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			√	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	APBD (DAU)	100.000.000	132 Desa	264 Perangkat Desa	Desa
116	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			√	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	APBD (DAU)	50.000.000	2 Kecamatan	100 Anggota BPD	
117	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		√		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	APBD (DAU)	405.000.000	132 desa dan 4 kelurahan	Pemerintah Desa dan kelurahan yang akan mengikuti Lomba desa, serta 132 desa yang akan dilakukan penghitungan IDM tahun 2024	
118	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			√	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	APBD (DAU)	2.095.000.000	132 Desa	1689 Perangkat Desa, 5 Dokumen Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
119	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		√		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	APBD (DAU)	1.000.000.000	136 Desa/Kelurahan	136 UP2K Desa/Kelurahan se Kab. Situbondo, 85 Lansia di Kel. Ardirejo, 17 Desa/Kel. Dr 17 Kec.	
120	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		√		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM), LAD/Kel dan Masyarakat Hukum Adat	APBD (DAU)	2.017.000.000	136 Desa/Kelurahan	Insentif RT sebanyak 3.348 RT, untuk BKK Program Jatim Puspa sebanyak 60 KPM Desa Gebangan kec. Kapongan dan 55 KPM Desa Tanjung Kamal kec. Mangaran	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
121	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	√			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	APBD (BO-KB)	1.745.700.000	136 Desa/ Kelurahan	Tim Pendamping Keluarga sebanyak 1.587	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
122	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		√		Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	APBD (DAU)	656.891.604	Kabupaten Situbondo	33 orang	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
123	Program Perlindungan Perempuan	√			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD (DAU dan BO-KB)	115.919.760	Kabupaten Situbondo	30 Orang (Korban Kekerasan)	
124	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		√		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD (DAU)	72.010.000	Kabupaten Situbondo	lembaga yang masuk ke dalam gugus tugas KLA	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
125	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	√			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD (DAU)	60.000.000	Kabupaten Situbondo	lembaga yang masuk ke dalam gugus tugas KLA	
126	Program Perlindungan Khusus Anak	√			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	APBD (DAU dan BO-KB)	182.000.000	Kabupaten Situbondo	45 orang	
127	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		√		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	APBD (DAU dan BO-KB)	554.050.000	74 Desa di Kabupaten Situbondo	25 Orang Per Desa (Kader Poktan Kampung KB, Pokja Kampung KB, PUS, Ibu Hamil, Baduta, Balita, PPKBD, Sub PPKBD, PKB/PLKB)	
128	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga		√		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	APBD (BO- KB)	163.200.000	17 Kecamatan	3106 orang ibu yang mempunyai balita	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Sejahtera (KS)									
129	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		√		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	APBD (DAU dan BO-KB)	332.100.000	Desa Kalimas, Kec. Besuki. Desa Kukusan, Kec. Kendit	2 desa	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
130	PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			√	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	APBD (DAU)	75.000.000	Seluruh Kabupaten Situbondo	Masyarakat Kabupaten Situbondo yang memanfaatkan pelayanan penyebrangan jangkar ke pulau madura	Dinas Perhubungan
131	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		√		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	APBD (DAU)	400.000.000	Desa Kalianget Kec. Banyuglugur dan Desa Kilensari Kec. Pandarukan	Nelayan	Dinas Peternakan dan Perikanan
132	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		√		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	APBD (DAU)	30.000.000	17 Kecamatan Berpantai	Nelayan, KUB, KUGAR	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
133	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		√		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	APBD (DAU)	25.000.000	Kapongan, Kapongan	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Desa Kapongan	
134	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		√		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	APBD (DAU)	55.000.000	Sumberwaru, Banyuputih	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Desa Karangtekok	
135	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		√		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	APBD (DAU)	55.000.000	Panji, Kapongan dan Bungatan	Pelaku Usaha Pembenihan di Kecamatan Panji, kapongan dan Bungatan	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
136	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		√		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	APBD (DAU)	25.000.000	Dawuhan, Situbondo	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Desa Dawuhan	
137	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		√		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	APBD (DAU)	50.000.000	Wonorejo, Banyuputih dan Tambak Ukir, Kendit	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Desa Wonorejo dan Tambak Ukir	
138	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		√		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	APBD (DAU)	65.000.000	Fasilitasi Kabupaten Situbondo, Musrenbang desa Sumberanyar	Poklahsar yang dibina dan penerima manfaat	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
139	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		√		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	APBD (DAU)	75.000.000	Surabaya	Ibu-Ibu PKK Kab. Situbondo	
140	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		√		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	APBD (DAU)	650.000.000	Desa Gelung	Petani	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
141	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		√		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	APBD (DAU)	8.145.000.000	17 kecamatan	Petani	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
142	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		√		Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan (Dinas Peternakan dan Perikanan)	APBD (DAU)	40.000.000	KRTT Trebungan, Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran	KRTT Trebungan	
143	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			√	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	APBD (DAU)	2.650.000.000	Kab. Situbondo	Kelompok Tani	
144	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			√	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	APBD (DAU)	1.750.000.000	Kab. Situbondo	Kelompok Tani	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
145	PROGRAM PENGENDALIA N DAN PENANGGULA NGAN BENCANA PERTANIAN		√		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	APBD (DAU)	210.287.500	Desa Pokaan Kec. Kapongan, Desa Cemara Kec. Suboh, Kel . Mimbaan Kec. Panji, Desa Bungatan Kec. Bungatan, Desa Kendit Kec. Kendit, Desa Mlandingan Kulon Kec. Mlandingan, Desa Kedungdowo Kec. Arjasa, Desa Landangan Kec. Kapongan, Desa Wonokoyo Kec. Kapongan, Desa Ketah Kec. Suboh, Desa Wringin Anom Kec. Pandarukan, Desa Peleyan Kec. Pandarukan, Desa Selomukti Kec. Mlandingan, Desa Kesambi Rampak Kec. Kapongan, Desa Sumber Tengah Kec.	Lahan Petani yang terdeteksi adanya serangan OPT	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
146	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		√		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	APBD (DAU)	572.255.600	10 Desa Lokus Stunting dan 1 Desa Rawan pangan dengan salah satu variabel penentunya data kemiskinan P3KE. Kec. Panji (Desa Sliwung, Desa Battal, Desa Panji Lor dan Desa Juglangan), Kec. Situbondo (Desa Olean), Kec. Banyuglugur (Desa Kalisari), Kec.Mangaran (Desa Tanjung Glugur, Desa Trebungan), Kec. Bungatan (Desa Bletok), Kec. Pamarukan (Desa Paowan), Kec. Arjasa	Keluarga di lokus penanganan stunting dan rentan pangan	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
								(Desa Jatisari)		
147	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		√		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	APBD (DAU)	382.508.000	Kab. Situbondo	17 Gapoktan	
148	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		√		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	APBD (DAU)	557.908.000	Kab. Situbondo	10 Poktan	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
149	PROGRAM PEMBANGUNA N KAWASAN TRANSMIGRAS I		√		Penyuluhan Transmigrasi	APBD (DAU)	10.000.000	Kecamatan Arjasa	Calon Peserta Transmigrasi	Dinas Ketenagakerjaan
150	PROGRAM PEMBANGUNA N KAWASAN TRANSMIGRAS I		√		Pelatihan Transmigrasi	APBD (DAU)	45.000.000	Kabupaten Situbondo	Calon Peserta Transmigrasi	
151	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAA N		√		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	APBD (DAU)	25.000.000	Situbondo / Kelurahan Patokan	34 peserta	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
152	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAA N	√			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat	APBD (DAU)	115.475.600	Seluruh Desa dan Kecamatan di Kabupaten Situbondo	28.937 Pemustaka	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
					Kabupaten/Kota					
153	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	√			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	APBD (DAU)	95.000.000	Situbondo / Kelurahan Dawuhan	28.937 Pemustaka	
154	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		√		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	APBD (DAU)	20.000.000	Sumberanyar, Jatibanteng	1. Pemuda wirausaha pemula yang bekerja sebagai perias manten	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
155	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		√		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	APBD (DAU)	160.000.000	1. Pasir Putih, Bungatan 2. Bletok, Bungatan 3. Wonorejo, Banyuputih	1. Pelajar di Kabupaten Situbondo dalam hal lomba melukis dan pelaku usaha pariwisata di Pasir	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
									Putih 2. Pelaku usaha pariwisata di Desa Bletok 3. Pokdarwis, Bumdesa	
156	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		√		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	APBD (DAU)	200.000.000	Kabupaten Situbondo	Pelaku ekonomi kreatif di Situbondo	
157	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			√	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	APBD (DAU)	100.000.000	Kabupaten Situbondo	Penduduk Kategori Miskin dan Sangat Miskin di Kabupaten Situbondo	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatka n Pendapatan	Meminimalka n Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
158	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			√	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	APBD (DAU)	250.000.000	Kabupaten Situbondo	Penduduk Kategori Miskin dan Sangat Miskin di Kabupaten Situbondo	
159	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			√	Pelayanan Informasi Publik	APBD (DAU)	21.661.000	Se Kabupaten Situbondo	Masyarakat di kabupaten Situbondo dan di Luar Kabupaten Situbondo	Dinas Komunikasi dan Informatika
160	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			√	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	APBD (DAU)	70.000.000	Se Kabupaten Situbondo	Internal Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Situbondo dan di Luar Kabupaten Situbondo	

No	Program Nomenklatur	Tujuan Program			Sub-Kegiatan Nomenklatur	Sumber Pembiayaan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Perangkat Daerah Pelaksana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
161	Program Pengembangan UMKM		√		Pengembangan Usaha Mikro	APBD (DAU)	300.000.000	Desa Suboh, Desa Ketah	90 UM	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
162	Program Pengembangan UMKM		√		Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	APBD (DAU)	210.000.000	Desa Olean, Sumber Anyar dan Klatakan	90 UM	
163	Program Perencanaan Pengembangan Industri		√		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	APBD (DAU, DAK, DBHCHT)	4.677.120.000	Situbondo	1000 IKM	
164	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		√		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	DAU	22.000.000	Kab. Situbondo	Pendampingan dan fasilitasi kepada pokmas miskin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

4.2 STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan nasional, Presiden Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Terbatas strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada tanggal 4 Maret 2021 dilanjutkan pada tanggal 21 Juli 2021 dan menghasilkan arahan antara lain:

1. Strategi percepatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan adalah upaya konvergensi penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di akhir periode RPJMN pada tahun 2024 agar dapat mencapai 0 persen dilakukan validasi data identitas penduduk sangat miskin yang mencapai 9.91 juta jiwa, dimana validasi data mencakup nama dan lokasi.
2. Strategi pengentasan kemiskinan harus terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran dimana Kementerian Sosial dan pihak terkait berkoordinasi mengelola dan memutakhirkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
3. Walaupun menghadapi pandemi, upaya penanganan kemiskinan ekstrem tidak boleh berhenti dengan melaksanakannya secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi.
4. Memastikan intervensi di sektor Pendidikan, Kesehatan, dan air bersih dapat diterima.
5. Pertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan.
6. Libatkan sektor swasta untuk berperan sebagai off taker produk kelompok miskin ekstrem sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
7. Fokus pada 5 (lima) kabupaten/kota di 7 (tujuh) Provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Kemiskinan Ekstrem diukur menggunakan “absolutely poverty measure” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Definisi miskin ekstrem adalah kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, setara dengan USD 1.9 PPP (*Purchasing Power Parity*), dengan kata lain adalah “Masyarakat yang memiliki pengeluaran perkapita per hari di bawah US \$ 1.9 PPP”. dimana PPP di hitung oleh Bank Dunia dengan membandingkan harga komoditas antar negara. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut di atas. upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui dua pendekatan utama yaitu: pertama, Mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua Melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan. Upaya percepatan dilakukan di wilayah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan.

Rencana kerja percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem secara nasional dilakukan dalam tiga tahap. antara lain:

1. Tahap 1 sebanyak 35 kabupaten dalam 7 provinsi pada tahun 2021, dimana masing-masing provinsi terdapat 54 kabupaten. Lokasi prioritas Jatim antara lain Kabupaten Probolinggo, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan dan Sumenep.
2. Sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Republik Indonesia tentang Kabupaten/Kota

Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem Tahun 2022 sebanyak 212 kabupaten/kota perluasan pada tahun 2022. Adapun kabupaten prioritas yang diintervensi di Jatim antara lain Kabupaten Tahap 1 dan 20 Kabupaten tambahan antara lain: Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Blitar, Kediri, Malang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang. Madiun, Ngawi, Tuban, Gresik, Sampang, Pamekasan dan Kota Surabaya.

- 3. Tahap 3 sebanyak 514 kabupaten/kota perluasan pada tahun 2023-2024. Di Jawa Timur terdiri dari Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kota Blitar, Kota Mojokerto dan Kota Madiun.

Dalam rangka mendukung program tersebut maka berikut strategi dan program yang disusun Kabupaten Situbondo dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada Tahun 2024 dijabarkan ke dalam 52 program yang akan dilaksanakan dalam 192 subkegiatan dengan lebih detail ada pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pemetaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Situbondo Tahun 2024

No	Program Nomenklatur	Sub-Kegiatan Program	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
A.	Penurunan Jumlah Kantong - Kantong Kemiskinan			
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Normalisasi/Restorasi Sungai	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
5	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
6	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Operasional Unit Pengelola Irigasi	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

No	Program Nomenklatur	Sub-Kegiatan Program	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Jalan	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pemeliharaan Rutin Jalan	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Jembatan	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
21	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

No	Program Nomenklatur	Sub-Kegiatan Program	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
				Permukiman
22	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
23	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
24	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perbaikan RTLH untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
25	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
26	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
27	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DAU	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
28	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	DAU, DBHCHT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
29	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DAU, DBHCHT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
30	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	DAU, DBHCHT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
31	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Dinas Kesehatan

No	Program Nomenklatur	Sub-Kegiatan Program	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
32	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengembangan Puskesmas	APBD KAB (DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)),Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)	Dinas Kesehatan
33	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	APBD KAB (DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT))	Dinas Kesehatan
34	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	APBD KAB (DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT))	Dinas Kesehatan
35	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	APBD KAB (DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)),Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)	Dinas Kesehatan
36	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pelayanan Informasi Publik	DAU	Dinas Komunikasi dan Infomatika
37	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah berbasis Elektronik	DAU	Dinas Komunikasi dan Infomatika
38	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	DAU	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
39	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	DAU	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
40	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penambahan Ruang Kelas Baru	APBD Kab dan DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
41	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengembangan Sarana dan Prasarana dan utilitas sekolah	APBD Kab dan DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
42	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	APBD Kab dan DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
43	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	APBD Kab dan DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
44	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APBD Kab dan DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program Nomenklatur	Sub-Kegiatan Program	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
45	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APBD Kab dan DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
46	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	APBD Kab dan DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
47	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APBD Kab dan DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
48	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengadaan Mebel Sekolah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
49	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APBD Kab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
50	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
51	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengembangan Sarana dan Prasarana dan utilitas sekolah	APBD Kab dan DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
52	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	APBD Kab dan DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	APBD Kab dan DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
54	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengadaan Mebel Sekolah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
55	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	APBD Kab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
56	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APBD Kab dan DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
57	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	APBD Kab dan DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
58	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APBD Kab dan DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
59	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
60	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
61	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	APBD Kab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
62	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DAU	Dinas Perhubungan

No	Program Nomenklatur	Sub-Kegiatan Program	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
63	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penyuluhan Transmigrasi	APBD Kab	Dinas Ketenagakerjaan
64	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pelatihan Transmigrasi	APBD Kab	Dinas Ketenagakerjaan
65	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Sandang	APBD	Dinas Sosial
66	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	APBD	Dinas Sosial
67	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	APBD	Dinas Sosial
68	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Makanan	APBD	Dinas Sosial
69	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Sandang	APBD	Dinas Sosial
70	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penanganan khusus bagi kelompok Rentan	APBD	Dinas Sosial
71	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
72	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
73	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	APBD dan APBN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
B.	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat			
74	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
75	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD Kab	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
76	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	APBN, APBD Kab	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program Nomenklatur	Sub-Kegiatan Program	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
77	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD Kab	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
78	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	DAU dan DAK Non Fisik	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
79	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	DAU	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
80	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	DAU	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
81	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
82	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
83	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	APBN, APBD Kab	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
84	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD Kab	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
85	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD Kab	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program Nomenklatur	Sub-Kegiatan Program	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
86	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	APBN, APBD Kab	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
87	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	APBN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
88	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Dinas Kesehatan
89	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	APBD KAB (DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Transfer Umum-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik)	Dinas Kesehatan
90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengadaan Obat, Vaksin		Dinas Kesehatan
91	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Dinas Kesehatan
92	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT),DAK Non Fisik-BOKKB-BOK)	Dinas Kesehatan
93	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	APBD KAB (Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah	Dinas Kesehatan

No	Program Nomenklatur	Sub-Kegiatan Program	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
			Daerah Provinsi)	
94	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,DAK Non Fisik-BOKKB-BOK)	Dinas Kesehatan
95	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,DAK Non Fisik-BOKKB-BOK)	Dinas Kesehatan
96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,DAK Non Fisik-BOKKB-BOK)	Dinas Kesehatan
97	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan)	Dinas Kesehatan
98	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	APBD KAB (DAK Non Fisik-BOKKB-BOK)	Dinas Kesehatan
99	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,DAK Non Fisik-BOKKB-BOK)	Dinas Kesehatan
100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan)	Dinas Kesehatan
101	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan)	Dinas Kesehatan
102	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,DAK Non Fisik-BOKKB-BOK)	Dinas Kesehatan
103	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan)	Dinas Kesehatan

No	Program Nomenklatur	Sub-Kegiatan Program	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
104	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,DAK Non Fisik-BOKKB-BOK)	Dinas Kesehatan
105	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,DAK Non Fisik-BOKKB-BOK)	Dinas Kesehatan
106	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT))	Dinas Kesehatan
107	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,DAK Non Fisik-BOKKB-BOK)	Dinas Kesehatan
108	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,DAK Non Fisik-BOKKB-BOK)	Dinas Kesehatan
109	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	APBD KAB (Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN,DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT))	Dinas Kesehatan

No	Program Nomenklatur	Sub-Kegiatan Program	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
110	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT),Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik,DAK Non Fisik-BOKKB-BOK)	Dinas Kesehatan
111	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,DAK Non Fisik-BOKKB-BOK)	Dinas Kesehatan
112	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,DAK Non Fisik-BOKKB-BOK)	Dinas Kesehatan
113	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,DAK Non Fisik-BOKKB-BOK)	Dinas Kesehatan
114	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,DAK Non Fisik-BOKKB-BOK)	Dinas Kesehatan
115	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Dinas Kesehatan
116	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan)	Dinas Kesehatan
117	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Penelitian Kesehatan		Dinas Kesehatan

No	Program Nomenklatur	Sub-Kegiatan Program	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
118	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,DAK Non Fisik-BOKKB-BOK)	Dinas Kesehatan
119	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan)	Dinas Kesehatan
120	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)	Dinas Kesehatan
121	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	APBD KAB (Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan,Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)	Dinas Kesehatan
122	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
123	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
124	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
125	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
126	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penyusunan Rencana Kontijensi	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
127	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
128	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
129	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
130	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
131	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APBD Kab dan DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
132	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APBD Kab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program Nomenklatur	Sub-Kegiatan Program	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
133	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	APBD Kab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
134	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APBD Kab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
135	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	BOS Reguler, BOS Kinerja	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
136	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	APBD Kab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
137	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APBD Kab dan DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
138	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APBD Kab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
139	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APBD Kab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
140	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Dana BOP PAUD	BOP PAUD Reguler dan BOP PAUD Kinerja	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
141	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	APBD Kab dan DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
142	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	APBD Kab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
143	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Pajak Rokok	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
144	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	APBD Kab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
145	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	BOP Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
146	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Job Fair/Bursa Kerja	APBD Kab	Dinas Ketenagakerjaan
147	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	APBD Kab	Dinas Ketenagakerjaan
148	PORGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	APBD Kab	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
149	PORGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	APBD Kab	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program Nomenklatur	Sub-Kegiatan Program	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
150	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	APBD Kab	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
151	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	APBD Kab	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
152	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	APBD Kab	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
153	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Bimbingan teknis tentang akte kematian	APBD Kab	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
154	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengolahan dan penyediaan data kependudukan	APBD Kab	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
155	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	APBD Kab	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
156	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	APBD Kab	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
157	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kerjasama Pemanfaatan dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	APBD Kab	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
158	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	APBD Kab	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
159	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	APBD Kab	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
C.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat			
160	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
161	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
162	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

No	Program Nomenklatur	Sub-Kegiatan Program	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
163	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
164	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
165	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
166	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
167	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
168	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DAU	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
169	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DAU, DBHCHT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
170	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	DAU	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
171	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	DAU	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
172	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	DAU, DBHCHT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
173	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	DAU	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
174	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	DAU	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
175	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	DAU	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

No	Program Nomenklatur	Sub-Kegiatan Program	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
17 6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DAU	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
17 7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	DAU	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
17 8	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17 9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	APBN, APBD Kab	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18 0	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	APBN, APBD Kab	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18 1	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	APBD Kab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18 2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	APBD Kab	Dinas Ketenagakerjaan
18 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	APBD Kab	Dinas Ketenagakerjaan
18 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Perluasan Kesempatan Kerja	APBD Kab	Dinas Ketenagakerjaan
18 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	APBD	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
18 6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro	APBD	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
18 7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	APBD	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

No	Program Nomenklatur	Sub-Kegiatan Program	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
188	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	APBD	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
189	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	APBD	Dinas Sosial
190	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	APBD	Dinas Sosial
191	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	APBD	Dinas Sosial
192	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Peningkatan Kapasita Kelembagaan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahandan Masyarakat Hukum Adat	APBD Kab	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB V

PENUTUP

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan merupakan permasalahan nasional yang menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan dan harus dilakukan secara sistematis, terfokus, terencana dan terkoordinasi dengan baik. Kemiskinan juga telah menjadi permasalahan global yang secara khusus tertuang dalam tujuan SDG's. Penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang bersinergi secara efektif sehingga penanganannya dilakukan secara lintas sektor dan menjadi tanggungjawab multipihak, serta terkoordinasi dengan baik.

Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Situbondo Tahun 2022–2026. Penyusunan RAT merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, diselaraskan atau dipadukan dengan Visi dan Misi kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026.

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kabupaten Situbondo Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2024 dan diharapkan juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan. Oleh karena itu Rencana Aksi Tahunan (RAT) perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan keuangan daerah. Pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat, akedemisi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa dan dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja.

Dengan adanya dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) diharapkan dapat menjadi pemicu percepatan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo melalui pendekatan yang komprehensif dan terpadu serta pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI